

Prof. Dr. H. Maragustam, M.A.
Dr. Siti Khodijah, S.Pd., M.Si.
Marakhilda Namora Hana Siregar, M.A.

PENDIDIKAN AKHLAK SEBAGAI PONDASI KEPEMIMPINAN ISLAMI

Perspektif Filosofis di Madrasah

Buku ini hadir sebagai ikhtiar untuk menegaskan kembali pentingnya pendidikan akhlak dalam membentuk karakter pemimpin Islami. Di tengah krisis moral dan dekadensi nilai yang melanda banyak aspek kehidupan, umat Islam membutuhkan fondasi yang kuat dalam membina generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, keadilan, dan amanah sebagai ciri kepemimpinan Islami sejati.

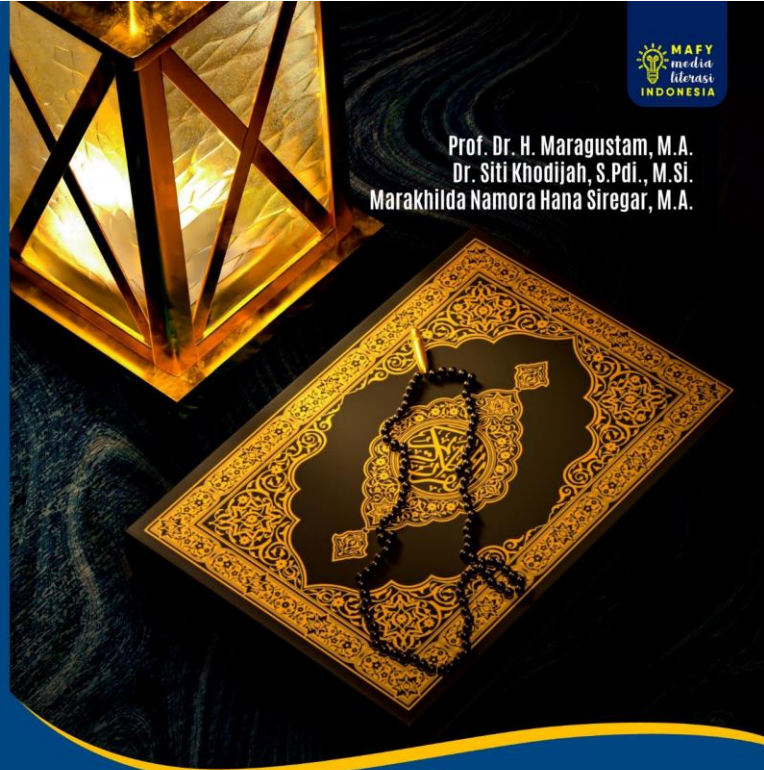
Melalui pembahasan mendalam terhadap konsep-konsep klasik dari para pemikir besar Islam seperti Ibnu Miskawaih dan Imam Al-Ghazali, serta telaah terhadap praktik kepemimpinan para sahabat Nabi Muhammad Saw, buku ini menyajikan refleksi kritis dan tawaran strategis bagi penguatan pendidikan akhlak, khususnya di lingkungan madrasah dan lembaga pendidikan Islam. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya para pendidik, pemimpin, mahasiswa, dan seluruh pihak yang peduli terhadap pembentukan kepemimpinan Islami yang berlandaskan nilai-nilai akhlak.

Penerbit Mafy (PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA)
Tanah Caram, Kota Solok, Sumatera Barat 27312
Anggota IKAPI 041/SBA/2023

✉ penerbitmafym@gmail.com
🌐 penerbitmafy.com
📞 Penerbit Mafy
📄 Mafy Media Literasi



PENDIDIKAN AKHLAK SEBAGAI PONDASI KEPEMIMPINAN ISLAMI
Perspektif Filosofis di Madrasah



PENDIDIKAN AKHLAK SEBAGAI PONDASI KEPEMIMPINAN ISLAMI

Perspektif Filosofis di Madrasah

**PENDIDIKAN AKHLAK
SEBAGAI PONDASI
KEPEMIMPINAN ISLAMI**
Perspektif Filosofis di Madrasah

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PENDIDIKAN AKHLAK SEBAGAI PONDASI KEPEMIMPINAN ISLAMI

Perspektif Filosofis di Madrasah

Prof. Dr. H. Maragustam, M.A.

Dr. Siti Khodijah, S.Pd.I., M.Si.

Marakhilda Namora Hana Siregar, M.A.



**PENDIDIKAN AKHLAK SEBAGAI PONDASI
KEPEMIMPINAN ISLAMI Perspektif Filosofis di
Madrasah**

Penulis:

Prof. Dr. H. Maragustam, M.A.

Dr. Siti Khodijah, S.Pd.I., M.Si.

Marakhilda Namora Hana Siregar, M.A.

Tata Letak:

Sofitahm

Desain Cover:

Mafy Media

Sumber Gambar Cover:

Freepick.com

Ukuran:

iv, 129 hlm, 15,5 cm x 23 cm

ISBN:

978-634-258-457-6

Cetakan Pertama:

Desember 2025

**Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-undang. Dilarang
menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.**

PT MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA

ANGGOTA IKAPI 041/SBA/2023

Kota Solok, Sumatera Barat, Kode Pos 27312

Kontak: 081374311814

Website: www.penerbitmafy.com

E-mail: penerbitmafy@gmail.com

Katà Pengantàr

Segala puji hanya milik Allah Swt, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan buku ini. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan utama dalam akhlak dan kepemimpinan, beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqamah hingga akhir zaman.

Buku ini hadir sebagai ikhtiar ilmiah untuk menegaskan kembali pentingnya pendidikan akhlak dalam membentuk karakter pemimpin Islami. Di tengah krisis moral dan dekadensi nilai yang melanda banyak aspek kehidupan, umat Islam membutuhkan fondasi yang kuat dalam membina generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas, keadilan, dan amanah sebagai ciri kepemimpinan Islami sejati.

Melalui kajian mendalam terhadap konsep-konsep klasik dari para pemikir besar Islam seperti Ibnu Miskawaih dan Imam Al-Ghazali, serta telaah terhadap praktik kepemimpinan para sahabat Nabi Muhammad Saw, buku ini menyajikan refleksi kritis dan tawaran strategis bagi penguatan pendidikan akhlak, khususnya di lingkungan madrasah dan lembaga pendidikan Islam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun akademik dalam proses penyusunan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya para pendidik, pemimpin, mahasiswa, dan seluruh pihak yang peduli terhadap pembentukan kepemimpinan Islami yang berlandaskan nilai-nilai akhlak.

Penulis

Daftār Isi

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penulisan	4
D. Urgensi Penulisan	4
E. Metode Penulisan	4
BAB 2 LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN AKHLAK.....	6
A. Definisi dan Konsep Akhlak dalam Islam	6
B. Pemikiran Filosof Muslim Tentang Akhlak (Ibn Miskawaih, Al-Ghazali, Al-Farabi).....	9
C. Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Kontemporer	18
BAB 3 KEPEMIMPINAN ISLAMIS DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS.....	22
A. Konsep Kepemimpinan dalam Islam.....	22
B. Filsafat Kepemimpinan Menurut Al-Farabi dan Al-Ghazali	27
C. Kepemimpinan Islami di Era Modern	34
BAB 4 PENDIDIKAN AKHLAK SEBAGAI PONDASI KEPEMIMPINAN ISLAMIS.....	41
A. Integrasi Akhlak dan Kepemimpinan	46
B. Model Kepemimpinan Islami Berbasis Pendidikan Akhlak.....	51
C. Nilai-Nilai Akhlak sebagai Basis Kepemimpinan di Madrasah	66
BAB 5 IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AKHLAK DI MADRASAH	72
A. Kurikulum Pendidikan Akhlak	78
B. Metode dan Strategi Penanaman Akhlak di Madrasah.....	85

C. Peran Guru dan Kepala Madrasah dalam Pendidikan Akhlak	93
BAB 6 TANTANGAN DAN PROSPEK PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KEPEMIMPINAN ISLAMI-----	99
A. Krisis Moral dan Tantangan Kepemimpinan di Era Globalisasi	101
B. Prospek Pendidikan Akhlak di Madrasah	104
C. Strategi Penguatan Pendidikan Akhlak untuk Mencetak Pemimpin Islami	106
BAB 7 PENUTUP -----	115
A. Kesimpulan	115
B. Rekomendasi Teoretis dan Praktis	116
DAFTAR PUSTAKA -----	117
TENTANG PENULIS -----	125

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan akhlak menempati posisi tertinggi dalam sistem pendidikan Islam, karena menjadi inti dari seluruh proses pembentukan manusia seutuhnya. Rasulullah Saw bersabda: “*Innamā bu‘itstu liutammima makārimaḥ akhlāq*”, artinya “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia” (HR. Aḥmad). Hadis ini menunjukkan bahwa misi utama pendidikan Islam bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga pembinaan moral dan spiritual. Pendidikan tanpa akhlak akan kehilangan arah etik dan tujuan ilahiah (Abu Hamid Al-Ghazali, 1998). Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan Islam harus menjadikan akhlak sebagai fondasi filosofis dari seluruh kurikulum dan praktik pendidikan.

Dalam pandangan Islam, akhlak tidak hanya berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah, tetapi juga dengan sesama manusia dan alam sekitar (Q.S. Al-Qalam [68]: 4). Pendidikan akhlak bertujuan menumbuhkan kesadaran moral (*al-ḍamīr al-akhlaqī*) yang berakar pada iman dan ilmu (‘Aṭīyyah, 2014). Konsep ini menegaskan bahwa pembentukan akhlak harus dilakukan melalui proses pendidikan yang berkelanjutan, melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan yang berlandaskan akhlak akan membentuk pribadi yang berintegritas, amanah, dan memiliki tanggung jawab sosial.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam formal memegang peranan penting dalam internalisasi nilai-nilai akhlak. Ia berfungsi tidak

hanya sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai wadah pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik (Nata, 2012). Keberhasilan madrasah diukur bukan hanya dari prestasi akademik, tetapi dari perilaku moral siswanya yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pendidikan akhlak perlu diintegrasikan ke seluruh aspek kehidupan madrasah, baik dalam pembelajaran, budaya sekolah, maupun kepemimpinan kepala madrasah yang berperan sebagai teladan moral.

Dalam konteks kepemimpinan, Islam menempatkan akhlak sebagai syarat utama bagi seorang pemimpin. Pemimpin yang baik bukan hanya yang cerdas, tetapi juga yang jujur, adil, dan bertanggung jawab (*al-amīn wa al-‘ādil*) (Ibn Taymiyyah, 1997). Kepemimpinan Islami (*al-qiyādah al-islāmiyyah*) bersifat moral-spiritual, yang menekankan keseimbangan antara kekuatan rasional dan bimbingan wahyu (Al-Farābī, 1998). Karena itu, pendidikan akhlak menjadi pondasi bagi pembentukan kepemimpinan yang berorientasi pada kebenaran dan kemaslahatan umat.

Realitas sosial dewasa ini menunjukkan bahwa kemajuan teknologi dan globalisasi tidak selalu diiringi dengan kemajuan moral. Krisis etika, individualisme, dan dehumanisasi menjadi tantangan besar bagi pendidikan modern (Lickona, 1991). Fenomena penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya integritas, dan lemahnya keteladanan menunjukkan bahwa pendidikan moral seringkali diabaikan dalam proses kepemimpinan. Oleh karena itu, membangun sistem pendidikan berbasis akhlak menjadi kebutuhan mendesak untuk menumbuhkan generasi pemimpin yang memiliki kesadaran etik dan tanggung jawab spiritual.

Para filosof Muslim klasik telah memberikan kerangka teoretis yang mendalam tentang pentingnya pendidikan akhlak. Ibn Miskawayh dalam *Tahdzīb al-Akhlaq wa Taṭhīr al-A‘rāq* (1959) menegaskan bahwa akhlak adalah hasil dari latihan jiwa (*riyāḍat al-naḥs*) untuk mencapai kesempurnaan moral. Al-Farābī dalam *Ara’ Ahl al-Madīnah al-Fāḍilah* (1998) menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati hanya dapat dicapai melalui kepemimpinan yang berlandaskan kebajikan. Sementara Al-Ghazālī dalam *Iḥyā’ ‘Ulūm al-Dīn* (2005) menekankan pentingnya penyucian hati (*tazkiyat al-naḥs*) sebagai inti pendidikan. Ketiga tokoh ini sepakat bahwa akhlak adalah dasar utama bagi setiap sistem kepemimpinan yang berkeadilan dan bermartabat.

Dalam konteks modern, berbagai pemikir Muslim kontemporer seperti Syed Muhammad Naquib al-Attas (1999) dan Fazlur Rahman (1982) juga menegaskan kembali pentingnya pendidikan moral dalam membentuk kepribadian umat. Menurut al-Attas, krisis dunia Islam bukan terletak pada kurangnya ilmu, tetapi pada “kehilangan adab”, yaitu hilangnya kemampuan menempatkan sesuatu pada tempat yang benar. Pendidikan akhlak, karenanya, merupakan sarana untuk mengembalikan tatanan moral dan spiritual umat Islam melalui integrasi ilmu dan nilai.

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa pendidikan akhlak memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk kepemimpinan Islami di madrasah. Pemimpin yang berakhlak akan menumbuhkan budaya organisasi yang berintegritas dan berkeadilan, sedangkan pemimpin yang kehilangan nilai moral akan menimbulkan kerusakan sistemik. Oleh karena itu, pendidikan akhlak perlu dipahami bukan sekadar sebagai pelajaran normatif, melainkan sebagai sistem filosofis dan praksis yang membangun manusia beradab. Buku ini hadir untuk menggali secara mendalam konstruksi pendidikan akhlak dari perspektif filosofis dan aplikasinya dalam kepemimpinan Islami di madrasah.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan utama yang menjadi fokus dalam buku ini adalah bagaimana prinsip pendidikan akhlak dapat dijadikan pondasi dalam pembentukan dan penguatan kepemimpinan Islami, khususnya di tengah tantangan zaman modern yang sarat krisis moral dan dekadensi etika. Secara rinci, pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab antara lain:

1. Bagaimana karakteristik kepemimpinan Islami yang bersumber dari nilai-nilai akhlak dalam Islam?
2. Apa saja tantangan pendidikan akhlak dalam membentuk pemimpin di era globalisasi?
3. Bagaimana peran madrasah dalam memperkuat pendidikan akhlak untuk mencetak pemimpin Islami?
4. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pendidikan akhlak sebagai fondasi kepemimpinan?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan buku ini adalah untuk:

1. Menggali dan menjelaskan konsep kepemimpinan dalam Islam berdasarkan nilai-nilai akhlak yang diajarkan dalam Al-Qur'an, Hadis, dan praktik para sahabat Nabi.
2. Mengidentifikasi krisis moral dan tantangan pendidikan akhlak dalam konteks sosial-kultural modern.
3. Menunjukkan peran strategis madrasah dalam membina karakter pemimpin melalui pendidikan akhlak.
4. Menawarkan strategi penguatan pendidikan akhlak untuk mencetak pemimpin Islami yang berintegritas dan berkarakter.

D. Urgensi Penulisan

Penulisan buku ini memiliki urgensi tinggi mengingat fenomena krisis moral yang tengah melanda berbagai lapisan masyarakat, termasuk di lingkungan pendidikan dan kepemimpinan. Kepemimpinan yang hanya dibangun atas dasar kemampuan teknis tanpa fondasi moral dan spiritual sangat rentan terhadap penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan krisis kepercayaan publik. Oleh karena itu, pendidikan akhlak sebagai warisan ajaran Islam perlu terus dihidupkan sebagai pilar utama dalam membentuk karakter pemimpin masa depan. Melalui pendekatan ini, diharapkan lahir generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul secara moral dan spiritual dalam menjalankan amanah kepemimpinan.

E. Metode Penulisan

1. Pendekatan dan Jenis Penulisan

Kajian ini menggunakan pendekatan filosofis sebagai dasar dalam melakukan analisis isi (content analysis), melalui analisis linguistik dan analisis konsep. Pendekatan linguistik membantu mengungkap makna terdalam dari sebuah teks atau pernyataan, sedangkan analisis konsep digunakan untuk menelaah istilah-istilah penting yang berkaitan langsung dengan ide utama kajian.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang bersumber dari bahan pustaka seperti buku, kitab, artikel, serta dokumen ilmiah lainnya.

2. Sumber Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan berbagai literatur yang relevan sebagai sumber data. Literatur tersebut meliputi buku-buku filsafat, filsafat pendidikan Islam, kitab tafsir, artikel, serta referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan topik, sehingga dapat memperkaya isi dan pembahasan karya ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menghimpun bahan bacaan berupa buku-buku, kitab-kitab, dan referensi lainnya yang berkaitan dengan tema penelitian.

4. Metode Analisis Data

Dalam kajian ini, penulis menerapkan metode analisis deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan objek kajian melalui penjabaran secara sistematis, faktual, dan mengaitkannya dengan fenomena yang diteliti.

Pada proses analisis, digunakan analisis isi dan analisis reflektif dengan cara menelusuri gagasan melalui pola pikir induktif dan deduktif, serta melakukan perbandingan. Penulis juga berpedoman pada model analisis Huberman dan Miles, yang meliputi tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan.

BAB 2

LANDASAN FILOSOFIS PENDIDIKAN AKHLAK

A. Definisi dan Konsep Akhlak dalam Islam

A khlak merupakan bentuk jamak dari khulq, yang secara etimologi berarti kebiasaan, perilaku, sifat dasar dan perangai (Suryadarma & Haq, 2015). Dari beberapa kata ini dapat dilihat bahwa ia merupakan sifat dasar yang dimiliki oleh seseorang. Selain beberapa sifat itu Mu'jam Lisan Al-Arab menambahkan bahwa akhlak merupakan agama (Al-Ghazali, 1962). Hal itu karena didalamnya terdapat perintah, larangan serta arahan guna perbaikan seseorang (Ali Farid Dahruj, 2008).

Dalam ajaran Islam, kedudukan akhlak atau moralitas menempati posisi yang sangat mulia. Hal ini terlihat dari sabda Nabi Saw yang menjadikan akhlak sebagai ukuran utama kualitas keimanan seseorang. Beliau menyatakan bahwa *“Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya,”* (HR. Abū Dāwūd dan Tirmidzī).

Dengan demikian, akhlak tidak dapat dipisahkan dari iman karena keduanya saling melengkapi dan menguatkan. Banyak nasihat Nabi yang menghubungkan iman kepada Allah dan keyakinan akan hari akhir dengan perilaku moral sehari-hari. Jika seorang muslim menjadikan ridha Allah sebagai tujuan tertinggi hidupnya, maka segala perbuatan yang tidak selaras dengan nilai tersebut akan ia pandang sebagai sesuatu yang rendah dan harus ditinggalkan.

Akhlak dalam perspektif Islam juga memiliki keunikan dan karakteristik tersendiri yang membedakannya dari sistem moral lainnya. Di antara ciri-ciri tersebut adalah: (a) bersifat rabbaniyah, yaitu berlandaskan pada nilai ketuhanan, (b) bersifat insaniyah karena sesuai dengan fitrah manusia, (c) bersifat syumuliyah atau menyeluruh mencakup seluruh aspek kehidupan, dan (d) bersifat wasathiyah, yakni menekankan sikap keseimbangan dan moderasi dalam berperilaku (Bafadhol, 2017).

Selain itu, Islam memberikan perhatian besar terhadap pembinaan akhlak sejak usia dini. Masa kanak-kanak dipandang sebagai periode paling strategis untuk menanamkan kebiasaan baik, karena karakter dan perilaku mudah dibentuk pada fase perkembangan tersebut.

Term akhlak berasal dari bahasa Arab. Ia adalah bentuk jama' dari *khuluq*. Secara etimologi, *khuluq* berarti *ath-thab'u* (karakter) dan *as-sajiyyah* (perangai) (Abdul Karim Zaidân, 1998). Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi yang diutarakan oleh para ulama tentang makna akhlak. Al-Ghazali memaknai akhlak dengan sebuah tatanan yang tertanam kuat dalam jiwa yang darinya muncul beragam perbuatan dengan mudah dan ringan, tanpa membutuhkan pemikiran dan pertimbangan (Al-Ghazali, 1962).

Begitupun dalam bahasa Yunani istilah “akhlak” dipergunakan istilah *ethos* atau *ethikos* atau etika (tanpa memakai huruf H) yang mengandung arti “Etika adalah usaha manusia untuk memakai akal budi dan daya pikirnya untuk memecahkan masalah bagaimana ia harus hidup kalau ia mau menjadi baik”. Etika itu adalah sebuah ilmu bukan sebuah ajaran (Suseno, 1987).

Sedangkan secara terminologis akhlak didefinisikan berbeda oleh para ulama. Menurut Ibn Miskawaih akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran (lebih dulu), sedangkan menurut Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak yaitu suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah, dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran lebih dulu (Emroni, 2023a). Akhlak adalah suatu istilah agama yang dipakai untuk menilai perbuatan manusia, apakah itu baik atau buruk (Mahyuddin, 2001). Sedangkan menurut Achmad Mubarak, akhlak adalah keadaan batin seseorang yang menjadi

sumber lahirnya perbuatan, dimana perbuatan itu lahir dengan mudah tanpa memikirkan untung rugi(Mubarok, 2001).

Tujuan dari pembinaan akhlak adalah tazkiyatun nafs (penyucian jiwa), sebagai jalan menuju kedekatan dengan Allah. Akhlak memiliki sifat tetap (*tsabit*) dan universal, karena ia didasarkan pada AlQur'an dan Sunnah yang dianggap sebagai sumber kebenaran mutlak. Nilai-nilai seperti kejujuran (*ṣidq*), kesabaran (*ṣabr*), keadilan (*ʿadl*), dan kasih sayang (*rahmah*) adalah prinsip dasar dalam etika Islam yang berlaku sepanjang masa dan lintas budaya.

Akhlag dalam Islam tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga praktis dan aplikatif. Ia merupakan sistem nilai yang membentuk perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia, hingga makhluk lain di alam semesta (Al-Ghazali, 2011). Akhlak menjadi pedoman konkret yang menunjukkan bagaimana seorang Muslim harus bersikap dan bertindak, baik secara lahiriah maupun batiniah.

Karakteristik utama dari akhlak Islam adalah universalitas dan keabadian. Prinsip-prinsip akhlak seperti kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*ʿadl*), amanah, kasih sayang (*rahmah*), dan kesabaran (*ṣabr*) berlaku dalam segala zaman dan tempat karena bersumber dari wahyu yang absolut. Nilai-nilai ini tidak berubah oleh perubahan budaya atau pendapat mayoritas, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Isra' (17): 23–38 dan QS. Al-Hujurat (49): 11–13.

Al-Qur'an dan Hadis menggambarkan akhlak dalam berbagai aspek: dari kejujuran, kesabaran, hingga kasih sayang terhadap sesama manusia. Akhlak ini diharapkan menjadi manifestasi dari kesalehan pribadi yang tercermin dalam perilaku sosial yang baik. Sebagai contoh, dalam Surah Al-Baqarah (2:263) yang artinya “Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya lagi Maha Penyantun.”

Allah memerintahkan umat-Nya untuk berbicara dengan cara yang baik dan lembut. Ini menunjukkan bahwa akhlak tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga sosial, yang melibatkan interaksi positif dengan orang lain.

B. Pemikiran Filosof Muslim tentang Akhlak (Ibn Miskawaih, Al-Ghazali, Al-Farabi)

1. Akhlak Menurut Ibn Miskawaih

Ibn Miskawaih, yang lahir pada tahun 932 M di kota Rayy, Persia, merupakan salah satu filsuf, sejarawan, dan pemikir moral terkemuka pada masa Keemasan Islam. Nama lengkapnya adalah Abu 'Ali Ahmad ibn Muhammad ibn Miskawaih. Ia dikenal luas melalui kontribusinya yang signifikan dalam bidang filsafat moral dan pendidikan etika. Latar belakang intelektual dan profesionalnya yang sangat beragam, mulai dari peran sebagai sejarawan istana hingga pendidik memungkinkan dirinya untuk mengintegrasikan pemikiran filosofis dengan praktik pemerintahan dan pendidikan moral berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Karya-karyanya menjadi rujukan penting dalam diskursus filsafat Islam, khususnya dalam kajian etika dan pendidikan karakter. Dalam karyanya yang monumental, *Tahzibul Akhlak* atau penyempurnaan akhlak (Miswar, 2021).

Pandangan tersebut juga selaras dengan penerapan pendidikan modern, di mana pendidikan moral yang berlandaskan pada filsafat Ibn Miskawaih terus memberikan pengaruh terhadap metode pedagogi Islam kontemporer (Handal Pratama Putra, 2019).

Ibn Miskawaih mengintegrasikan konsep-konsep etika Yunani-Romawi dengan ajaran Islam, sehingga melahirkan kerangka etika yang khas dan komprehensif. Dalam konstruksi etisnya, ia menempatkan kebajikan jiwa dan prinsip moderasi sebagai inti dari kesempurnaan moral. Menurutnya, sifat yang berlebihan maupun yang kurang merupakan bentuk keburukan, sementara moderasi merupakan ciri utama kebajikan yang sangat diperlukan dalam proses pembentukan karakter (Rifyal Novalia et al., 2023). Penelusuran filosofisnya menegaskan urgensi penyucian dan penyempurnaan akhlak, sebuah prinsip yang kemudian diadopsi banyak sarjana setelahnya dan tetap relevan dalam diskursus etika kontemporer (Fatimah et al., 2025).

Selain itu, Ibn Miskawaih juga memberikan kontribusi penting dalam bidang ekonomi Islam. Beberapa tulisan intelektualnya menelaah mengenai konsep pertukaran dan prinsip-prinsip finansial dalam masyarakat (Noor & Hidayah, 2022). Kajian tersebut menunjukkan kedalaman pemahamannya terhadap dinamika sosial dan menekankan

aspek moral dalam aktivitas ekonomi, sehingga memperlihatkan keterpaduan antara pemikiran filosofisnya dan praktik kehidupan sosial.

Pengaruh Ibn Miskawaih melintasi berbagai disiplin keilmuan, mulai dari etika, sejarah, hingga ekonomi, yang menunjukkan besarnya kontribusi multidimensional terhadap perkembangan pemikiran Islam. Integrasi antara filsafat moral dan praktik tata kelola kehidupan sosial yang ia gagas merupakan bagian paling mendasar dari warisannya, dan menunjukkan betapa ajaran-etisnya tetap signifikan, baik dalam konteks historis maupun dalam pemikiran Islam kontemporer.

Ibnu Miskawaih, seorang filsuf dan cendekiawan Muslim, menulis "Tahdzib al-Akhlaq" sebagai panduan komprehensif untuk pendidikan moral dan etika. Dalam kitab ini, ia mendefinisikan akhlak sebagai sifat-sifat yang tertanam dalam jiwa manusia yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan-perbuatan baik secara spontan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu (Ibn Miskawaih, 1985). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan akhlak harus mengarahkan individu untuk memiliki sifat-sifat mulia yang menjadi bagian tak terpisahkan dari karakter mereka.

Dalam karyanya "Tahzibul Akhlaq", Ibnu Miskawaih mengartikan akhlak sebagai kondisi batin yang memotivasi tindakan secara spontan tanpa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Beliau menegaskan bahwa akhlak merupakan kondisi batin yang memicu tindakan instinktif, dibagi menjadi dua asal: alamiah yang berkaitan dengan karakter bawaan dan yang terbentuk dari kebiasaan serta latihan (Azizah, 2017). Pengertian Akhlak menurut Ibn Miskawaih (Ibn Miskawaih, 1985). Yaitu:

حال النفس داعية لها إلى أفعالها من غير فكر ولا روية

Akhlaq berarti keadaan jiwa yang mengajak atau mendorong seseorang melakukan perbuatan-perbuatan tanpa dipikirkan dan dipertimbangkan sebelumnya (spontan).

Dengan pengertian, sikap yang keluar itu spontan dan berangkat dari keadaan jiwa yang merupakan sumber dari segala perbuatan baik ataupun buruk. Keadaan tersebut dapat berupa bawaan fitrah alamiah dan bertolak dari watak ataupun berupa hasil latihan serta pembiasaan dalam diri. Karena itu, apabila jiwa diarahkan kepada yang baik maka konsekuensinya

akan memunculkan akhlak yang baik, tetapi apabila sebaliknya maka menyebabkan tercela(Supriyanto, 2022).

Ibn Miskawaih dalam bukunya "Tahdzib al-Akhlaq" menjelaskan bahwa akhlak adalah kondisi jiwa yang dapat membentuk perilaku seseorang. Menurutnya, akhlak yang baik atau buruk ditentukan oleh kebiasaan dan latihan. Ia percaya bahwa pendidikan moral memainkan peran kunci dalam membentuk akhlak seseorang, dan melalui proses pendidikan yang tepat, seseorang dapat mengembangkan karakter yang baik. Hal ini menunjukkan bahwa karakter yang baik adalah hasil dari akhlak yang baik, yang dikembangkan melalui proses pembelajaran dan internalisasi nilai-nilai moral(Ibn Miskawaih, 1985).

Dari perspektif Ibnu Miskawaih, akhlak dalam Islam terdiri dari elemen kebaikan dan keburukan, dimana kebaikan adalah tujuan yang dapat dicapai manusia melalui tindakan sadar yang membawanya menuju tujuan penciptaannya. Sebaliknya, keburukan didefinisikan sebagai segala yang menghalangi pencapaian tujuan tersebut, baik itu karena keengganan dalam berusaha atau karena kemalasan dalam mencari kebaikan(Azizah, 2017).

Ibnu Miskawaih berpendapat bahwa sementara akhlak bersifat alami, ia juga dapat diubah melalui disiplin dan nasihat yang mulia. Awalnya, perubahan ini membutuhkan pemikiran dan pertimbangan, namun dengan praktik yang konsisten, akhlak tersebut akhirnya menjadi bagian dari diri seseorang. Keutamaan dan kemuliaan, oleh karena itu, bukanlah sesuatu yang datang secara alami tetapi harus diperjuangkan, sehingga penting untuk mengajarkan prinsip-prinsip dasar pengetahuan dan interaksi sosial.

Menurut Ibn Miskawaih terdapat empat pilar utama akhlak yang menjadi dasar keutamaan moral manusia. Keempat pilar ini saling berkaitan dan membentuk karakter yang mulia ketika diterapkan secara seimbang dalam kehidupan sehari-hari, yaitu:

- a. Hikmah (Kebijaksanaan): Kemampuan akal untuk membedakan benar dan salah, serta memahami hakikat segala sesuatu.
- b. *Syaja'ah* (Keberanian): Kekuatan jiwa dalam menghadapi tantangan dan mempertahankan kebenaran tanpa rasa takut yang berlebihan.

- c. *Iffah* (Kesederhanaan/Kemurnian): Pengendalian diri terhadap keinginan dan nafsu, menjaga diri dari perbuatan tercela.
- d. *'Adalah* (Keadilan): Sikap menempatkan segala sesuatu pada tempatnya, memberikan hak kepada yang berhak, dan bersikap adil dalam segala hal.

Dikutip oleh Beni Ahmad Saebani, Ibnu Miskawaih mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang terpatrit dalam jiwa yang menggerakkan seseorang untuk bertindak tanpa membutuhkan proses pemikiran dan pertimbangan yang mendalam (Mahsyam, 2021).

Ibnu Miskawaih juga menekankan pentingnya akal dalam proses pendidikan akhlak. Akal digunakan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, serta untuk mengarahkan jiwa agar selalu condong kepada kebaikan. Keteladanan dari orang tua, guru, dan masyarakat sangat penting dalam pendidikan akhlak. Sifat-sifat baik yang dicontohkan oleh orang-orang terdekat akan mempengaruhi dan membentuk karakter anak-anak dan pemuda.

Lingkungan yang baik dan kondusif sangat penting untuk pendidikan akhlak. Lingkungan yang penuh dengan perilaku baik akan mendorong individu untuk mengembangkan sifat-sifat yang mulia. Ibnu Miskawaih juga menekankan pentingnya latihan dan disiplin dalam pendidikan akhlak. Melalui latihan terus-menerus dan disiplin yang ketat, individu dapat mengembangkan kebiasaan baik dan menyingkirkan kebiasaan buruk.

Karakteristik pemikiran Ibnu Miskawaih dalam pendidikan akhlak secara umum dimulai dengan pembahasan tentang akhlak (karakter/watak). Menurutnya watak itu ada yang bersifat alami dan watak yang diperoleh melalui kebiasaan atau latihan. Kedua watak tersebut menurut Ibnu Miskawaih pada hakekatnya tidak alami, walaupun kita diciptakan dengan menerima watak, akan tetapi watak tersebut dapat diusahakan melalui pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, Ibnu Miskawaih juga menegaskan bahwa pendidikan akhlak didasarkan pada doktrin jalan tengah. Menurutnya jalan tengah diartikan dengan keseimbangan, moderat, harmoni, utama, mulia atau posisi tengah antara dua ekstrem baik dan buruk yang ada dalam jiwa manusia. Menurutnya, posisi tengah jiwa *bahimiyah* adalah *iffah*, yaitu menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Keempat keutamaan *al fadhilah akhlak al-*

iffah, *al-saja'ah*, *al-hikmah* dan *al-adalah* adalah merupakan pokok atau induk akhlak yang mulia. Adapun lawannya ada empat pula yaitu *al-jah*, *as-syarh*, *al-jubn* dan *al-jur*(Herningrum & Alfian, 2019).

Didalam bukunya Ibnu Miskawaih menjelaskan bahwa kearifan merupakan keutamaan jiwa berpikir dan mengetahui. Terletak pada mengetahui segala yang ada dan mengetahui segala yang Ilahi dan manusiawai. Pengetahuan ini membuahkan pemahaman mana diantara hal-hal yang mungkin yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Sederhana adalah keutamaan dari bagian hawa nafsu. Keutamaan ini tampak dalam diri manusia ketika dia mengarahkan hawa nafsu menurut penilaian baiknya, bila dengan kata lain, dia mengikuti pengetahuan yang akurat, hingga dia tidak terseret oleh hawa nafsunya, lalu dia bebas tidak menjadi hamba hawa nafsunya. Keberanian adalah keutamaan jiwa amarah, dan muncul pada diri seseorang bila jiwa ini tunduk dan patuh terhadap jiwa berpikir serta menggunakan penilaian baik dalam menghadapi hal-hal yang membahayakan. Keadilan juga merupakan kebajikan jiwa, yang timbul akibat menyatunya tiga kebaikan yang telah disebutkan, ketika tiga fakultas bertindak selaras dengan satu sama lain dan tunduk pada fakultas jiwa hingga fakultas-fakultas tadi tidak saling kontradiksi atau mengikuti keinginannya sendiri-sendiri atas dasar kecenderungan tabiat-tabiatnya. Buah kebajikan ini adalah sikap yang mendorong orang memilih untuk selalu aadil paa dirinya terlebih dahulu, dan kemudian adil pada orang lain dan menuntut keadilan dari mereka.

Empat keutamaan ini jika sudah dimiliki oleh seseorang dapat menjadikan dirinya sebagai individu yang baik dikarenakan empat keutamaan ini bisa mendorong terciptanya akhlak baik yang lainnya. Jika seseorang memiliki pribadi yang arif maka dia adalah orang yang pandai, pengingat, cepat memahami dan lain-lain. Jika seseorang telah menjadi pribadi yang sederhana maka orang tersebut akan cenderung pemalu, tenang, sabar dan sebagainya. Jika seseorang memiliki kepribadian yang berani maka orang tersebut akan cenderung tegar, dapat menguasai diri, ulet dalam bekerja dan sebagainya. Selain itu jika sudah menjadi pribadi yang adil maka akan cenderung bersahabat, selalu menjalin silaturahmi, baik dalam bekerja dan sebagainya(Ramli & Zamzami, 2022).

2. Akhlak Menurut Al-Ghazali

Imam Al-Ghozali merupakan tokoh yang sudah terkenal di seluruh penjuru, terutama di kalangan cendekiawan Islam. Beliau juga merupakan ahli tasawuf dan filsafat yang tersohor. Beliau dikenal sebagai hujjatul Islam yang artinya hiasannya Islam (Imam Anas Hadi, 2021). Nama lengkap Imam Al-Ghozali adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghozali dilahirkan di Thus, sebuah kota di Khurasan, Persia, pada tahun 450 H atau 1058 M.

Al-Ghazali merupakan salah satu pemikir Islam yang melahirkan konsep-konsep tentang akhlak. Ajaran-ajaran akhlak yang telah dikemukakan beliau sebagian besar berlandaskan pada kehidupan sufi. Hal ini nampak pada karyanya “Ihya Ulumuddin”. Al-Ghazali, di dalam “Ihya Ulumuddin”, menyebutkan bahwa keadaan manusia terdiri dari berbagai elemen, baik jasmani maupun rohani. Secara jasmani, manusia tersusun dari fisik atau tubuh yang dapat dilihat dan diraba. Sedangkan secara rohani, di dalam tubuh manusia terdapat unsur roh dan jiwa yang hanya dapat dirasakan dan dilihat dengan mata batin. Dari kedua unsur ini, Al-Ghazali menyatakan bahwa unsur rohaniah lebih besar nilainya dibanding dengan jasmani (Pendidikan & Hamid, 2012)

Menurut Imam Al-Ghazali, lafadz *khuluq* dan *khalqu* adalah dua sifat yang dapat dipakai bersama. Jika menggunakan kata *khalqu* maka yang dimaksud adalah bentuk lahir, sedangkan jika menggunakan kata *khuluq* maka yang dimaksud adalah bentuk batin. Karena manusia tersusun dari jasad yang dapat disadari adanya dengan kasat mata (*bashar*), dan dari ruh dan nafs yang dapat disadari adanya dengan penglihatan mata hati (*bashirah*), sehingga kekuatan nafs yang adanya disadari dengan *bashirah* lebih besar dari pada jasad yang adanya disadari dengan *bashar*. Sesuai dengan hal ini Imam Al-Ghazali Mengutip firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Shaad ayat 71-72 (Al-Ghazali, 1962). Demikianlah hubungan antara keduanya.

Adapun yang dimaksud akhlak adalah keadaan jiwa yang menetap dan dari padanya terbit semua perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran dan penelitian. Bila terbit dari jiwa perbuatan-perbuatan baik dan terpuji berarti ia akhlak yang baik. Sebaliknya bila yang terbit dari padanya perbuatan-perbuatan jelek, maka dinamakan dengan akhlak yang buruk (Al-Ghazali, 1983). Jika terdapat seseorang yang memberi bantuan

hanya karena keinginan yang muncul secara tiba-tiba saja, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan pemurah, karena sifat tersebut belum tetap pada jiwanya. Demikian pula, apabila seseorang memberi bantuan karena tekanan moral atau tidak memberi ketika dilanda rasa marah, maka orang itu juga belum dapat dikatakan mempunyai watak pemurah atau penyantun (Al-madjidi, 1997).

Akhlaq dapat dikatakan ibarat keadaan jiwa dan bentuknya bersifat batin. Hal ini seperti bentuk kebaikan *dhahiriah* secara mutlak. Seseorang tidak hanya dapat dikatakan sempurna hanya dengan indahnya dua mata saja, tidak hanya dengan hidung yang mancung, pipi yang halus tetapi haruslah indah semuanya. Seperti kebagusan *dhahiriah* itulah sempurnanya batin agar tercapai kebaikan akhlaq (Muhammad al-Ghazali, 2005). Akhlaq itu bukan perbuatan, melainkan gambaran atas jiwa yang tersembunyi. Dapat dikatakan bahwa akhlaq itu nafsiah (bersifat kejiwaan) dan yang tampak itu dinamakan perilaku atau tindakan.

Al-Ghazali mempunyai empat kriteria yang harus dipenuhi mengenai kriteria akhlaq yang baik dan buruk, yaitu: kekuatan ilmu, atau hikmah, kekuatan marah, yang terkontrol oleh akal akan menimbulkan sifat syaja'ah, kekuatan nafsu syahwat, dan kekuatan keseimbangan (keadilan) (Al-Ghazali, 2000). Kekuatan ilmu bernilai baik bila dengan mudah menanggapi perbedaan antara kebenaran dengan kebohongan, antara benar dan batil. Bila kekuatan ilmu ini baik, niscaya lahiriah dari padanya al-Hikmah, yaitu suatu kebijaksanaan akan membawa kepada perbuatan yang baik. Kekuatan marah dinilai baik manakala dia dalam keadaan terkendali dan terarah menurut batas yang dikehendaki oleh kebijaksanaan. Kekuatan syahwat bernilai baik bila dalam bimbingan dan isyarat kebijaksanaan, yakni menurut petunjuk akal dan agama. Kekuatan adil, yaitu mengendalikan kekuatan syahwat dan kemarahan dibawah penunjukan akal dan agama.

Sementara untuk pembagian akhlaq baik dan buruk, Al-Ghazali tak berbeda dengan banyak tokoh lainnya. Ia membagi akhlaq menjadi yang baik atau *mahmudah* dan *madzmumah* atau buruk. Dalam *Ihya' Ulumuddin* al-Ghazali membagi menjadi empat bagian yaitu ibadah, adab, akhlaq yang menghancurkan (muhlikat) dan akhlaq yang menyelamatkan (munjiyal). Akhlaq yang buruk adalah rakus makan, banyak bicara, dengki, kikir, ambisi dan cinta dunia, sombong, ujub dan takabbur serta riya'. Sedangkan

akhlak yang baik adalah taubat, khauf, zuhud, sabar, syukur, keikhlasan, dan kejujuran, tawakkal, cinta, ridha, ingat mati. Adapun ukuran untuk menilai apakah yang dilakukan perbuatan baik (akhlaq al-karimah) atau perbuatan yang buruk (akhlaq mazmumah) adalah landasan nilai yang menjadi pijakannya, yakni akal dan agama(Wiguna et al., 2020).

Selanjutnya Al-Ghazali mengklasifikasikan pendidikan akhlak yang terpenting dan harus diketahui meliputi (1) perbuatan baik dan buruk, (2) kesanggupan untuk melakukannya, (3) mengetahui kondisi akhlaknya, dan (4) sifat yang cenderung kepada satu dari dua hal yang berbeda, dan menyukai salah satu diantara keduanya, yakni kebaikan atau keburukan(Al-Ghazali, 1960).

Dari beberapa keterangan diatas dapat difahami bahwa pendidikan akhlak menurut al-Ghazali adalah suatu usaha untuk menghilangkan semua kebiasaan-kebiasaan jelek yang telah dijelaskan oleh syariat secara terperinci, hal-hal yang harus dijaui oleh manusia, sehingga akan terbiasa dengan akhlak-akhlak yang mulia.

3. Akhlak Menurut Al-Farabi

Nama aslinya Abu Nasr Muhammad Bin Muhammad Bin Lharkhan ibn Uzalagh al Farabi, lahir di kota Wesij tahun 259H/872, selisih satu tahun setelah wafatnya filosof muslim pertama yaitu al-Kindi. Ayahnya dari Iran menikah dengan wanita Turki kemudian ia menjadi perwira tentara Turki. Atas dasar itulah al-Farabi dinasabkan sebagai orang Turki. Karir pemikiran filsafatnya dalam menjembatani pemikiran Yunani dan Islam terutama dalam ilmu logika (manthiq) dan filsafat sangat gemilang, sehingga gelar sebagai guru kedua (al-mu'allim tsāni), layak disematkan. Dirwayatkan telah belajar logika di Baghdad dari para sarjana Kristen Yuhanna ibn Hailan (w. 910 M) dan Abu Bisyr Matta (w.940 M), perlu segera dicatat bahwa, Baghdad saat itu termasuk pewaris utama tradisi filsafat dan kedokteran di Alexandria. Pertemuan dan pengumpulan pemikiran di Baghdad menjadi konektor pemikiran al-Farabi yang meramu filsafat Islam dengan filsafat Yunani Neo-Platonis. Al-Farabi dalam perkembangannya juga tercatat sebagai guru Yahya ibn Adi (w. 974 M), seorang penerjemah Kristen Nestorian sebagai tokoh logika Ibn al-Sarraj. Karir pendidikannya cukup panjang hingga pada tahun 330/941 M. Al Farabi meninggalkan Baghdad menuju Aleppo kemudian ke Kairo dan

menghembuskan nafas terakhirnya di Damaskus, tepatnya pada bulan Rajab pada tahun 339 H atau Desember 950 M.18(Wiyono et al., 2016).

Al-Farabi disepakati sebagai peletak sesungguhnya dasar piramida studi filsafat dalam Islam yang sejak itu terus dibangun dengan tekun. Ia termasyhur karena telah memperkenalkan doktrin “Harmonisasi pendapat Plato dan Aristoteles” lewat risalahnya *al-Jam'u baina Ra'yay al-Hakimaini Aflathun wa Aristhu* ini sangat dipengaruhi oleh pandangan Plato (*Republic*) dan Aristoteles (*Nicomachean Ethics*) tentang kebaikan manusia (*human good*). Bahkan sejumlah kalangan menyebutnya sebagai *the Second Master* atau Maha Guru Kedua setelah Aristoteles(Nasr & Leaman, 1996).

Dari perspektif para filsuf Muslim, etika dalam Islam (*al-akhlaq*) disinggung dalam berbagai ruang dan perspektif. Al-Kindi misalnya, memperbincangkan etika Islam dalam konteks obsesi, dia ingin memformulasikan titik temu antara ide-ide filosofis di satu sisi dengan keyakinan-keyakinan dalam Islam baik dalam ranah metafisika, kosmologi, dan etika. Hal itu sebagaimana tercermin dalam *mode of philosophic tauhid* di mana Allah diposisikan sebagai *al-wâhid al-haqq al-awwal*(Syafi'i, 2017).

Sementara itu Al-Farabi, sebagai salah satu filsuf berpengaruh pada masa Keemasan Islam, memberikan kontribusi penting dalam kajian etika, khususnya terkait konsep akhlak atau moralitas. Pandangan filsafatnya menekankan pentingnya pembentukan karakter moral dan peran kebajikan dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang baik. Pemikiran Al-Farabi mengenai akhlak terjalin erat dengan sistem filsafatnya secara keseluruhan, dimana ia berupaya mengintegrasikan teori etika dari filsafat Yunani dengan ajaran Islam, sehingga menghasilkan sintesis pemikiran yang unik dan berpengaruh besar bagi perkembangan pemikiran Islam maupun Barat.

Salah satu aspek penting dalam filsafat etika Al-Farabi adalah pandangannya tentang urgensi kebajikan dalam kehidupan individu dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa kebajikan moral merupakan kunci untuk mencapai kebahagiaan dan kebaikan tertinggi. Hal ini terlihat jelas dalam konsep *al-Madinah al-Fadilah* (Kota Utama), yaitu masyarakat ideal yang warganya, di bawah bimbingan pemimpin bijaksana, menumbuhkan nilai-nilai luhur seperti keadilan, keberanian, dan kesederhanaan. Menurut Al-Farabi, pendidikan memiliki peran sentral

dalam menanamkan kebajikan tersebut, karena melalui pendidikan seseorang dapat mengembangkan kapasitas intelektual dan moralnya (Astuti, 2024).

Penelusuran Al-Farabi tentang akhlak sangat erat dengan landasan epistemologisnya. Ia berpendapat bahwa pemahaman mengenai kebajikan membutuhkan perpaduan antara rasionalitas dan intuisi moral. Dalam pandangannya, perkembangan moral individu harus ditempatkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, sebab perilaku etis tidak mungkin terwujud tanpa keterlibatan sosial (Moussa, 2025).

Sebagai seorang tokoh awal yang serius dalam bidang filsafat, konsep etika yang ditawarkan al-Farabi menjadi salah satu hal penting dalam karya-karyanya, yang berkaitan erat dengan pembicaraan tentang jiwa dan politik. Begitu juga erat kaitannya dengan persoalan etika ini adalah persoalan kebahagiaan. Bahkan, Al-Farabi tampaknya sangat perhatian terhadap persoalan kebahagiaan ini baik secara teoritis maupun praktis. Karenanya ia mengkhususkan dua dari sekian bukunya untuk membahas tentang kebahagiaan. Buku itu yaitu *Tahshîl al-Sa'âdah* (Meraih kebahagiaan) dan *al-Tanbîh al Sa'âdah* (Membangun Kebahagiaan), kedua buku ini sama-sama diterbitkan di Haidarabad pada tahun 1345 H, 1346 H (Madkour, 1996).

C. Pendidikan Akhlak dalam Perspektif Kontemporer

Pendidikan akhlak kontemporer tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan kognitif atau perilaku semata, sebab problem utama yang dihadapi generasi saat ini tidak sekadar pada lemahnya pengetahuan tentang nilai, tetapi lebih dalam yaitu krisis spiritual. Dalam konteks ini, landasan spiritual menjadi elemen fundamental yang menopang keberhasilan pendidikan akhlak yang holistik.

Landasan spiritual berarti menjadikan aspek ketuhanan (teosentris) sebagai pusat dari kesadaran moral. Dalam tradisi Islam, akhlak tidak berdiri sendiri sebagai norma sosial atau etika sekuler, melainkan merupakan pantulan dari hubungan manusia dengan Allah Swt, nilai-nilai seperti sabar, syukur, tawakkal, *khauf*, dan *raja'*. Hal ini sejalan dengan maqashid pendidikan Islam yang menempatkan *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa) sebagai tujuan utama.

Dalam konteks pendidikan kontemporer, banyak tantangan akhlak yang bersumber dari kekosongan batin: hedonisme, individualisme ekstrem, krisis makna hidup, dan instabilitas emosional. Oleh sebab itu, pendidikan akhlak yang kuat harus berbasis pada pembinaan ruhani, bukan hanya pembentukan karakter luar. Landasan spiritual memberi kerangka bagi peserta didik untuk menyadari bahwa akhlak bukan hanya soal baik dan buruk dalam pandangan manusia, melainkan berkaitan langsung dengan nilai-nilai ilahiah yang bersumber dari wahyu dan pengalaman keagamaan yang mendalam.

Salah satu contoh penerapan landasan spiritual dalam dunia pendidikan yang sudah diterapkan adalah melalui integrasi nilai-nilai keislaman dalam kurikulum pembelajaran di madrasah dan sekolah berbasis Islam. Misalnya, pembiasaan zikir pagi, shalat dhuha bersama, kultum harian, hingga pembelajaran tafsir dan tasawuf dasar yang menginternalisasikan makna sabar, syukur, tawakal, dan pengendalian diri.

Maka, dalam pendidikan akhlak kontemporer, landasan spiritual menjadi pondasi yang tidak boleh ditinggalkan. Ia tidak hanya memberikan motivasi internal, tetapi juga menyadarkan peserta didik tentang tujuan hidup yang lebih tinggi, yang tidak bisa digantikan oleh sekadar teori etika rasional atau aturan sosial.

Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter manusia yang tangguh secara mental dan bermartabat secara moral. Dalam konteks pendidikan akhlak kontemporer, nilai-nilai seperti sabar, syukur, tawakal, *khauf* (takut kepada Allah), dan *raja'* (harapan kepada rahmat Allah) tidak hanya menjadi ajaran spiritual, tetapi juga instrumen pembentuk daya tahan pribadi dalam menghadapi tantangan zaman. Individu yang memiliki sifat sabar akan lebih siap dalam mengelola tekanan hidup dan tidak mudah menyerah; seseorang yang memiliki rasa syukur akan cenderung positif dan tidak terjebak dalam budaya mengeluh; sedangkan orang yang bertawakal akan memiliki kepercayaan diri yang stabil karena bersandar pada kekuatan Ilahi.

Pendidikan yang mengintegrasikan akhlak mahmudah akan menghasilkan peserta didik yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga kuat secara psikologis, lembut secara sosial, dan bermartabat secara etis. Dalam dunia modern yang penuh kompetisi dan individualisme, keberadaan karakter semacam ini menjadi kebutuhan

mendesak untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana dan manusiawi.

Sebagai contoh konkret, penerapan nilai-nilai akhlak mahmudah dalam dunia pendidikan dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Nilai sabar, misalnya, dapat ditanamkan melalui pembiasaan menghadapi proses belajar dengan tekun dan sabar, serta dalam menyikapi kegagalan akademik sebagai peluang untuk melakukan perbaikan. Nilai syukur diinternalisasikan melalui kegiatan reflektif atau muhasabah harian, di mana peserta didik diajak untuk menyadari nikmat ilmu, lingkungan, dan kesempatan belajar yang dimiliki. Selain itu, nilai tawakal, khauf, dan raja' dikembangkan melalui pendekatan spiritual dalam pembelajaran agama serta kegiatan keagamaan seperti salat berjamaah, kultum, dan pendampingan rohani.

Penanaman nilai-nilai akhlak mahmudah seperti tawakal, keadilan, ketenangan, dan keikhlasan telah dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai program pembelajaran dan aktivitas sekolah yang terstruktur. Hasilnya, peserta didik tidak hanya mampu mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga terbentuk karakter yang tangguh secara mental dan bermartabat secara moral, yang sangat relevan dalam menghadapi dinamika kehidupan modern. (Kholiq & Sulaim, 2024)

Pendidikan akhlak yang mengintegrasikan peringatan terhadap akhlak mazmumah akan membentuk peserta didik yang memiliki kesadaran diri dan kepekaan moral. Individu yang memahami bahaya riya' akan belajar untuk ikhlas; yang menyadari racun takabur akan tumbuh dalam kerendahan hati; dan yang memahami kehancuran akibat hasad akan menumbuhkan empati dan ketulusan. Dalam dunia yang semakin kompetitif dan narsistik, pendidikan semacam ini menjadi kebutuhan mendesak agar generasi muda tidak hanya cerdas, tetapi juga bijaksana dalam mengelola emosi, ambisi, dan relasi sosial.

Dalam praktik pendidikan, peringatan terhadap akhlak mazmumah dapat disisipkan dalam pembelajaran agama, bimbingan konseling, dan kegiatan reflektif. Misalnya, guru dapat mengajak siswa berdiskusi tentang bahaya pamer di media sosial, atau bagaimana perasaan iri dapat merusak pertemanan. Latihan muhasabah (introspeksi diri), cerita hikmah, dan pembiasaan adab dalam keseharian adalah sarana konkret untuk

membentuk sensitivitas moral terhadap akhlak buruk. Program mentoring rohani atau halaqah keislaman juga dapat menjadi ruang pembinaan akhlak yang lebih personal dan intensif.

BAB 3

KEPEMIMPINAN ISLAMI DALAM PERSPEKTIF FILOSOFIS

A. Konsep Kepemimpinan dalam Islam

Konsep kepemimpinan dalam Islam merupakan kajian penting, terutama dalam konteks pendidikan dan pengelolaan organisasi berbasis nilai-nilai Islam. Kepemimpinan dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga mesti selaras dengan prinsip moral dan etika yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Melalui referensi yang ada, kita dapat memahami lebih dalam karakteristik, model, dan nilai-nilai yang diusung dalam kepemimpinan Islami.

Salah satu aspek fundamental dari kepemimpinan dalam Islam adalah penekanan pada nilai-nilai profetik yang dijalankan oleh Nabi Muhammad Saw. Menurut Manzil dan Muttaqin, kepemimpinan Islami diharapkan mampu membangun masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai spiritual dan moral yang mengedepankan keadilan, kejujuran, dan amanah (Manzil & Muttaqin, 2024). Ini diperkuat oleh Faishol yang menekankan bahwa kepemimpinan profetik tidak hanya berorientasi pada pencapaian tujuan duniawi tetapi juga menuntut pemimpin untuk memperjuangkan nilai-nilai transendental (Purwanto & Kholid, 2022).

Kata kepemimpinan, berupa penambahan awalan “ke” dan akhiran “an” pada kata pemimpin. Kepemimpinan menunjukkan pada semua perihal dalam memimpin, termasuk juga kegiatannya. Kepemimpinan dalam Islam adalah paya-upaya untuk memperbaiki dan membawa kualitas muslim

kepada akhlak-akhlak Islami dengan dilandasi oleh keimanan, ketaqwaan dan menjalankan syariat-syariat Islam dalam aktivitas hidup di dunia baik urusan dunia maupun akhirat/ agama dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat (N. Akbar, 2018).

Kepemimpinan dalam bahasa Arab disebut “*Al-Imamah*” (Atabik & Muhdhlor, 2003). Dalam ilmu Fiqih, *Imamah* diartikan dengan kepemimpinan dalam hal menjadi ketua atau lainnya, baik dia memberi petunjuk ataupun menyesatkan (As-Salus, 1997). Secara terminologi, beberapa tokoh mendefinisikan *imamah* dikutip dari Abdullah Ad Dumaiji (2016) antara lain menurut Imam Haramain Al-Juwaini mendefinisikan *Imamah* adalah kepemimpinan sempurna yang berhubungan dengan hal-hal khusus dan umum, dalam berbagai persoalan dunia dan agama. Al Mawardi mendefinisikan *imamah* itu ditetapkan untuk menggantikan tugas-tugas kenabian dalam menjaga agama dan menata dunia dengan nilai-nilai agama. Muhammad Najib berpendapat bahwa *imamah* adalah kepemimpinan yang konprehensif menyangkut segala urusan dunia dan agama. Ibnu Khaldun mendefinisikan *imamah* adalah mengatur, membawa seluruh umat berdasarkan pandangan syariat untuk mewujudkan maslahat-maslahat mereka, baik maslahat dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi dan semuanya pasti kemabli ke *ukhrawi* (Ad-Dumaiji, 2016).

Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan seseorang sehingga ia memperoleh rasa hormat (respect), pengakuan (recognition), kepercayaan (trust), ketaatan (obedience), dan kesetiaan (loyalty) untuk memimpin kelompoknya dalam kehidupan bersama menuju citacita(Nidawati, 2005).

Kepemimpinan dalam sejarah peradaban Islam dikenal dengan berbagai istilah yang mencerminkan tanggung jawab seorang pemimpin, seperti *Khalifah*, *Imam*, *Amir*, *Uli al-Amri*, dan *Ra'in*. Masing-masing istilah ini memiliki makna dan peran yang spesifik dalam mengatur kehidupan umat. Sebagaimana dijelaskan Suhartawan (2021) berikut ini:

Khalifah, secara terminologi artinya pengganti kepemimpinan Rasulullah Saw. Kepemimpinan dalam konteks khalifah mencakup persiapan kepemimpinan berikutnya sesuai dengan aturan syari'ah demi tercapainya kemaslahatan dunia dan akhirat.

Imam, kata "*Imamah*" dalam bahasa Arab berasal dari kata "*imam*," yang berakar dari "*amma*" yang berarti "menjadi ikutan." Imam berarti

"pemimpin atau contoh yang harus diikuti, atau yang mendahului." Pemimpin harus selalu di depan sebagai teladan (*leading by example*). Kedudukan imam sejajar dengan penanggung jawab urusan umat.

Amir, artinya adalah pemerintah. Kita harus mentaati seorang pemimpin tanpa memandang warna kulit, bentuk rupa, kekayaan atau kemiskinan, selama pemimpin tersebut berada dalam bimbingan Allah Swt. Ketaatan kepada pemimpin merupakan pilar penting dalam pemerintahan Islam. Umar bin Khattab mengatakan, "Islam tidak berarti tanpa jamaah, jamaah tidak berarti tanpa pemimpin, dan pemimpin tidak berarti tanpa kepatuhan." Seorang pemimpin harus memiliki keistimewaan, kecerdasan, akhlak mulia, dan mental yang kuat. Namun, semua itu tidak berarti tanpa loyalitas dari rakyatnya.

Uli al-Amri, berarti seseorang yang memegang kekuasaan dan memiliki hak untuk memberi perintah. Orang dengan kekuasaan ini mampu mengatur dan mengendalikan situasi. Dalam al-Qur'an Surat An-Nisa': 83, kepemimpinan dikaitkan erat dengan kepemimpinan Tuhan dan Rasul-Nya. Setelah Nabi wafat, *ulil amri* menjadi rujukan dalam menghadapi masalah dan harus selalu ditaati.

Ra'in, Makna "*ra'in*" (pemimpin) dalam sebuah hadis diibaratkan sebagai penjaga yang diberi amanah untuk mengurus bawahannya. Rasulullah SAW memerintahkan agar pemimpin menasihati setiap orang yang dipimpinnya dan mengingatkan untuk tidak berkhianat. Imam Suyuti mengatakan bahwa "*ra'in*" merujuk kepada siapa saja yang menjalankan kepemimpinannya (Suhartawan, 2021).

Uraian di atas dapat ditegaskan bahwa kepemimpinan dalam Islam adalah suatu proses atau kemampuan orang lain untuk mengarahkan dan memotivasi tingkah laku orang lain, serta ada usaha kerjasama sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadist untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama.

Tujuan utama kepemimpinan dalam Islam yaitu untuk melindungi agama dan mengatur kehidupan dunia. Hal ini dilakukan dengan mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Pemimpin diharapkan bukan hanya menyampaikan ajaran syariat, tetapi juga dapat mengelola kepentingan umat masyarakat dengan sebaik-baiknya.

Seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya harus dilandasi dengan sifat-sifat atau kriteria diantaranya, bertaqwa kepada Allah, amanah, shiddiq, fathonah, tabligh, tegas dan teguh pendirian, lemah lembut, pemaaf, senang bermusyawarah, adil, bertanggung jawab, dan sabar.

Kepemimpinan Islami merupakan proses mempengaruhi untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat dengan cara menekankan pada pelayanan yang baik pada para pengikutnya, bersikap lemah lembut, tidak menyalahkan tetapi mengarahkan dan membimbing, agar mereka tidak lari menjauh. Bahkan harus selalu menjaga emosi dengan selalu memaafkan atas kesalahan yang telah diperbuat dan memintakan ampunan kepada Allah atas dosanya. Hal ini termaktub dalam ayat al-quran berikut:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya (QS. Al-Imron,2:159).

Ayat tersebut menunjukkan sikap kelembutan Nabi dalam menghadapi persoalan, termasuk dalam perang Uhud yang mengundang kemarahan ummat Islam pada saat itu, namun beliau tidak mempersalahkan mereka tetapi menegurnya dengan lemah lembut. Andai Nabi bersikap kasar dan keras, serta tidak peka terhadap keadaan sahabat yang ikut berperang maka mereka akan menjauhinya. Kalimat “disebabkan rahmat dari Allah” menunjukkan bahwa Allah mendidik dan membentuk kepribadian Nabi Muhammad Saw sebagai pemimpin besar ummat Islam,

sehingga bukan saja pengetahuan Nabi yang diberikan oleh Allah melalui al-Quran tetapi juga hati dan kepribadiannya (M Quraish Shihab, 2000).

Dari ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa kepemimpinan Islami adalah kepemimpinan pelayanan kepada para pengikut atau bawah an, yaitu dengan cara bersikap lemah lembut, ramah, tidak keras, selalu memaafkan, memintakkan ampunan atas dosa-dosa mereka, bermusyawarah atau melibatkan mereka dalam menyusun program, mengimplemengasikan, dan mengevaluasi bersama. Selain itu juga seorang pemimpin harus bersikap adil, karena kepemimpinan itu adalah sebuah amanat yang harus berorientasi pada ajaran Allah.

Kepemimpinan adalah sebuah keharusan dalam kehidupan umat manusia, agar kehidupan diri sendiri, organisasi atau perusahaan, bahkan negara, akan lebih terarah. Hal ini termaktub dalam hadits Nabi Muhammad Saw bahwa setiap kita atau individu dan imam pun akan diminta pertanggungjawabannya, sebagaimana dalam hadits Nabi berikut:

Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَإِلِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ
وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ
رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا
وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ
مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

Artinya: "Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin tertinggi) yang memimpin manusia adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi anggota keluarga dan rumah tangganya dan dia

akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang wanita adalah pemimpin bagi rumah tangga suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas hartanya. Maka, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.

B. Filsafat Kepemimpinan Menurut Al-Farabi dan Al-Ghazali

1. Filsafat Kepemimpinan Menurut Al-Farabi

Al-Farabi merupakan salah satu tokoh yang hidup pada masa klasik. Al-Farabi dikenal sebagai *al-Mu'allim al-Tsani* pemikirannya banyak membahas mengenai negara, politik, masyarakat, dan kepemimpinan. Pemimpin ideal menurut Al-Farabi tidak hanya seorang filsuf, melainkan juga harus memiliki kearifan yang baik secara pikiran atau rasio dan wahyu. Namun, kebahagiaan dalam sebuah negara tidak hanya bisa dicapai dengan adanya pemimpin yang memiliki kriteria mendekati Nabi atau filsuf, tetapi juga dari ide-ide masyarakat pada negara tersebut.

Pada kodratnya, manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu, sebagai makhluk sosial manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dan membutuhkan sebuah organisasi kelompok." Dengan demikian kebutuhan manusia terhadap sesamanya, mengharuskan bertanggungjawab dalam membangun sebuah kehidupan sosial yang damai dan tentram mulai dari berbagai aspek seperti ekonomi, hubungan sosial dan politik. Proses ketergantungan manusia yang dinamis ada dalam suatu negara. Sifat manusia yang secara alamiah dan natural akan selalu memerlukan bantuan orang lain disekelilingnya dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga dalam sistem kenegaraan harus ada seorang pemimpin yang mampu membangun kerjasama diantara dirinya dan rakyatnya. Mengatur dan mengayomi masyarakat guna mewujudkan negara yang aman, damai, tentram, dan bahagia.

Menurut Al-Farabi, masyarakat cukup berperan penting bagi negara itu sendiri, sehingga hanya masyarakat berkualitas yang memiliki gagasan cemerlang yang dapat melahirkan sebuah kebahagiaan dan kesejahteraan

dalam suatu negara. Oleh sebab itu, baik negara dan masyarakat memerlukan seorang pemimpin yang ideal yang dapat membawa masyarakat kepada kesejahteraan. Kriteria seorang pemimpin ideal menurut Al-Farabi adalah seorang filsuf yang memiliki sifat seperti Nabi. Jika dalam teori politik Plato lebih menekankan seorang pemimpin lebih kepada jasmaninya, untuk melengkapi teori tersebut Al-Farabi merasa perlu menekankan juga kepada spiritualnya (Muttaqin et al., 2022). Sehingga pemimpin yang ideal merupakan pemimpin yang dapat menyeimbangkan antar keduanya yaitu kekuatan jasmani dan spiritual.

Al-Farabi mensyaratkan seorang pemimpin adalah seorang filosof. bukan tanpa alasan, menurutnya seorang filosof dapat mengetahui sifat kebahagiaan sejati (*true nature of happiness*) (Habibah, 2019). Selain itu seorang filosof juga dapat hadir di setiap zaman. Menurut jika tidak ada Nabi yang dapat memimpin negara, maka seseorang yang memiliki sifat mendekati Nabi yang berhak memimpin negara yaitu seorang filsuf (Jamil, 2016). Al-Farabi berfikir untuk dapat menciptakan masyarakat yang ideal harus dimulai dengan seorang pemimpin yang ideal. Sejatinya tujuan dari sebuah negara yang ideal tidak lain adalah untuk mencapai sebuah kebahagiaan (*happiness*), tidak hanya secara materiil tetapi spiritual juga dan tidak saja di dunia ini tetapi juga di akhirat nanti (Iqbal & Nasution, 2010). Untuk dapat mencapai kebahagiaan tersebut harus bernegara dan menciptakan simbolisme utuh antara masyarakat dan pemimpin negara, yang hanya dapat diperoleh dalam negara ideal yang sempurna. Kepemimpinan Al-Farabi juga mencontoh dari kepemimpinan Rasulullah Saw untuk umat Islam. Di mana tugas seorang pemimpin adalah memberikan arahan baik yang sesuai dengan tuntunan agama agar tidak melenceng dari tujuan utama dibentuknya suatu negara, yaitu tercapainya sebuah kebahagiaan dunia dan akhirat.

Al-Farabi berpendapat bahwa tidak ada satupun warga yang mampu dan dapat menjadi seorang pemimpin Negara yang sempurna. Baginya yang boleh dan yang mampu menjadi seorang pemimpin negara hanyalah manusia yang paling sempurna, meski kriteria ini akan sangat sulit dan bahkan mustahil. Al-Farabi berusaha merumuskan pilihan kriteria pemimpin jika tidak ada manusia yang sempurna. Menurut pemimpin sebuah negara tidak boleh dijabat oleh sembarang orang, hanya orang yang memiliki dua hal yang berhak menjabat sebagai pemimpin negara yaitu

fitrah dan tabiat, talenta dan kehendak Negara ideal menurut Al-Farabi merupakan negara yang mampu menciptakan hubungan kerja sama antara pemimpin dan masyarakatnya. Baginya, perumpamaan pemimpin adalah seperti sebuah hati dan masyarakat adalah anggota tubuh lainnya pada organ tubuh manusia. Hati tersebut harus mampu mengkoordinir, mendengarkan keluh kesah semua anggota tubuh lainnya, bermusyawarah dalam mengambil keputusan, sehingga mampu mengambil keputusan yang dapat mencapai tujuan dan kemaslahatan bersama. Pemimpin negara juga harus ada terlebih dahulu, sebelum adanya rakyat dan terbentuknya masyarakat(Sukardi, 2017).

Menurut Al-Farabi orang yang berhak menjadi seorang pemimpin, harus memiliki dua belas kriteria ideal. Hal itu ia tuangkan dalam karyanya yang berjudul "*Al-Madinah Al-Fadhilah*", ia menyebutkan: Menurutny perumpamaan seorang laki-laki sebagai pemimpin kota atau sebagai pemimpin memiliki sifat dua belas yang ia klasifikasikan ke dalam tiga bagian yaitu berkaitan dengan tubuh, fikiran atau akal dan akhlak.

- a. Memiliki tubuh yang baik dan anggota tubuh yang lengkap (agar semua bagian tubuh dapat melakukan kegiatannya dengan maksimal)
- b. Memiliki akal yang baik
- c. Memiliki kemampuan faham yang baik
- d. Memiliki hafalan atau daya ingat yang baik dan cerdas
- e. Memiliki ungkapan-ungkapan yang baik sehingga dapat mengekspresikannya dengan baik
- f. Menyukai belajar
- g. Memiliki akhlak yang baik (agar tidak melakukan hal yang buruk)
- h. Senang berkata jujur dan mencintai kejujuran
- i. Memiliki wibawa dan berjiwa besar
- j. Tidak terlena dengan dunia sehingga tidak berpegang teguh pada kehormatan dunia
- k. Senang berbuat adil
- l. Memiliki tekad yang kuat sehingga berani melakukan hal apapun demi negara

Pertama, sebagai seorang pemimpin atau kepala harus memiliki tubuh yang baik dan anggota tubuh yang lengkap. Lengkap yang dimaksud Al-Farabi adalah sempurna secara fisik, tidak kurang sesuatu apapun (tidak cacat). Hal ini tentu berdampak pada proses memimpin yang akan lebih

leluasa dan stabil dengan anggota tubuh sempurna. Hal sebaliknya dengan adanya cacat fisik pada tubuh seorang pemimpin akan menghambat kinerja suatu pemimpin. Pemimpin yang memiliki fisik cacat tidak akan luput dari omongan masyarakat atau petugas bawahannya. Al-Farabi memperkirakan hal butuk tersebut, sehingga ia menyatakan kelengkapan anggota tubuh secara fisik adalah hal mutlak yang harus dipenuhi.

Kedua, sebagai seorang pemimpin harus memiliki akal yang baik. Dengan memiliki akal yang baik, seorang pemimpin akan mempunyai kemampuan faham yang baik. Ia juga akan mempunyai hafalan atau daya ingat yang baik dan cerdas sehingga dapat menyelesaikan segala permasalahan dengan baik. Sebagai seorang pemimpin juga harus menyukai belajar, agar keilmuannya bertambah dan dapat menambah wawasan serta memiliki sudut pandang dan pola pikir yang majemuk. Dengan memiliki kecerdasan dan akal yang baik, seorang pemimpin akan dapat memahami permasalahan yang terjadi di negaranya. sehingga ia akan dapat dengan mudah mengambil keputusan yang bijak untuk permasalahan tersebut dan dapat merencanakan kebijakan yang lebih efektif.

Ketiga, senang berbuat adil. Menurut Al-Farabi sebagai seorang pemimpin sejati harus senang berbuat adil dan mampu menegakkan sebuah keadilan dalam pemerintahannya. Baginya, sebuah keadilan ini menjadi prinsip utama yang harus dilakukan dan ditegakkan oleh seorang pemimpin, dan menjadi sebuah pondasi untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Keadilan juga merupakan sumber untuk menciptakan sebuah keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. sehingga dapat mencegah adanya konflik dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Sikap adil dilakukan tidak memandang status sosial, suku, ras dan agama, melainkan semua warga negara harus mendapatkan keadilan yang rata. Maka dari itu, seorang pemimpin harus senang berbuat adil dan memiliki moralitas dan integritas yang baik dalam memutuskan sebuah tindakan.

Keempat, sebagai seorang pemimpin harus memiliki tekad yang kuat. Menurut Al-Farabi seorang pemimpin harus kuat dan memiliki tekad yang tegas untuk kepentingan negara. Ia merincikan komponen-komponen tekad menjadi beberapa unsur yaitu tekad untuk mencapai kebijaksanaan (hikmah), tekad untuk menegakkan keadilan (adalah). tekad untuk membentuk masyarakat yang baik (masyarakat ideal). tekad untuk mencapai keamanan dan ketertiban, tekad untuk mencapai kesejahteraan

rakyat, tekad untuk pendidikan dan pembangunan intelektual, dan tekad untuk menciptakan harmoni sosial. Perincian tekad tersebut tentunya terdapat tujuan yang diinginkan oleh Al-Farabi.

Seperti tekad mencapai kebijaksanaan (hikmah). Al-Farabi berharap bahwa seorang pemimpin harus mencapai kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan agar sebuah negara dapat berkembang dengan baik. Tekad menegakkan keadilan (adalah). Al-Farabi berharap seorang pemimpin mempunyai komitmen untuk berlaku adil di dalam negara yang ia pimpin, adil tersebut berlaku untuk semua warga negara di sana tanpa memandang status sosialnya. Tekad membentuk masyarakat yang baik (masyarakat ideal), dalam hal ini seorang pemimpin harus berusaha membentuk masyarakat yang memiliki nilai moral yang baik dan juga harus bisa meningkatkan kehidupan spiritual. Tekad menjaga keamanan dan ketertiban, seorang pemimpin harus bisa menjaga keamanan dalam negara agar msyarakat dapat berkembang dengan baik dan tidak merasa terancam dalam hal apapun.

Kemudian tekad mencapai kesejahteraan rakyat, dalam hal ini seorang pemimpin harus memiliki tekad kuat dan fokus untuk mencapai kesejahteraan rakyatnya, misalnya dengan cara lebih memperhatikan lagi kebutuhan dasar dan kualitas hidup rakyatnya. Tekad pendidikan dan pembangunan intelektual, seorang pemimpin harus dapat memajukan pendidikan dan pembangunan intelektual masyarakat agar dapat maju, berkembang dan mencapai kebijaksanaan. Tekad menciptakan harmoni sosial, dalam hal ini seorang pemimpin haruys bisa menciptakan keharmonian dalam masyarakat agar dapat mengatasi konflik yang ada dan dapat membangun kesatuan rakyatnya. Al-Farabi berpendapat bahwa seorang pemimpin yang memiliki tekad kuat dan berani harus mampu mengatasi segala hal yang terjadi dalam negara untuk mencapai tujuan moral dan politik yang baik, serta menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.

2. Filsafat Kepemimpinan Menurut Al-Ghazali

Imam Al-Ghozali, seorang ulama' besar dan filsuf muslim yang hidup pada abad ke-11, secara holistik Al-Ghozali memiliki pandangan mengenai kepemimpinan dan motivasi. Dalam karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin dan Nasihat al-Muluk, Al-Ghazali menekankan bahwa seorang

pemimpin harus menjadi teladan moral (*uswatun hasanah*) dan menjalankan amanah dengan penuh keadilan, kebijaksanaan, dan tanggung jawab. Kepemimpinan, menurut Al-Ghazali, tidak hanya bertujuan untuk mencapai keberhasilan duniawi, tetapi juga untuk membentuk karakter spiritual yang kuat pada individu dan masyarakat.

Imam Al-Ghazali memiliki pandangan unik mengenai kepemimpinan yang berbeda dari banyak filsuf pada umumnya. Menurutny, tugas utama seorang pemimpin adalah membimbing menuju keutamaan (*fadhilah*) dan mendekatkan diri kepada Allah Swt, yang merupakan tujuan tertinggi. Akhlak yang baik menjadi sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin, karena hal tersebut mencerminkan sifat Rasulullah Saw. Akhlak yang mulia juga merupakan hasil dari ketekunan dalam mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, kriteria kepemimpinan menurut Al-Ghazali berpusat pada ketaqwaan kepada Allah.

Dalam pandangan Imam Al-Ghazali, pemimpin ideal harus memiliki tiga elemen penting, yaitu akhlak, agama, dan ilmu. Akhlak adalah aspek yang sangat penting dan utama dalam Islam. Akhlak merupakan intisari dari ajaran agama. Al-Quran mendorong manusia untuk berbuat kebaikan dan menjauhi perbuatan mungkar. Instruksi untuk bertindak adil, berbuat baik, dan mengharamkan kejahatan dalam segala bentuk dan kepada siapapun. Bagi al-Ghazali, kekuatan moral adalah kemampuan untuk mengelola dan mengendalikan diri dari kecenderungan-kecenderungan yang bersifat destruktif. Jiwa manusia memiliki keunikan tersendiri, selalu terbuka terhadap perubahan dan perbaikan menuju keberhasilan dan kesempurnaan budi pekerti. Disebut sebagai kekuatan moral apabila memiliki empat unsur sebagai berikut. Pertama, memiliki kekuatan yang kuat dalam kebenaran dan kebaikan. Kriteria kedua adalah kemampuan dalam mengenali kebaikan dan keburukan. Ketiga, dapat melakukan hal yang baik dan meninggalkan yang buruk. Keempat, memiliki kemampuan untuk memengaruhi orang lain agar berbuat baik dan mencegah mereka dari perilaku buruk. Akhlak dan etika merupakan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari yang melekat pada diri seseorang.

Agama adalah inti terpenting kehidupan manusia. Sebagai sistem kepercayaan, agama telah ada sejak manusia pertama diciptakan. Agama

dapat memengaruhi dan menginspirasi bidang politik serta memperkaya peradaban. Dalam situasi yang berbeda, agama dapat menjadi pemicu konflik antara manusia, bahkan memecah belah peradaban manusia. Agama bisa dijelaskan sebagai wujud sosio-individu yang terwujud dalam ajaran, tingkah laku, ritus keagamaan, yang berasal dari hubungan dengan yang lebih tinggi daripada manusia dan dunianya. Hal ini juga dipengaruhi oleh tradisi manusia dan kehidupan masyarakatnya. Realisasi sosio-individu yang hidup menciptakan sistem yang mengatur makna atau nilai-nilai dalam kehidupan manusia sebagai kerangka acuan bagi seluruh realitas. Agama memiliki beberapa fungsi baik yang berkaitan secara langsung dan bersentuhan langsung dengan kehidupan sosial masyarakat, yang memberikan solusi dari persoalan, tata aturan dan hukum, sumber persatuan, kebaikan, dan perekat hubungan antar individu.

Akal itu digambarkan sebagai cahaya yang menyusup ke dalam sanubari manusia, dan membimbingnya memahami segala sesuatu. Orang yang menolak makna ini, dan membatasi pengertian akal hanya sebatas alat untuk memahami ilmu-ilmu yang wajib, maka dia telah melakukan kekeliruan. Akal adalah kemampuan yang membedakan manusia dari binatang. Kemampuan berpikir yang baik akan membimbing manusia menuju pemahaman ilmu teoritis yang abstrak. Kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual berpengaruh positif terhadap kinerja secara bersama-sama.

Pemikiran Al-Ghazali mengenai kepemimpinan terbentuk berdasarkan pengamatannya terhadap kondisi kepemimpinan pada masa Dinasti Saljuk (Al-Lathif, 2020) Pada masa itu, terjadi kemunduran karena ketidakstabilan keamanan dan perebutan kekuasaan. Keprihatinannya terhadap situasi tersebut memotivasinya untuk merumuskan konsep kepemimpinan yang ideal, yang berpijak pada nilai-nilai moralitas dan spiritualitas. Ia menekankan pentingnya meneladani kepemimpinan Rasulullah Saw dan para sahabatnya, yang memadukan kecerdasan akal dengan kesucian hati.

Bagi Imam Al-Ghazali, kepemimpinan adalah amanah besar yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Seorang pemimpin, menurutnya, adalah pelayan masyarakat (*khadim al-umma*), bukan penguasa yang semena-mena. Nilai-nilai seperti keadilan, kebijaksanaan, dan keteladanan moral menjadi fondasi utama dalam kepemimpinan.

Pemimpin yang adil tidak hanya mampu meraih kepercayaan rakyat, tetapi juga menciptakan tatanan sosial yang stabil dan harmonis(Zenaida et al., 2023).

Selain itu, Al-Ghazali menekankan pentingnya kebijaksanaan dalam menghadapi permasalahan, baik dalam organisasi maupun masyarakat. Kebijakan ini tercermin dari kemampuan pemimpin memahami kebutuhan rakyatnya dan mengambil keputusan yang berorientasi pada kemaslahatan bersama. Prinsip *uswatun hasanah* atau keteladanan moral juga menjadi landasan utama dalam pemikiran kepemimpinan AlGhazali(Hasanah, 2021). Seorang pemimpin harus menjadi contoh yang baik, baik dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi, sebagaimana yang dijelaskan dalam karya besarnya, *Ihya Ulumuddin*.

C. Kepemimpinan Islami di Era Modern

Era modern ditandai dengan kemajuan teknologi, keterbukaan informasi, serta dinamika sosial politik yang cepat berubah. Tantangan global seperti korupsi, ketidakadilan, kesenjangan sosial, dan krisis moral menuntut hadirnya kepemimpinan yang kuat sekaligus berintegritas. Dalam konteks ini, konsep kepemimpinan Islam memiliki relevansi yang tinggi.

Kepemimpinan Islam di era modern ini bisa berkaca pada kepemimpinan para sahabat nabi seperti Abu Bakar, Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka menganut prinsip kepemimpinan yang sangat penting dan relevan di zaman modern saat ini.

Abu Bakar Ash-Shiddiq diangkat menjadi pemimpin umat Islam pada masa penuh tantangan setelah wafatnya Nabi Muhammad Saw. Periode awal kekhalifahannya ditandai oleh krisis legitimasi dan disintegrasi sosial di kalangan kaum Muslim, ketika beberapa suku Arab menolak kewajiban zakat atau bahkan berpaling dari Islam. Dalam menghadapi situasi ini, Abu Bakar menunjukkan komitmen kuat terhadap persatuan umat dan integritas ajaran Islam; ia memutuskan untuk menegakkan kembali kewajiban zakat dan menindak kelompok-kelompok yang berpaling, demi menjaga stabilitas dan kesinambungan komunitas muslim. Keputusan ini menggambarkan keberanian moral dan tekad kepemimpinan bahwa seorang pemimpin tidak dapat berkompromi ketika

nilai inti umat terancam. Sejarah mencatat bahwa serangkaian konflik dikenal sebagai Perang Ridda (Wars of Apostasy) dilakukan untuk menghadapi pemberontakan dan kemurtadan tersebut (Elias Shoufani, 1973).

Pada aspek preservasi naskah suci, Abu Bakar memiliki peran krusial bagi keberlangsungan warisan intelektual umat: setelah pertempuran Perang Yamamah, di mana banyak penghafal Al-Qur'an gugur, sehingga timbullah kekhawatiran bahwa sebagian besar wahyu bisa hilang. Atas usulan sahabatnya, Umar bin Khattab, Abu Bakar akhirnya memerintahkan pengumpulan semua fragmen tertulis dan hafalan Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Ia kemudian menunjuk Zayd ibn Thabit, penulis wahyu semasa Nabi, untuk memimpin tahapan verifikasi dan pengumpulan tersebut. Proses ini melibatkan pemeriksaan tulisan pada pelepah kurma, kulit, papan, maupun hafalan dari sahabat, dan diverifikasi dengan saksi ganda untuk tiap ayat. Hasilnya kemudian disimpan sebagai satu codex resmi awal dari standardisasi teks Al-Qur'an di kalangan Muslim.

Tindakan untuk mengkodifikasi Al-Qur'an ini menunjukkan visi jangka panjang Abu Bakar: di tengah kekacauan dan kematian banyak penghafal, ia menegaskan pentingnya menjaga warisan wahyu agar tidak hilang atau tercerai-berai. Ini bukan sekadar tindakan administratif, melainkan tindakan strategis untuk menjamin bahwa generasi berikutnya tetap memiliki referensi suci yang utuh. Upaya ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Islami sejati mengandung tanggung jawab terhadap masa depan umat, bukan hanya mengurus krisis saat itu saja.

Meski masa kekhalifahannya singkat, keberhasilan Abu Bakar dalam menjaga persatuan umat dan melestarikan teks Al-Qur'an menegaskan bahwa karakter kepemimpinan amanah, keberanian, integritas, dan visi jauh lebih penting daripada durasi masa jabatan. Keputusan-keputusan kritis yang diambilnya menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus mampu menentukan prioritas moral dan strategis demi kelangsungan komunitas. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip ini relevan bagi pemimpin institusi, organisasi, atau komunitas: bahwa menjaga nilai bersama dan warisan penting lebih utama daripada popularitas atau keuntungan jangka pendek.

Dengan demikian, kepemimpinan Abu Bakar Ash-Shiddiq memberikan pelajaran berharga: bahwa kepemimpinan Islami bukanlah sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab moral dan spiritual. Ia tidak hanya memimpin umat pada masa genting, tetapi juga meletakkan landasan bagi keberlangsungan umat secara lebih luas melalui stabilitas sosial, penataan kelembagaan, dan pelestarian warisan suci. Teladan ini tetap relevan bagi pemimpin pada masa sekarang yang ingin membangun komunitas berdasarkan keadilan, amanah, visi, dan keberlangsungan.

Kepemimpinannya dipandang sebagai contoh keteladanan dan ketegasan yang mampu menyatukan umat Islam di tengah perpecahan yang terjadi pada masa itu. Keberhasilan Abu Bakar dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk perlawanan dari beberapa suku Arab, menunjukkan adaptasi kepemimpinan yang efektif yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang kuat (Razia Shabana 2023).

Kepemimpinan Islam di era modern ini sejatinya dapat banyak belajar dari keteladanan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Di tengah tantangan globalisasi, krisis integritas, dan kompleksitas manajemen sosial politik, prinsip-prinsip yang ditunjukkan Abu Bakar tetap relevan dan aplikatif. Kejujuran, tanggung jawab publik, ketegasan dalam menjaga prinsip, serta orientasi pada maslahat umat menjadi nilai-nilai dasar yang sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan masa kini. Dalam dunia birokrasi, misalnya, teladan Abu Bakar yang menolak mengambil keuntungan pribadi dari jabatan dapat menjadi pedoman dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan amanah. Demikian pula, dalam organisasi modern, transparansi dan keterbukaan terhadap kritik sebagaimana Abu Bakar sampaikan dalam pidato pelantikannya adalah fondasi bagi budaya organisasi yang sehat.

Selain itu, visi jangka panjang Abu Bakar dalam menjaga keutuhan wahyu melalui kodifikasi Al-Qur'an menunjukkan bahwa kepemimpinan Islami bukan hanya bersifat reaktif terhadap krisis, tetapi juga proaktif dalam merancang kebijakan strategis untuk masa depan. Dalam konteks modern, hal ini mencerminkan pentingnya tata kelola yang berbasis nilai, berorientasi pada keberlanjutan, serta menjunjung tinggi ilmu dan warisan peradaban. Oleh karena itu, bagi pemimpin muslim masa kini baik dalam pemerintahan, pendidikan, bisnis, maupun masyarakat sipil meneladani Abu Bakar berarti membangun kepemimpinan yang berakar pada moral,

berani dalam mengambil keputusan sulit, dan memiliki tanggung jawab historis serta spiritual terhadap komunitas yang dipimpinnya.

Selanjutnya, Umar bin Khattab, yang dikenal dengan kebijakan dan reformasi yang luas, menghadirkan model kepemimpinan yang lebih terstruktur dan modern. Ia tidak hanya meningkatkan sistem administrasi pemerintahan, tetapi juga memperluas wilayah kekuasaan Islam dengan strategi militer yang canggih. Di bawah kepemimpinannya, Islam berkembang pesat melalui ekspansi ke wilayah Persia dan Romawi, yang menunjukkan kepemimpinan yang visioner dan efektif, di samping kebijakan ekonomi yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat (Kadenun, 2021)(Said & Jamarudin, 2023).

Umar bin Khattab, sebagai khalifah kedua setelah masa kepemimpinan Abu Bakar, dikenal karena kemampuannya membangun institusi pemerintahan yang struktural dan sistematis pada masa awal peradaban Islam. Di masa kekuasaannya (634–644 M), Umar melaksanakan berbagai reformasi administratif, sosio-politik, dan hukum antara lain pembentukan sistem peradilan yang jelas, pengaturan pembagian wilayah, penciptaan birokrasi baru, dan pembentukan mekanisme pengawasan terhadap pejabat negara. Ia juga dikenal sangat menekankan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat: melalui sistem baitul mal, zakat, dan distribusi negara untuk kesejahteraan kaum fakir, miskin, janda, dan dhuafa, suatu bentuk perhatian sosial yang dalam banyak aspek mirip sistem jaring pengaman sosial modern.

Pendekatan kepemimpinan Umar bukan hanya otoriter, melainkan berpijak pada prinsip musyawarah dan keadilan, menunjukkan bahwa kekuasaan harus dibarengi tanggung jawab, sistem, dan layanan publik sebuah paradigma sangat relevan bagi negara atau organisasi modern yang ingin menyinergikan nilai keadilan, akuntabilitas, dan manajemen yang baik(Iva Inayatul Ilahiyah;Muhammad Nur Salim., 2019). Kontribusi Umar terhadap struktur pemerintahan yang lebih sistematis dan penerapan hukum Islam mengilhami banyak pemimpin dan kebijakan di era mendatang(Rahma Aulia Hasanah; Rodiatul Husna;Gafa Anjasya;Fikri Azka Tanjung;Masleni Nasution., 2023).

Adapun Utsman bin Affan, sebagai khalifah ketiga, melanjutkan kesinambungan sistem pemerintahan dan berperan signifikan dalam stabilitas internal umat Islam serta penyebaran Islam ke wilayah luas.

Menurut studi mengenai kepemimpinan pada masa khulafaur rasyidin, model kepemimpinan Utsman dipandang sebagai bagian dari kelanjutan manajemen kolektif meskipun menghadapi tantangan, terutama di akhir masa kepemimpinannya (Asih Setiyowati 2021). Dia mewakili fase di mana struktur pemerintahan dan administrasi telah mulai lebih mapan, sehingga memungkinkan umat berkembang tidak hanya secara spiritual, tetapi juga institusional dan sosial. Bagi konteks modern, hal ini mengajarkan pentingnya kesinambungan sistem, stabilitas kelembagaan, dan penghormatan terhadap prosedur serta legitimasi terutama di tengah dinamika sosial-politik yang kompleks.

Kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sebagai salah satu dari Khulafa' al-Rasyidin memiliki dampak yang signifikan pada struktur politik, ekonomi, dan sosial dalam sejarah Islam. Sebagai khalifah keempat, kepemimpinannya diwarnai oleh konflik politik, terutama setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan, yang menyebabkan ketegangan antara berbagai faksi di kalangan umat Islam. Ali bin Abi Thalib dipandang sebagai sosok yang memperjuangkan keadilan dan kebenaran, meskipun dihadapkan pada tantangan luar biasa, termasuk pertikaian internal dan pemberontakan seperti yang terlihat dalam Pertempuran Jamal dan Siffin (Asih Setiyowati 2021). Berdasarkan analisis kasus, kepemimpinan Ali bin Abi Thalib sangat terfokus pada konsep keadilan, dialog, dan musyawarah. Dalam konteks ini, Ali bin Abi Thalib sering kali menggunakan pendekatan tahkim, penyelesaian konflik melalui mediasi yang mencerminkan nilai-nilai Islam (Siregar & Amril, 2025).

Pada masa kepemimpinannya diwarnai konflik internal dan situasi krisis, tetap menonjol dalam upaya menegakkan keadilan, membersihkan penyimpangan, serta mengutamakan hak-hak rakyat atas kemakmuran dan pemerintahan yang bersih. Selama masa pemerintahannya, ia berusaha untuk mengedepankan prinsip keadilan, yang tercermin dalam kebijakan-kebijakannya yang mendukung kesejahteraan umat, termasuk pengelolaan baitul mal (kas negara) untuk membantu mereka yang membutuhkan (A. Akbar et al., 2022). Gaya kepemimpinan Ali bin Abi Thalib mengombinasikan karakter demokratik, karismatik, dan dalam kondisi tertentu militeristik, yang mencerminkan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan zaman (Aldzakhiroh et al., 2024). Kebijakan yang diambilnya seperti penataan kembali pemerintahan, distribusi harta negara secara adil,

dan perbaikan tata kelola menunjukkan bahwa pemimpin Islam tidak boleh sekadar mengejar kuasa, tetapi harus menjaga amanah, integritas, dan keadilan sosial, bahkan dalam kondisi sulit sekalipun. Ia juga dikenal dengan penekanan pada pendidikan dan pengembangan intelektual selama masa kepemimpinannya. Dalam struktur pendidikan, Ali mendorong pentingnya ilmu pengetahuan dan pendidikan sebagai fondasi untuk kemajuan masyarakat Islam. Ia menganggap pendidikan sebagai sarana vital untuk membentuk karakter masyarakat dan membantu mereka dalam memahami agama serta menjalankan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari (Akhmad Rifansyah 2025).

Dari figur Umar bin Khatab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, kita dapat merumuskan model kepemimpinan Islam yang komprehensif dan relevan untuk zaman modern yaitu: pemerintahan berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat, struktur kelembagaan yang jelas dan bertanggung jawab, pelayanan publik dan kesejahteraan sosial, kebijakan jangka panjang serta keberpihakan kepada kaum lemah dan terpinggirkan. Dalam konteks modern baik di ranah negara, organisasi, maupun lembaga, model ini dapat dijadikan pijakan bagi pemimpin yang berintegritas, visioner, dan berorientasi kepada kemaslahatan bersama, bukan kepentingan sempit pribadi atau kelompok.

Oleh karena itu, kepemimpinan Islam masa kini idealnya meneladani karakter dan kebijakan para sahabat: mengedepankan musyawarah, keadilan, kesejahteraan umum, pelayanan publik, serta keberanian dan kebijakan yang bijaksana. Dengan cara itu, kepemimpinan Islam tidak hanya relevan dari sisi spiritual, tetapi juga kredibel dan efektif dalam mengelola kehidupan sosial politik dan kemasyarakatan modern selaras dengan nilai universal keadilan, amanah, dan kemanusiaan.

Kepemimpinan para sahabat Rasulullah Saw seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali memberikan fondasi nilai yang kuat bagi model kepemimpinan Islami sepanjang masa. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mengakar pada keimanan dan spiritualitas, tetapi juga tercermin dalam praktik administrasi pemerintahan, keadilan sosial, serta manajemen krisis yang adaptif dan visioner. Dalam era modern saat ini ditandai oleh keterbukaan informasi, kompleksitas kelembagaan, serta tantangan moral dalam kepemimpinan nilai-nilai tersebut menemukan urgensinya yang baru. Karakter seperti integritas, keberanian moral, ketegasan dalam

prinsip, serta pelayanan terhadap masyarakat luas tetap menjadi indikator utama kepemimpinan yang dirindukan umat.

Model kepemimpinan Abu Bakar yang menjunjung tinggi amanah dan keberanian dalam menjaga prinsip dasar Islam menjadi contoh nyata bagi pemimpin masa kini dalam menghadapi krisis. Umar bin Khattab, dengan pembaruan sistem pemerintahan dan keadilan sosialnya, memberikan landasan bagi pembangunan institusi negara yang kuat dan berpihak kepada rakyat. Utsman bin Affan mengajarkan tentang pentingnya kesinambungan kelembagaan dan manajemen kolektif, sementara Ali bin Abi Thalib memperlihatkan bagaimana integritas dan keberanian intelektual harus terus dijaga, bahkan di tengah tantangan politik yang berat. Semua itu bukan sekadar warisan sejarah, melainkan panduan aplikatif bagi pembentukan model kepemimpinan Islami yang relevan di masa kini.

Dalam konteks kepemimpinan modern baik di level negara, lembaga publik, organisasi bisnis, maupun institusi sosial prinsip-prinsip tersebut menuntut penerapan nilai universal Islam: keadilan ('adl), amanah (kepercayaan publik), musyawarah (syura), pelayanan ('ibadah sosial), dan keteladanan (uswah hasanah). Kepemimpinan yang dibangun atas dasar nilai ini tidak akan semata-mata bersandar pada struktur atau kekuasaan, melainkan pada kepercayaan dan kredibilitas moral. Oleh karena itu, kepemimpinan Islami di era modern dituntut untuk tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga bermartabat secara etis dan spiritual.

Refleksi ini menunjukkan bahwa semakin kompleks tantangan dunia modern, semakin besar pula kebutuhan terhadap nilai-nilai dasar yang diajarkan para sahabat Rasulullah. Kepemimpinan yang mampu menjembatani antara nilai-nilai transendental dan kebutuhan pragmatis zaman adalah kepemimpinan yang dicontohkan para Khulafaur Rasyidin. Maka, meneladani mereka bukan hanya upaya mengenang masa lalu, tetapi langkah strategis dalam membangun masa depan peradaban Islam yang bermartabat dan berkeadilan.

BAB 4

PENDIDIKAN AKHLAK SEBAGAI PONDASI KEPEMIMPINAN ISLAM

Pendidikan akhlak memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem pendidikan Islam karena menjadi inti dari pembentukan karakter manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Dalam konteks kepemimpinan, akhlak bukan sekadar hiasan moral, tetapi merupakan pondasi yang menentukan arah, gaya, dan kualitas kepemimpinan seseorang. Pemimpin yang berakhlak tidak hanya mampu mengelola dan mengarahkan bawahan, tetapi juga menjadi teladan yang menginspirasi melalui sikap, keputusan, dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Dalam pandangan Islam, keberhasilan seorang pemimpin tidak diukur dari pencapaian materi atau kekuasaan, tetapi dari sejauh mana ia menegakkan keadilan, amanah, dan tanggung jawab moral terhadap umat (A. A. Hidayat et al., 2024).

Dalam sejarah Islam, Rasulullah Saw menjadi figur utama yang menunjukkan bahwa akhlak adalah inti dari kepemimpinan. Kepemimpinan beliau berakar pada nilai-nilai kebenaran, keadilan, kasih sayang, dan keteladanan. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia, "Innamā bu'itstu li utammima makārima akhlāq" sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia (HR. Malik). Nilai inilah yang menegaskan bahwa pembinaan akhlak merupakan dasar bagi segala bentuk kepemimpinan dalam Islam, baik dalam skala individu, sosial, maupun

kelembagaan pendidikan. Pemimpin yang berakhlak mulia akan mengarahkan lembaganya menuju keberhasilan yang seimbang antara dimensi spiritual dan profesionalitas, karena akhlak menjadi pengendali moral dalam setiap tindakan dan kebijakan.

Dalam konteks pendidikan Islam modern, pentingnya akhlak sebagai dasar kepemimpinan semakin relevan di tengah krisis moral yang melanda dunia pendidikan. Dewi Fitriasih menekankan bahwa pendidikan karakter melalui manajemen pendidikan Islam merupakan langkah strategis dalam menyiapkan generasi pemimpin masa depan (Fitriasih & Rohmadi, 2024). Melalui manajemen pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai Islam, lembaga pendidikan dapat membentuk siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berjiwa pemimpin yang berintegritas dan berkepribadian luhur. Menurutnya, penguatan nilai akhlak harus dimulai dari pembelajaran berbasis keteladanan, kegiatan ekstrakurikuler, dan sinergi antara sekolah, keluarga, dan masyarakat. Ketiga unsur ini menjadi lingkungan sosial yang secara konsisten menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian yang menjadi dasar bagi kepemimpinan Islami.

Pendidikan akhlak sebagai pondasi kepemimpinan juga mengandung dimensi transformasional, di mana akhlak menjadi kekuatan yang membentuk perubahan positif pada diri seorang pemimpin. Sebagaimana dijelaskan oleh Sa'id Hawwa, pendidikan akhlak bertujuan membentuk kepribadian anak secara Islami agar memiliki dasar moral yang kokoh serta ilmu pengetahuan yang berlandaskan iman. Akhlak menurut Sa'id Hawwa dibangun atas prinsip loyalitas kepada Allah, cinta kepada sesama mukmin, ketegasan terhadap kemungkaran, dan semangat jihad dalam menegakkan kebenaran (Awaliyah, 2018). Nilai-nilai inilah yang menjadi pijakan bagi lahirnya kepemimpinan yang adil, tegas, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Dalam pandangan Islam, pemimpin bukan hanya individu yang memiliki kekuasaan, tetapi juga figur yang menuntun masyarakat menuju kebahagiaan dunia dan akhirat.

Hidayat dan Muttaqin menjelaskan bahwa kepemimpinan dalam pendidikan Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga spiritual dan moral (A. A. Hidayat et al., 2024). Pemimpin dalam pendidikan Islam memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai Qur'ani dan sunnah dalam seluruh aktivitas lembaga pendidikan. Seorang kepala

madrasah, misalnya, tidak hanya bertugas mengatur kegiatan akademik, tetapi juga menjadi teladan akhlak bagi guru dan siswa. Dengan demikian, nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab menjadi tolok ukur keberhasilan kepemimpinan. Dalam hal ini, akhlak berperan sebagai kekuatan penggerak yang melahirkan gaya kepemimpinan yang humanis dan transformatif.

Kepemimpinan yang berakar pada akhlak akan menumbuhkan suasana kerja yang penuh dengan kepercayaan, keadilan, dan kepedulian sosial. Pemimpin yang berakhlak tidak hanya fokus pada hasil, tetapi juga pada proses yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Dalam pendidikan Islam, pemimpin ideal adalah yang mampu memadukan antara penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan manajerial, dan keteladanan moral. Hal ini ditegaskan pula oleh Sholihah dan Maulida yang menyatakan bahwa pendidikan Islam merupakan fondasi utama bagi pembentukan karakter dan kepribadian peserta didik (Sholihah, 2020). Karena bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, pendidikan Islam memiliki parameter jelas tentang baik dan buruk, benar dan salah, serta hak dan kewajiban. Oleh sebab itu, pendidikan akhlak tidak dapat dipisahkan dari tujuan utama pendidikan Islam, yakni membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Dalam konteks madrasah, pendidikan akhlak menjadi inti dari seluruh kegiatan pembelajaran dan manajerial. Madrasah bukan sekadar lembaga transfer ilmu, tetapi juga tempat pembentukan nilai, moral, dan budaya Islami. Ayuhan menegaskan bahwa manajemen pendidikan Islam harus mampu menghubungkan pembentukan akhlak mulia dengan kompetensi unggul (Karimah et al., 2025). Akhlak yang baik dan kompetensi yang tinggi merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Pemimpin yang cerdas namun tidak berakhlak akan membawa kehancuran, sedangkan pemimpin yang berakhlak tanpa kompetensi akan menghadapi kesulitan dalam mengelola lembaga. Oleh karena itu, pendidikan Islam perlu mengembangkan sistem manajemen yang mengintegrasikan kedua aspek tersebut agar menghasilkan pemimpin yang unggul secara moral dan profesional.

Krisis kepemimpinan yang terjadi di berbagai sektor dewasa ini berakar dari rapuhnya nilai-nilai moral dan spiritual. Banyak pemimpin gagal menegakkan keadilan karena kehilangan kendali moral, dan lebih

mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok. Kondisi ini menunjukkan lemahnya pendidikan akhlak dalam proses pembentukan karakter calon pemimpin. Sejalan dengan itu, Tuti Awaliyah mengingatkan bahwa krisis akhlak di masyarakat modern menuntut pembaruan dalam pendidikan Islam yang lebih menekankan pada dimensi etika dan spiritualitas(Awaliyah, 2018). Pendidikan akhlak harus kembali menjadi prioritas utama dalam kurikulum pendidikan, agar lahir generasi yang tidak hanya cerdas dan terampil, tetapi juga memiliki hati yang bersih dan perilaku yang santun.

Dalam pandangan Islam, kepemimpinan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Oleh karena itu, setiap pemimpin wajib menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan tanggung jawab moral. Pemimpin dalam Islam disebut *ra'in* (penggembala), yang bertugas memelihara, mengarahkan, dan menuntun umatnya menuju kebaikan. Rasulullah SAW bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya” (HR. Bukhari). Hadis ini mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah ibadah yang menuntut keikhlasan dan ketulusan hati, bukan sarana mencari kedudukan atau keuntungan duniawi. Pemimpin yang berakhlak akan menjadikan kekuasaan sebagai amanah, bukan sebagai alat penindasan.

Pendidikan akhlak di madrasah harus diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran kepemimpinan yang berlandaskan tanggung jawab moral dan sosial. Guru sebagai agen pendidikan memiliki peran sentral dalam menanamkan nilai-nilai ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Fitriasih, guru bukan sekadar pengajar, tetapi juga teladan moral bagi siswa. Keteladanan guru dalam bersikap jujur, disiplin, dan menghargai orang lain merupakan bentuk nyata dari pendidikan akhlak yang efektif(Fitriasih & Rohmadi, 2024). Dalam perspektif manajemen pendidikan Islam, kepala madrasah harus mampu menciptakan budaya organisasi yang menumbuhkan nilai-nilai Islami seperti ukhuwah, tolong-menolong, dan musyawarah.

Pendidikan akhlak juga berperan sebagai sarana rekonstruksi sosial. Nilai-nilai moral yang diajarkan dalam pendidikan Islam tidak hanya membentuk individu, tetapi juga memperbaiki struktur sosial. Pemimpin yang berakhlak akan menciptakan sistem sosial yang adil dan harmonis.

Hal ini terlihat dari kepemimpinan Rasulullah SAW di Madinah, di mana beliau membangun masyarakat yang egaliter, menghargai perbedaan, dan menegakkan keadilan bagi semua. Dalam konteks pendidikan modern, penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat diwujudkan melalui kepemimpinan partisipatif, di mana pemimpin mendengarkan aspirasi warga sekolah dan mengedepankan kebersamaan dalam pengambilan keputusan.

Menurut Sholihah dan Maulida, pendidikan Islam harus mengemban misi character building dengan berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya (insan kamil)(Sholihah, 2020). Proses pendidikan tidak boleh berhenti pada transfer ilmu pengetahuan, tetapi harus menginternalisasi nilai-nilai spiritual dalam diri peserta didik. Dalam hal ini, kepemimpinan Islami menjadi instrumen penting dalam memastikan nilai-nilai tersebut tertanam dan terimplementasi secara nyata. Dengan akhlak sebagai pondasi, seorang pemimpin pendidikan mampu menjaga keseimbangan antara kemajuan akademik dan pembinaan moral peserta didik.

Ayuhan menambahkan bahwa manajemen pendidikan Islam yang inovatif mampu menciptakan koneksi antara pembentukan akhlak dan peningkatan kompetensi (Karimah et al., 2025). Melalui integrasi ini, peserta didik tidak hanya diajarkan tentang nilai-nilai kebaikan, tetapi juga dilatih untuk menerapkannya dalam konteks profesional. Seorang pemimpin madrasah yang memiliki akhlak mulia akan berusaha menanamkan etos kerja Islami kepada seluruh komponen lembaga, seperti disiplin, tanggung jawab, dan kerja sama. Prinsip ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah [9]:105, “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu”, yang menegaskan bahwa kerja keras yang disertai niat ikhlas merupakan bagian dari ibadah.

Dengan demikian, pendidikan akhlak sebagai pondasi kepemimpinan Islami memiliki makna strategis dalam membentuk karakter pemimpin masa depan. Akhlak tidak hanya menjadi ukuran moralitas pribadi, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang menentukan arah kemajuan bangsa. Kepemimpinan yang berpijak pada nilai-nilai akhlak akan melahirkan sistem pendidikan yang manusiawi, adil, dan bermartabat. Dalam konteks madrasah, pembinaan akhlak harus menjadi

prioritas utama yang diintegrasikan dalam kurikulum, kegiatan sekolah, dan budaya organisasi.

Pendidikan Islam sejatinya bertujuan mencetak generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara moral dan spiritual. Kepemimpinan yang lahir dari sistem pendidikan seperti ini akan menghasilkan pemimpin yang berani, jujur, dan amanah. Mereka bukan hanya mampu memimpin lembaga, tetapi juga menjadi panutan moral di tengah masyarakat. Dengan menjadikan akhlak sebagai pondasi, pendidikan Islam berperan strategis dalam mencetak pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman dengan kebijaksanaan dan keimanan yang kokoh.

Oleh karena itu, integrasi pendidikan akhlak dan kepemimpinan harus menjadi agenda prioritas dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam, khususnya madrasah. Pemimpin madrasah harus memahami bahwa keberhasilan lembaga tidak hanya diukur dari nilai akademik siswa, tetapi dari sejauh mana nilai-nilai akhlak tertanam dalam diri mereka. Dengan kepemimpinan berbasis akhlak, madrasah akan mampu menjadi pusat peradaban Islam yang melahirkan generasi pemimpin yang unggul, berintegritas, dan berakhlakul karimah.

A. Integrasi Akhlak dan Kepemimpinan

Integrasi antara akhlak dan kepemimpinan dalam konteks Islam merupakan konsep fundamental yang menegaskan bahwa nilai-nilai moral dan spiritual menjadi pondasi utama bagi efektivitas kepemimpinan. Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin tidak hanya bertugas mengatur urusan administratif, melainkan juga memikul tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan, menanamkan nilai-nilai keteladanan, dan menjaga amanah yang diembannya. Kepemimpinan sejati adalah manifestasi dari akhlak yang luhur; karenanya, akhlak dan kepemimpinan tidak dapat dipisahkan, tetapi harus menyatu dalam tindakan, ucapan, dan kebijakan seorang pemimpin. Rasulullah SAW telah mencontohkan model kepemimpinan yang sempurna dengan menyeimbangkan antara otoritas dan kelembutan, antara ketegasan dan kasih sayang, antara visi strategis dan spiritualitas yang mendalam (Manzil & Muttaqin, 2024). Dalam konteks pendidikan Islam, integrasi antara akhlak dan kepemimpinan

menjadi sangat penting karena lembaga pendidikan adalah ruang di mana nilai-nilai moral ditransmisikan secara sistematis kepada peserta didik. Pemimpin lembaga pendidikan, seperti kepala madrasah atau rektor, bukan hanya manajer administratif, tetapi juga pendidik yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku seluruh warga sekolah. Sebagaimana dijelaskan oleh Kunzita Ladiana Manzil, kepemimpinan pendidikan Islam memiliki karakteristik yang berbeda dengan kepemimpinan sekuler karena menempatkan nilai spiritual sebagai dimensi utama. Seorang pemimpin pendidikan harus memiliki sifat siddiq (jujur), amanah (terpercaya), tabligh (komunikatif), dan fathanah (cerdas), sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Saw (Manzil & Muttaqin, 2024).

Kepemimpinan yang berakar pada akhlak menciptakan keseimbangan antara pengelolaan profesional dan pengasuhan moral. Seorang pemimpin tidak hanya berfokus pada hasil capaian kinerja, tetapi juga pada proses dan etika dalam mencapainya. Nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral menjadi bingkai bagi setiap keputusan yang diambil (Rochim & Muttaqien, 2025). Pemimpin yang berakhlak akan menolak segala bentuk kezaliman dan ketidakadilan, bahkan ketika keputusan itu mengorbankan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dalam Islam, konsep keadilan ('adl) merupakan asas dari seluruh struktur sosial dan politik, sebagaimana Allah SWT berfirman: “Sesungguhnya Allah memerintahkan (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.” (QS. An-Nahl [16]:90).

Amelia Nur Rochim dan M. Imamul Muttaqien menegaskan bahwa prinsip-prinsip Islam seperti amanah, keadilan, dan musyawarah (shūrā) menjadi landasan moral bagi kepemimpinan pendidikan modern. Pemimpin pendidikan yang berpegang pada nilai-nilai ini mampu menyeimbangkan antara tuntutan profesionalisme dengan tanggung jawab spiritual (Rochim & Muttaqien, 2025). Dalam praktiknya, pemimpin madrasah yang berlandaskan akhlak akan menampilkan perilaku inklusif, menghargai aspirasi guru dan siswa, serta menjadikan setiap kebijakan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt.

Integrasi akhlak dalam kepemimpinan tidak hanya bersifat moralistik, tetapi juga fungsional. Artinya, nilai-nilai akhlak tidak berhenti pada level kesadaran individu, tetapi diwujudkan dalam sistem manajemen dan budaya organisasi. Nilna Azizatus Shofiyyah menekankan bahwa

integrasi nilai-nilai Islami dalam praktik kepemimpinan pendidikan menciptakan lingkungan pembelajaran yang holistik dan berdaya saing(Shofiyyah et al., 2023). Pemimpin yang menanamkan nilai rahmah (kasih sayang) dan keadilan dalam pengambilan keputusan akan menumbuhkan kepercayaan di antara guru dan siswa, yang pada gilirannya memperkuat budaya kolaboratif di sekolah.

Lebih jauh lagi, integrasi akhlak dalam kepemimpinan mengharuskan adanya keselarasan antara hati, pikiran, dan tindakan. Seorang pemimpin yang berakhlak tidak hanya berbicara tentang tetapi juga mempraktikkannya dalam keseharian. Fatmawati menjelaskan bahwa guru sebagai pemimpin spiritual di ruang kelas memiliki kekuasaan moral untuk membentuk karakter peserta didik(Fatmawati, 2020). Ia berperan bukan sekadar sebagai penyampai ilmu, tetapi sebagai teladan akhlak yang menumbuhkan nilai-nilai kejujuran, disiplin, dan empati. Dengan demikian, setiap guru adalah pemimpin yang mengemban misi akhlak Rasulullah Saw.

Dalam kerangka kepemimpinan pendidikan Islam, akhlak juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ketika pemimpin menjadikan akhlak sebagai landasan, ia akan selalu mempertimbangkan aspek kemaslahatan umat dalam setiap kebijakan. Kunzita Ladiana Manzil menegaskan bahwa Rasulullah Saw selalu mengutamakan prinsip musyawarah, keadilan, dan tanggung jawab moral dalam setiap keputusan kepemimpinannya(Manzil & Muttaqin, 2024). Hal ini menjadi teladan bagi pemimpin pendidikan agar selalu melibatkan partisipasi kolektif dalam pengambilan keputusan dan menolak pola kepemimpinan otoriter.

Selain itu, integrasi akhlak dalam kepemimpinan juga menyentuh dimensi humanistik. Rahmi Hayati dkk. menguraikan bahwa dalam masyarakat multikultural, nilai-nilai humanis seperti empati, toleransi, dan keadilan menjadi bagian integral dari kepemimpinan pendidikan Islam(Normuslim, muslim, Hayati, 2025). Dalam konteks madrasah atau lembaga Islam, pemimpin yang berakhlak harus mampu menghormati keberagaman latar belakang peserta didik dan guru. Ia harus menciptakan iklim pendidikan yang inklusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan diberi ruang untuk berkembang.

Konsep integratif ini sejalan dengan pandangan Syafiqurrohmah tentang pendidikan akhlak integratif-inklusif (Syafiqurrohmah, 2020). Menurutny, pendidikan akhlak tidak boleh terisolasi dalam mata pelajaran tertentu, melainkan harus terjalin dalam seluruh aktivitas pendidikan, baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Pemimpin pendidikan yang memahami hal ini akan menjadikan akhlak sebagai ruh dari seluruh kegiatan lembaga dari rapat kebijakan hingga interaksi harian antarwarga sekolah.

Dalam konteks praktis, integrasi akhlak dan kepemimpinan dapat diterjemahkan dalam beberapa strategi. Pertama, melalui keteladanan moral. Rasulullah Saw adalah contoh nyata pemimpin yang berhasil menanamkan perubahan sosial melalui akhlak. Pemimpin madrasah harus menunjukkan kejujuran dalam administrasi, keadilan dalam menilai, dan kelembutan dalam membimbing. Kedua, melalui musyawarah yang beretika, di mana setiap kebijakan diambil melalui konsultasi bersama dan didasari pada prinsip kemaslahatan. Ketiga, melalui pembinaan spiritual secara rutin, seperti kajian dan tazkirah yang menumbuhkan kesadaran moral seluruh warga sekolah.

Dalam studi Izza Umami, pengembangan karakter kepemimpinan sejak dini melalui organisasi siswa di sekolah dasar terbukti efektif dalam menanamkan nilai-nilai akhlak (Fajar & Umami, 2025). Program seperti latihan kepemimpinan siswa, kegiatan sosial, dan penguatan nilai keislaman membentuk integritas dan rasa tanggung jawab sejak usia muda. Integrasi nilai-nilai akhlak sejak awal pendidikan menyiapkan generasi calon pemimpin yang berakhlakul karimah dan mampu menghadapi tantangan global dengan moralitas tinggi.

Integrasi akhlak dan kepemimpinan juga berkaitan erat dengan pembentukan budaya organisasi yang Islami. Shofiyyah menekankan bahwa pemimpin pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam akan mampu membangun budaya sekolah yang berdaya saing namun tetap berakar pada moralitas (Shofiyyah et al., 2023). Dalam budaya semacam ini, seluruh warga sekolah memahami bahwa keberhasilan akademik harus berjalan seiring dengan kejujuran, keikhlasan, dan kerja sama.

Sementara itu, Manzil menegaskan bahwa Rasulullah Saw adalah figur yang mempraktikkan integrasi akhlak dan kepemimpinan dengan sempurna.¹² Beliau memimpin umat tidak dengan paksaan, tetapi dengan

keteladanan dan kasih sayang. Pemimpin yang meniru gaya kepemimpinan Rasulullah akan mampu menggerakkan hati bawahan, bukan hanya mengatur perilakunya. Prinsip ini menjadi relevan di madrasah modern, di mana guru dan kepala sekolah harus menyeimbangkan antara otoritas dan empati.

Dalam perspektif manajemen modern, integrasi akhlak dan kepemimpinan memberikan nilai tambah dalam hal efisiensi dan kepercayaan publik. Nilai keadilan dan amanah, sebagaimana dikemukakan oleh Rochim dan Muttaqien (Rochim & Muttaqien, 2025). menciptakan sistem pengambilan keputusan yang transparan, menumbuhkan partisipasi guru, dan meningkatkan loyalitas terhadap lembaga. Lembaga pendidikan yang dikelola secara akhlaki akan menjadi teladan bagi masyarakat, karena keberhasilannya tidak hanya diukur dari prestasi akademik, tetapi juga dari kontribusinya dalam membentuk karakter bangsa.

Dengan demikian, integrasi akhlak dan kepemimpinan bukanlah sekadar idealisme normatif, melainkan keharusan praktis bagi keberlanjutan pendidikan Islam. Pendidikan Islam tanpa akhlak akan kehilangan ruhnya, sedangkan kepemimpinan tanpa akhlak akan kehilangan arah. Keduanya saling membutuhkan: akhlak memberi arah moral bagi kepemimpinan, dan kepemimpinan memberi ruang implementatif bagi nilai-nilai akhlak.

Dalam konteks madrasah, integrasi ini dapat diaktualisasikan melalui program pembiasaan seperti morning briefing berisi nilai-nilai moral, musyawarah bulanan berbasis refleksi spiritual, dan sistem penghargaan berbasis keteladanan. Melalui strategi ini, akhlak tidak hanya menjadi pelajaran teori, tetapi menjadi budaya yang hidup di lembaga pendidikan.

Sebagaimana ditegaskan oleh Syafiqurrohman, pendidikan akhlak yang bersifat integratif-inklusif harus mencakup seluruh dimensi kehidupan spiritual, intelektual, sosial, dan moral (Syafiqurrohman, 2020). Dengan pendekatan seperti itu, kepemimpinan Islami akan melahirkan masyarakat yang tidak hanya berpengetahuan luas, tetapi juga berakhlak tinggi.

Akhirnya, integrasi akhlak dan kepemimpinan dalam pendidikan Islam merupakan cerminan dari cita-cita Al-Qur'an untuk membentuk khairu ummah umat terbaik yang memimpin dunia dengan keadilan dan kasih sayang. Kepemimpinan semacam ini tidak hanya menuntun manusia menuju kemajuan duniawi, tetapi juga mengantarkannya kepada kebahagiaan ukhrawi.

B. Model Kepemimpinan Islami Berbasis Pendidikan Akhlak

1. Konsep Dasar Kepemimpinan Islami

Kepemimpinan dalam perspektif Islam bukan sekadar persoalan administratif atau kemampuan mengatur sumber daya manusia, tetapi merupakan amanah besar yang memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial. Seorang pemimpin dalam Islam bukan hanya pemegang kekuasaan (authority holder), melainkan juga penjaga nilai dan pelayan bagi umat (khādim al-ummah). Kepemimpinan Islami menekankan keseimbangan antara aspek quwwah (kekuatan dan kapasitas profesional) dengan amānah (integritas moral dan spiritual)(Wartono & Ginanjar, 2018).

Al-Qur'an memberikan fondasi yang jelas mengenai pentingnya kedua aspek ini dalam firman Allah Swt:

“Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (memimpin) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”
(QS. Al-Qashash [28]:26)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kekuatan dan amanah adalah dua prinsip utama dalam kepemimpinan yang ideal. Kekuatan mencakup kompetensi intelektual dan kemampuan manajerial, sedangkan amanah meliputi kejujuran, tanggung jawab, dan ketulusan hati dalam menjalankan tugas (Wartono & Ginanjar, 2018). Dengan demikian, kepemimpinan Islami selalu bersandar pada akhlak sebagai fondasi etis dan spiritual dalam melaksanakan amanah publik.

Menurut Hidayat Ginanjar, kepemimpinan yang baik dalam Islam menuntut kematangan fisik, mental, dan intelektual yang selaras dengan nilai-nilai moral Rasulullah SAW dan para sahabat(Wartono & Ginanjar, 2018) Kepemimpinan Islami bukanlah konsep yang eksklusif bagi elite

agama, tetapi merupakan tanggung jawab setiap individu dalam lingkup pengaruhnya masing-masing, mulai dari keluarga, lembaga pendidikan, hingga pemerintahan. Dalam hal ini, visi kepemimpinan Islami harus berorientasi pada masalah (kemaslahatan) umat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok.

Zulfan Fahmi menegaskan bahwa kepemimpinan pendidikan Islam yang berhasil adalah yang mampu menyeimbangkan tradisi keilmuan Islam dengan tuntutan modernitas. Ia mencontohkan model kepemimpinan Abu Syekh H. Hasanoel Bashry, yang memadukan nilai-nilai istiqamah, musyawarah, kedisiplinan, dan visi pembaruan dalam mengelola lembaga pendidikan (Fahmi, 2024). Model kepemimpinan seperti ini memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu lembaga Islam tidak hanya bergantung pada kecakapan administratif, tetapi juga pada kedalaman spiritual dan keteladanan moral seorang pemimpin.

Kepemimpinan dalam Islam juga memiliki dimensi sosial yang kuat. Pemimpin tidak boleh memandang dirinya lebih tinggi dari yang dipimpin, karena hakikat kepemimpinan adalah pelayanan. Rasulullah Saw bersabda: *“Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.”* (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menegaskan bahwa kepemimpinan sejati lahir dari pengabdian, bukan dominasi. Prinsip inilah yang membedakan kepemimpinan Islami dari model kepemimpinan sekuler yang berorientasi pada kekuasaan dan keuntungan material.

2. Pendidikan Akhlak sebagai Basis Kepemimpinan

Dalam pandangan Islam, akhlak adalah inti dari seluruh ajaran agama dan menjadi parameter utama dalam menilai kualitas seorang pemimpin. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Malik). Hadis ini menegaskan bahwa seluruh dimensi kepemimpinan Islam bersumber dari akhlak yang baik. Akhlak menjadi sumber motivasi moral, pedoman etis, dan ukuran keberhasilan dalam kepemimpinan.

Menurut Hamka menempatkan pendidikan akhlak sebagai inti dari tujuan pendidikan Islam. Ia menegaskan bahwa pendidikan tidak semata untuk memperoleh pengetahuan, melainkan untuk memperhalus budi, memperkuat iman, dan menumbuhkan tanggung jawab moral terhadap

sesama manusia (Yusuf, 2022). Tujuan pendidikan Islam menurut Hamka selaras dengan tujuan penciptaan manusia itu sendiri, yakni untuk beribadah dan mengabdikan kepada Allah Swt. Oleh sebab itu, model kepemimpinan Islami yang ideal harus berakar pada pendidikan akhlak yang menumbuhkan kesadaran spiritual dan tanggung jawab sosial.

Mamat Rahmadi menjelaskan bahwa pengelolaan pendidikan karakter berbasis Islam terbukti efektif dalam membentuk pribadi siswa yang berdisiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Sekolah-sekolah berasrama yang mengintegrasikan kurikulum nasional dengan kurikulum khas Islam berhasil menanamkan nilai-nilai akhlak mulia secara sistematis. Dalam konteks kepemimpinan, pendekatan seperti ini menunjukkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin bukan hanya diukur dari hasil akhir, tetapi juga dari cara ia menumbuhkan karakter dan keteladanan dalam organisasi yang dipimpinnya.

Pendidikan akhlak sebagai basis kepemimpinan juga menuntut sinergi antara ilmu dan amal. Pemimpin yang berilmu tanpa akhlak akan kehilangan arah moral, sementara akhlak tanpa ilmu dapat berujung pada kesalehan pasif yang tidak produktif. Karena itu, model kepemimpinan Islami harus mampu menggabungkan dimensi intelektual, spiritual, dan sosial secara harmonis.

3. Prinsip-Prinsip Kepemimpinan Islami Berbasis Akhlak

Dalam kajian manajemen pendidikan Islam, beberapa prinsip kepemimpinan yang berakar pada akhlak dapat dirumuskan sebagai berikut: amanah, adil, musyawarah, tawadhu', istiqamah, dan keteladanan.

- a. *Amanah* (tanggung jawab moral). Pemimpin dalam Islam memikul amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt. Abu Syekh H. Hasanoel Bashry menunjukkan prinsip amanah ini dalam konsistensinya menjaga integritas lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Ia menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan dan menegakkan transparansi dalam pengelolaan dana lembaga. Amanah menjadi simbol dari kejujuran dan integritas yang menjadi kunci kepercayaan publik.
- b. *Adil* (menegakkan keadilan bagi semua pihak). Prinsip ini menuntut agar pemimpin tidak memihak kepada kelompok tertentu, tetapi menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai prinsip keadilan Qur'ani.

Zulfan Fahmi menjelaskan bahwa Abu Syekh selalu menegakkan keadilan dalam pembagian tugas dan tanggung jawab antar guru dan

santri, tanpa membedakan latar belakang sosial mereka (Fahmi, 2024).

- c. Musyawarah (partisipatif dan kolegal). Pemimpin Islam idealnya tidak otoriter, melainkan melibatkan seluruh anggota lembaga dalam pengambilan keputusan (Fahmi, 2024). Prinsip ini menjadi mekanisme pendidikan moral kolektif, di mana setiap individu belajar menghargai pendapat orang lain dan mengutamakan kemaslahatan bersama.
- d. *Tawadhu'* (kerendahan hati). M. Hidayat Ginanjar menekankan bahwa seorang pemimpin sejati adalah yang tidak terjebak pada ego kekuasaan, melainkan menjadikan kepemimpinan sebagai sarana ibadah. Dengan sikap *tawadhu'*, pemimpin mampu mendekatkan diri kepada bawahan dan menciptakan iklim organisasi yang penuh kepercayaan.
- e. *Istiqamah* (konsistensi dalam kebaikan). Dalam konteks pendidikan, *istiqamah* berarti kesungguhan dalam menjalankan visi dan misi lembaga berdasarkan nilai-nilai Islam (Abbas et al., 2023). Seorang pemimpin madrasah yang *istiqamah* akan memastikan bahwa setiap kebijakan, evaluasi, dan inovasi lembaga selaluberorientasi pada pembinaan akhlak peserta didik.
- f. Keteladanan (*uswah hasanah*). Keteladanan merupakan inti dari kepemimpinan Islami. Menurut Ngatmin Abbas, keteladanan Shalahuddin Al-Ayyubi menjadi inspirasi bagi sistem pendidikan Islam modern, karena kepemimpinannya didasarkan pada moralitas, keberanian, dan keadilan (Wartono & Ginanjar, 2018). Pendidikan keteladanan semacam ini perlu diinternalisasikan dalam setiap aspek kepemimpinan, terutama di lembaga pendidikan Islam.
- g. Kepemimpinan sebagai Proses Pendidikan Moral. Kepemimpinan Islami sejatinya adalah proses pendidikan moral yang berlangsung terus-menerus. Pemimpin bukan hanya objek kekaguman, tetapi juga subjek pendidikan yang mendidik melalui contoh dan kebijakannya. Iskandar dan Syarkawi menjelaskan bahwa kepemimpinan yang efektif dalam pendidikan Islam selalu melibatkan dimensi pembinaan spiritual dan pembentukan karakter. Pemimpin yang berakhlak berfungsi sebagai “guru moral” bagi seluruh warga lembaga.

Dalam konteks madrasah, kepala madrasah berperan sebagai pendidik utama dalam menanamkan nilai-nilai akhlak. Kepemimpinan kepala madrasah yang didasarkan pada prinsip ta'dib yakni pendidikan yang mengarahkan manusia untuk mengenal posisinya di hadapan Allah Swt akan menghasilkan budaya organisasi yang religius dan beretika (Iskandar & Syarkawi, 2024).

Mamat Rahmadi menegaskan bahwa pembentukan karakter siswa tidak dapat dicapai hanya melalui pengajaran formal, tetapi membutuhkan keteladanan dari seluruh ekosistem sekolah, terutama para pemimpin dan guru (Rahmadi, n.d.). Oleh karena itu, pemimpin pendidikan yang berhasil adalah mereka yang memandang dirinya sebagai bagian dari sistem pembelajaran moral yang hidup, bukan sebagai otoritas administratif semata.

Kepemimpinan yang berbasis akhlak juga melibatkan dimensi sosial-emosional. Menurut Ngatmin Abbas, Shalahuddin Al-Ayyubi dalam strategi kepemimpinannya selalu menyeimbangkan antara kekuatan militer dan kelembutan moral (Abbas et al., 2023). Ia menolak kekerasan yang tidak perlu dan mengedepankan sikap kasih sayang terhadap rakyat, bahkan terhadap musuh yang kalah perang. Nilai-nilai empati dan keadilan inilah yang membuat kepemimpinan beliau menjadi model pendidikan karakter yang relevan bagi masa kini.

Model kepemimpinan Islami berbasis pendidikan akhlak dalam lembaga pendidikan Islam dapat dilihat pada sistem kepemimpinan berbasis pesantren dan madrasah. Dalam sistem ini, nilai-nilai akhlak seperti kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab menjadi roh dari seluruh kegiatan manajerial. Menurut Esi Ratna Sari, salah satu indikator keberhasilan lembaga pendidikan Islam adalah sejauh mana nilai-nilai moral tersebut terinternalisasi dalam budaya organisasi (Sari et al., 2025).

Kepemimpinan berbasis akhlak memiliki beberapa ciri utama:

- a. Setiap kebijakan lembaga didasarkan pada nilai-nilai Qur'ani.
- b. Relasi antara pemimpin, guru, dan siswa dibangun atas dasar kasih sayang dan tanggung jawab moral.
- c. Setiap program pendidikan diarahkan untuk menumbuhkan akhlak mulia, bukan sekadar pencapaian akademik.

Listi Putri Setiawan menambahkan bahwa efektivitas pendidikan Al-Qur'an di sekolah berasrama seperti SMA IT As-Syifa terletak pada penerapan metode talaqqi dan kajian tafsir yang menumbuhkan pemahaman spiritual dan moral siswa. Model pembelajaran ini memperlihatkan bahwa ketika nilai-nilai akhlak Qur'ani dijadikan dasar dalam sistem pendidikan, maka hasilnya tidak hanya berupa peningkatan intelektual, tetapi juga pembentukan karakter religius.

4. Model-Model Kepemimpinan Islami Berbasis Akhlak

Kepemimpinan Islami berbasis pendidikan akhlak memiliki beragam bentuk model yang berkembang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan kelembagaan. Dalam sejarah peradaban Islam, praktik kepemimpinan Rasulullah Saw dan para Khulafā' al-Rāsyidīn menjadi sumber inspirasi utama bagi seluruh model kepemimpinan pendidikan Islam di berbagai belahan dunia. Namun, dalam perkembangannya, model-model tersebut mengalami adaptasi sesuai kebutuhan masyarakat dan lembaga pendidikan modern.

Secara umum, model kepemimpinan Islami berbasis pendidikan akhlak dapat diklasifikasikan menjadi empat bentuk utama: (1) kepemimpinan berbasis masjid, (2) kepemimpinan pesantren, (3) kepemimpinan keluarga, dan (4) kepemimpinan lembaga pendidikan modern. Masing-masing model memiliki karakteristik dan kontribusi tersendiri dalam mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam praktik kepemimpinan.

a. Model Kepemimpinan Berbasis Masjid

Masjid dalam sejarah Islam bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah ritual, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, sosial, dan kepemimpinan. Rasulullah SAW menjadikan Masjid Nabawi di Madinah sebagai pusat dakwah, pendidikan, dan pemerintahan. Dari masjid inilah lahir generasi sahabat yang tidak hanya saleh secara pribadi, tetapi juga kuat secara intelektual dan kepemimpinan.

Hidayat Ginanjar menegaskan bahwa masjid adalah tempat pembinaan karakter kepemimpinan yang menyeluruh, di mana nilai-nilai *hablum minallah* (hubungan dengan Allah) dan *hablum minannas* (hubungan antar manusia) terintegrasi dalam satu kesatuan praksis sosial

(Wartono & Ginanjar, 2018). Masjid menanamkan semangat musyawarah, kejujuran, dan tanggung jawab kolektif dalam menyelesaikan masalah umat. Melalui masjid, Rasulullah Saw membangun model kepemimpinan yang berpusat pada nilai-nilai spiritual, kebersamaan, dan tanggung jawab sosial.

Model kepemimpinan berbasis masjid juga menekankan fungsi pendidikan moral masyarakat. Pemimpin masjid, seperti imam, khatib, dan pengelola, berperan bukan sekadar sebagai pengatur kegiatan ibadah, tetapi juga sebagai pendidik moral masyarakat (Wartono & Ginanjar, 2018). Kepemimpinan berbasis masjid membentuk pribadi yang sederhana, rendah hati, dan adil, serta menanamkan budaya ukhuwah di antara jamaah.

Ginanjar juga menjelaskan bahwa kepemimpinan berbasis masjid dapat melahirkan generasi pemimpin yang memiliki keseimbangan antara spiritualitas dan kemampuan sosial (Wartono & Ginanjar, 2018). Model ini sangat relevan untuk diterapkan dalam pendidikan modern, khususnya di madrasah dan sekolah Islam, karena masjid merupakan tempat pembentukan karakter utama bagi siswa.

Prinsip utama dari kepemimpinan berbasis masjid meliputi: (1) Pelayanan terhadap umat sebagai bentuk ibadah, (2) Transparansi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan, dan (3) Keteladanan moral yang menjadi contoh bagi jamaah dan peserta didik.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, kepemimpinan masjid dapat menjadi basis bagi pengembangan model kepemimpinan pendidikan Islam yang berorientasi pada akhlak, yaitu:

b. Model Kepemimpinan Pesantren

Model kepemimpinan pesantren merupakan bentuk kepemimpinan Islami tertua di Indonesia yang menekankan aspek moral, spiritual, dan intelektual secara seimbang. Pesantren menjadi institusi pendidikan yang berfungsi tidak hanya mentransfer ilmu agama, tetapi juga membentuk karakter dan kepribadian santri agar memiliki akhlak mulia.

Zulfan Fahmi mencontohkan model kepemimpinan Abu Syekh H. Hasanoel Bashry HG di Yayasan Pendidikan Islam Al-Aziziyah Samalanga, Aceh, sebagai bentuk nyata kepemimpinan pesantren yang

berorientasi pada pembinaan akhlak dan spiritualitas (Fahmi, 2024). Abu Syekh menerapkan prinsip *istiqamah*, disiplin, musyawarah, dan tanggung jawab moral dalam membina santri dan tenaga pengajar. Hasilnya, lembaga pendidikan yang beliau pimpin mampu melahirkan generasi yang kuat secara spiritual, berilmu tinggi, dan berperilaku etis.

Dalam model pesantren, kepemimpinan tidak bersifat birokratis, tetapi paternalistik dan kharismatik. Kyai menjadi pusat nilai moral dan rujukan spiritual bagi seluruh komunitas pesantren (Fahmi, 2024). Gaya kepemimpinan ini memiliki keunikan tersendiri karena didasari oleh keikhlasan dan keteladanan. Seorang kyai memimpin dengan memberikan contoh hidup sederhana, taat ibadah, dan sabar dalam mendidik santri.

Kepemimpinan pesantren yang efektif perlu mampu memadukan nilai-nilai tradisi klasik dengan tuntutan dan kebutuhan di era modern. Dalam praktiknya, kyai tidak hanya menjadi pengajar ilmu agama, tetapi juga menjadi manajer lembaga yang inovatif dan adaptif terhadap perubahan sosial. Pesantren yang berakhlak kuat namun juga terbuka terhadap inovasi akan mampu bertahan dan berkembang dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Pesantren juga menjadi model pendidikan karakter berbasis nilai-nilai Islam. Menurut Mamat Rahmadi, keberhasilan pendidikan karakter di pesantren terletak pada sistem kehidupan 24 jam yang membiasakan santri hidup dalam disiplin, kebersamaan, dan tanggung jawab. Melalui sistem asrama, nilai-nilai akhlak seperti kejujuran, kesederhanaan, dan kepedulian sosial tertanam secara alami dalam diri peserta didik.

Dengan demikian, model kepemimpinan pesantren mengajarkan bahwa pemimpin harus menjadi teladan dalam segala aspek kehidupan baik dalam ibadah, manajemen, maupun hubungan sosial. Pesantren mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam sistem kepemimpinan yang menyentuh seluruh dimensi kehidupan santri.

c. Model Kepemimpinan Keluarga

Dalam Islam adalah lembaga pendidikan pertama dan utama bagi pembentukan akhlak dan kepemimpinan. Orang tua berperan sebagai pemimpin rumah tangga yang bertanggung jawab atas pendidikan moral anak-anaknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Dalam konteks ini, pendidikan akhlak di lingkungan keluarga menjadi pondasi awal bagi lahirnya generasi pemimpin yang berkarakter. Iskandar dan Syarkawi menegaskan bahwa keluarga adalah lingkungan paling efektif dalam menanamkan nilai-nilai dasar kepemimpinan seperti tanggung jawab, kejujuran, dan kasih sayang (Iskandar & Syarkawi, 2024).

Kepemimpinan keluarga yang Islami tidak bersifat otoriter, tetapi dialogis dan penuh keteladanan. Kepala keluarga sebagai pemimpin dituntut untuk mampu menyeimbangkan antara ketegasan dan kasih sayang. Dalam hal ini, ayah berperan sebagai pendidik spiritual dan ibu sebagai pengasuh moral yang menanamkan nilai-nilai akhlak melalui keteladanan sehari-hari.

Model kepemimpinan keluarga Islami berlandaskan pada tiga prinsip utama:

1. Ta’dīb (pendidikan moral). Menanamkan nilai-nilai adab, sopan santun, dan penghormatan terhadap orang lain.
2. Syūrā (musyawarah dalam keluarga). Mengajarkan anak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan secara adil.
3. Tarbiyah (pembinaan). Melibatkan proses pengawasan, pembimbingan, dan pembiasaan nilai-nilai akhlak secara konsisten.

Akhlak di keluarga berfungsi menyiapkan anak-anak agar kelak mampu menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dan berintegritas (Iskandar & Syarkawi, 2024).

d. Model Kepemimpinan Lembaga Pendidikan Modern

Dalam konteks lembaga pendidikan modern, model kepemimpinan Islami berbasis akhlak menjadi semakin penting karena lembaga pendidikan menghadapi tantangan globalisasi, digitalisasi, dan degradasi moral. Pemimpin pendidikan Islam di era modern harus mampu memadukan nilai-nilai spiritual Islam dengan kemampuan manajerial dan teknologi yang mutakhir.

Ngatmin Abbas menyoroti relevansi keteladanan Shalahuddin Al-Ayyubi sebagai model kepemimpinan moral yang dapat diadaptasi dalam konteks pendidikan modern (Abbas et al., 2023). Shalahuddin

menunjukkan bagaimana nilai-nilai iman, keberanian, dan keadilan dapat menjadi kekuatan kepemimpinan yang menginspirasi dalam menghadapi tantangan zaman. Pemimpin lembaga pendidikan perlu meneladani sikap beliau yang memadukan kekuatan strategi dengan kelembutan hati.

Burhanuddin Yusuf mengaitkan hal tersebut dengan pemikiran Buya Hamka, yang menekankan pentingnya pembentukan manusia seutuhnya melalui pendidikan akhlak yang holistik (Yusuf, 2022). Menurut Hamka, pemimpin sejati adalah yang mampu memadukan kecerdasan intelektual dengan kecerdasan spiritual dan emosional. Dalam dunia pendidikan, hal ini berarti bahwa kepala madrasah, rektor, atau guru besar harus menjadi contoh moral dan intelektual bagi sivitas akademika.

Model kepemimpinan lembaga pendidikan modern yang Islami mencakup beberapa ciri utama:

- Berbasis nilai Qur’ani dan Sunnah. Semua kebijakan dan keputusan didasarkan pada prinsip keadilan, amanah, dan kasih sayang.
- Berorientasi pada pengembangan karakter. Fokus pada pembentukan moral dan etika siswa, bukan hanya pencapaian akademik.
- Partisipatif dan visioner. Melibatkan seluruh elemen lembaga dalam proses perencanaan dan evaluasi, serta memiliki visi jangka panjang (Sari et al., 2025)
- Adaptif terhadap perubahan teknologi. Seperti yang ditemukan oleh Listi Putri Setiawan, penggunaan teknologi dalam pendidikan Al-Qur’an memperkaya pembelajaran dan meningkatkan motivasi siswa tanpa menghilangkan nilai-nilai akhlak.

Model kepemimpinan modern ini menuntut keseimbangan antara kemampuan manajerial dan spiritual. Seorang pemimpin pendidikan tidak cukup hanya pandai mengelola lembaga, tetapi juga harus mampu menjadi sumber inspirasi moral bagi komunitasnya.

5. Sinergi antara Akhlak dan Inovasi dalam Kepemimpinan

Kepemimpinan Islami berbasis akhlak tidak berarti menolak inovasi atau kemajuan. Sebaliknya, akhlak menjadi fondasi moral yang mengarahkan inovasi agar tetap berada dalam koridor syariat. Dalam konteks pendidikan, pemimpin yang berakhlak akan menggunakan inovasi teknologi, manajemen, dan pedagogi untuk memperkuat nilai-nilai spiritual peserta didik.

Zulfan Fahmi menguraikan bahwa Abu Syekh H. Hasanoel Bashry HG mampu mengintegrasikan tradisi keilmuan pesantren dengan inovasi dalam manajemen pendidikan (Fahmi, 2024). Beliau tidak menolak perkembangan zaman, tetapi mengadaptasinya dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam. Hal ini menjadi contoh ideal bagaimana pemimpin pendidikan Islam modern dapat melakukan transformasi tanpa kehilangan jati diri moralnya.

Esi Ratna Sari menambahkan bahwa model kepemimpinan visioner dalam lembaga pendidikan Islam harus berorientasi pada kemaslahatan jangka panjang (Sari et al., 2025). Pemimpin visioner adalah mereka yang mampu membaca tanda-tanda zaman, menafsirkan perubahan sosial, dan merumuskan strategi lembaga tanpa melepaskan nilai-nilai akhlak.

Dengan demikian, sinergi antara akhlak dan inovasi menjadi karakter utama kepemimpinan Islami modern. Pemimpin pendidikan harus menjadi pembaru yang berakhlak, bukan hanya pembaharu yang cerdas.

a. Implementasi Model Kepemimpinan Islami di Madrasah

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki posisi strategis dalam membangun model kepemimpinan Islami berbasis pendidikan akhlak. Madrasah bukan hanya tempat transmisi ilmu agama dan pengetahuan umum, tetapi juga wadah pembinaan karakter, moral, dan spiritual peserta didik. Kepala madrasah sebagai pemimpin lembaga memiliki peran ganda: sebagai manajer administratif dan sebagai pendidik moral. Oleh karena itu, seluruh aktivitas kepemimpinan di madrasah harus berlandaskan nilai-nilai akhlak Islami.

Menurut Iskandar dan Syarkawi, kepemimpinan transformasional dalam pendidikan Islam menuntut pemimpin madrasah untuk menjadi agen perubahan yang berorientasi pada peningkatan kualitas moral warga sekolah (Iskandar & Syarkawi, 2024). Kepala madrasah dituntut tidak hanya mengelola secara profesional, tetapi juga menjadi panutan spiritual yang menumbuhkan semangat kerja ikhlas dan amanah. Dengan demikian, kepemimpinan madrasah tidak sekadar mengatur struktur birokrasi, melainkan menghidupkan nilai-nilai akhlak dalam seluruh aktivitas pendidikan.

Implementasi model kepemimpinan Islami di madrasah dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan strategis berikut:

- Pendekatan Keteladanan (Uswah Hasanah)

Keteladanan merupakan metode paling efektif dalam membentuk akhlak warga madrasah. Kepala madrasah yang berakhlak mulia akan menjadi inspirasi bagi guru dan siswa. Sebagaimana Rasulullah SAW menjadi panutan utama dalam segala aspek kehidupan, kepala madrasah harus menunjukkan integritas moral, kedisiplinan, dan empati sosial (Wartono & Ginanjar, 2018).

Burhanuddin Yusuf mengutip pandangan Buya Hamka bahwa pendidikan akhlak tidak akan berhasil tanpa keteladanan nyata dari para pemimpin dan pendidik (Yusuf, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa setiap pemimpin pendidikan Islam harus menginternalisasi nilai-nilai yang dia ajarkan, sehingga proses pendidikan menjadi autentik dan bernilai spiritual.

- Pembiasaan Akhlak Islami dalam Budaya Madrasah

Pendidikan akhlak tidak cukup diajarkan dalam bentuk teori, tetapi harus dibiasakan dalam keseharian. Madrasah perlu mengembangkan budaya organisasi berbasis nilai-nilai Islam, seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial (Sari et al., 2025). Mamat Rahmadi menjelaskan bahwa pembiasaan moral di sekolah melalui program seperti piket kebersihan, shalat berjamaah, kegiatan sosial, dan mentoring keagamaan terbukti efektif dalam membentuk karakter siswa.

Dalam konteks kepemimpinan, kepala madrasah harus menjadi penggerak utama budaya ini. Ia perlu memastikan bahwa setiap kebijakan, kegiatan, dan interaksi di madrasah mencerminkan nilai-nilai akhlak Islami.

- Penguatan Musyawarah dan Partisipasi

Kepemimpinan Islami menekankan pentingnya musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan. Model ini mendorong partisipasi guru, siswa, dan masyarakat dalam menentukan arah kebijakan madrasah (Abbas et al., 2023). Prinsip ini tidak hanya meningkatkan efektivitas manajemen, tetapi juga menanamkan nilai-nilai demokratis dan tanggung jawab kolektif dalam lingkungan pendidikan.

Menurut Esi Ratna Sari, kepemimpinan visioner yang partisipatif

mampu membangun rasa memiliki (sense of belonging) di antara warga sekolah, sehingga mereka merasa menjadi bagian dari misi moral lembaga (Sari et al., 2025). Dengan demikian, partisipasi bukan sekadar mekanisme administratif, tetapi juga wahana pembentukan akhlak sosial.

- **Integrasi Kurikulum Akhlak**

Model kepemimpinan Islami juga menuntut adanya integrasi antara nilai-nilai akhlak dengan kurikulum pendidikan. Nilai moral tidak boleh hanya diajarkan dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, tetapi harus diinternalisasikan dalam seluruh disiplin ilmu (Widodo, 2024).

Listi Putri Setiawan menunjukkan bahwa penggunaan metode talaqqi dan kajian tafsir di SMA IT As-Syifa berhasil menanamkan nilai-nilai Qur'ani dalam mata pelajaran umum seperti sains dan bahasa. Integrasi ini menumbuhkan kesadaran bahwa semua ilmu bersumber dari Allah dan harus digunakan untuk kemaslahatan umat.

- **Pembinaan Spiritual dan Emosional Guru**

Guru merupakan pelaksana utama misi akhlak di madrasah. Kepala madrasah harus membina aspek spiritual dan emosional guru agar mereka mampu menjadi teladan moral. Pembinaan ini dapat dilakukan melalui kajian rutin, halaqah keislaman, dan kegiatan tazkiyatun nafs atau proses penyucian jiwa. Dengan demikian, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik dengan ketulusan dan kasih sayang.

Zulfan Fahmi menegaskan bahwa pemimpin pendidikan yang efektif adalah mereka yang mampu menumbuhkan semangat kerja sebagai ibadah di kalangan bawahannya (Fahmi, 2024). Dalam konteks madrasah, hal ini berarti kepala madrasah perlu menanamkan kesadaran spiritual dalam setiap kegiatan, termasuk dalam administrasi dan evaluasi akademik.

Meskipun konsep kepemimpinan Islami berbasis pendidikan akhlak memiliki fondasi teoretis yang kuat, pelaksanaannya di lapangan menghadapi berbagai tantangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi lembaga pendidikan Islam saat ini antara lain:

- **Sekularisasi Nilai dan Krisis Moral**

Globalisasi dan modernisasi membawa dampak sekularisasi nilai dalam dunia pendidikan (Abbas et al., 2023). Banyak lembaga

pendidikan lebih menekankan pencapaian akademik dan kompetensi profesional, sementara dimensi moral dan spiritual sering terpinggirkan. Akibatnya, muncul fenomena krisis moral seperti individualisme, korupsi akademik, dan rendahnya etika sosial.

Lembaga pendidikan Islam seharusnya tidak hanya berfokus pada pencapaian material semata, karena paradigma materialistik dapat mengikis nilai-nilai moral dan spiritual dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga Islam untuk menjaga keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi dengan memperkuat pendidikan karakter dan spiritualitas sebagai prioritas utama dalam manajemennya. Dengan langkah tersebut, pendidikan Islam diharapkan mampu melahirkan generasi yang berakhlak mulia, berintegritas, dan memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual serta spiritual.

- **Lemahnya Keteladanan Pemimpin**

Salah satu problem terbesar dalam dunia pendidikan adalah lemahnya keteladanan moral dari para pemimpin. Banyak pemimpin lembaga pendidikan yang cakap secara administratif, tetapi kurang menunjukkan kejujuran dan tanggung jawab moral. Hal ini menimbulkan kesenjangan antara teori dan praktik pendidikan akhlak. Mamat Rahmadi menegaskan bahwa tanpa keteladanan nyata dari pemimpin, seluruh sistem pendidikan karakter akan kehilangan efektivitasnya. Oleh karena itu, pendidikan akhlak harus dimulai dari pembenahan moral para pemimpin lembaga.

- **Tantangan Teknologi dan Digitalisasi**

Perkembangan teknologi membawa peluang besar sekaligus tantangan dalam pendidikan Islam (Iskandar & Syarkawi, 2024). Penggunaan media digital dalam pembelajaran dapat meningkatkan efisiensi dan akses pengetahuan, namun tanpa pengawasan moral, teknologi dapat disalahgunakan.

Listi Putri Setiawan menemukan bahwa di beberapa sekolah Islam, penerapan aplikasi Al-Qur'an digital dan pembelajaran daring berhasil memperkaya pengalaman belajar siswa, namun juga menimbulkan risiko distraksi moral seperti penyalahgunaan media sosial. Oleh karena itu, kepemimpinan Islami di era digital harus mampu mengarahkan penggunaan teknologi dengan prinsip etika digital Islam—yakni penggunaan teknologi sebagai sarana dakwah dan

penguatan akhlak, bukan sekadar hiburan.

b. Relevansi Kepemimpinan Islami dalam Konteks Pendidikan Kontemporer

Kepemimpinan Islami berbasis pendidikan akhlak memiliki relevansi yang tinggi dengan kebutuhan dunia pendidikan modern yang sedang mengalami krisis nilai. Pendidikan saat ini tidak hanya dihadapkan pada tuntutan peningkatan mutu akademik, tetapi juga pada persoalan karakter, integritas, dan moralitas. Dalam konteks ini, model kepemimpinan Islami menawarkan solusi integral melalui pendekatan etis dan spiritual.

Menurut Ngatmin Abbas, pendidikan karakter Islam memiliki kekuatan universal yang dapat diterapkan dalam konteks global, karena berakar pada nilai-nilai kemanusiaan seperti keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab sosial (Abbas et al., 2023). Prinsip-prinsip ini sejalan dengan tuntutan dunia modern yang menginginkan pemimpin beretika dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Esi Ratna Sari menambahkan bahwa model kepemimpinan visioner dalam lembaga Islam mampu menjawab tantangan globalisasi karena berorientasi pada pembangunan karakter manusia seutuhnya. (Sari et al., 2025) Pemimpin seperti ini tidak hanya berpikir strategis, tetapi juga berpikir moral—mampu mengelola perubahan tanpa kehilangan arah spiritual.

Selain itu, kepemimpinan Islami sangat relevan dalam membangun budaya organisasi religius di madrasah dan universitas Islam. Burhanuddin Yusuf menegaskan bahwa keberhasilan lembaga pendidikan Islam tidak diukur dari banyaknya lulusan atau akreditasi tinggi semata, tetapi dari sejauh mana lembaga tersebut melahirkan generasi berakhlakul karimah. (Yusuf, 2022)

Dengan kata lain, kepemimpinan Islami berbasis akhlak memberikan arah baru bagi sistem pendidikan yang berkeadaban (*civilized education*). Dalam sistem ini, pengetahuan tidak dilepaskan dari nilai, dan kemajuan teknologi tidak dipisahkan dari moralitas.

Sebagai akhir dari pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan Islam di masa depan perlu memiliki sejumlah karakter pokok sebagai landasan utamanya:

- Berakhlak dan Berilmu. Pemimpin harus menjadi pribadi yang seimbang antara kecerdasan intelektual dan kedalaman spiritual.
- Visioner dan Adaptif. Mampu menafsirkan perubahan zaman dengan kebijaksanaan Islami.
- Teladan Moral. Memimpin dengan contoh nyata, bukan hanya perintah.
- Inovatif dan Kolaboratif. Mengelola lembaga dengan prinsip musyawarah dan keterbukaan terhadap inovasi.
- Berorientasi pada Masalah. Seluruh kebijakan diarahkan untuk kemaslahatan umat, bukan kepentingan pribadi.

Iskandar dan Syarkawi menegaskan bahwa transformasi pendidikan Islam hanya akan terjadi apabila pemimpinnya memiliki ruh akhlak yang hidup dan mampu menularkan nilai-nilai tersebut kepada seluruh komponen lembaga. (Iskandar & Syarkawi, 2024)

Dengan demikian, model kepemimpinan Islami berbasis pendidikan akhlak bukan hanya sistem manajemen lembaga, tetapi juga sistem pembentukan manusia. Ia adalah manifestasi dari ajaran Rasulullah Saw yang menegaskan bahwa kepemimpinan sejati adalah amanah dan ibadah.

C. Nilai-Nilai Akhlak sebagai Basis Kepemimpinan di Madrasah

1. Hakikat Nilai-Nilai Akhlak dalam Pendidikan Islam

Akhlak merupakan inti dari seluruh ajaran Islam dan menjadi tujuan utama dari pendidikan. Pendidikan Islam tidak hanya diarahkan untuk mengembangkan potensi intelektual, tetapi juga untuk membentuk kepribadian yang beradab dan bermoral. Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.” (HR. Malik). Hadis ini menegaskan bahwa akhlak merupakan esensi dari risalah kenabian dan menjadi dasar dalam membangun peradaban manusia yang bermartabat.

Menurut Burhanuddin Yusuf, Buya Hamka menempatkan pendidikan akhlak sebagai inti dari proses pembentukan manusia seutuhnya.(Yusuf, 2022) Pendidikan bukan hanya transfer pengetahuan, melainkan proses pembentukan kepribadian dan pembersihan hati melalui keteladanan. Hamka menegaskan bahwa akhlak adalah cermin dari iman, dan pendidikan tanpa akhlak akan melahirkan kecerdasan yang kehilangan arah moral.(Yusuf, 2022)

konteks kepemimpinan madrasah, akhlak menjadi sumber nilai dan pedoman moral yang membimbing perilaku, keputusan, serta gaya kepemimpinan seorang kepala madrasah.(Sari et al., 2025) Akhlak berfungsi sebagai kompas etis yang menjaga keseimbangan antara orientasi spiritual dan tanggung jawab profesional. Seorang pemimpin madrasah yang berakhlak akan menempatkan kemaslahatan lembaga dan peserta didik di atas kepentingan pribadi, serta menjadikan kepemimpinannya sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.

ditegaskan oleh Mamat Rahmadi, akhlak dalam pendidikan Islam adalah dimensi spiritual yang menuntun manusia untuk memahami hakikat dirinya sebagai hamba dan khalifah. Oleh sebab itu, kepemimpinan dalam pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari nilai akhlak yang menuntun setiap langkahnya. Kepemimpinan yang berlandaskan akhlak menumbuhkan suasana pendidikan yang humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada keseimbangan antara dunia dan akhirat.

Dengan demikian, hakikat nilai-nilai akhlak dalam pendidikan Islam tidak semata-mata sebagai norma moral, tetapi juga sebagai energi spiritual yang menggerakkan seluruh aspek kepemimpinan madrasah. Nilai-nilai seperti kejujuran, amanah, adil, tanggung jawab, kesabaran, dan kasih sayang menjadi dasar dalam membangun sistem kepemimpinan yang bermartabat.

2. Relevansi Nilai Akhlak terhadap Kepemimpinan di Madrasah

Madrasah memiliki posisi strategis dalam pembinaan akhlak dan karakter peserta didik. Sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Karena itu, kepemimpinan di madrasah harus berlandaskan nilai akhlak agar proses pendidikan berjalan sesuai dengan misi spiritual Islam.

Iskandar dan Syarkawi menjelaskan bahwa kepemimpinan madrasah yang berakhlak sejatinya adalah kepemimpinan ta'dibiyyah, yakni kepemimpinan yang berorientasi pada pembentukan adab dan budi pekerti luhur.(Iskandar & Syarkawi, 2024) Kepala madrasah bukan sekadar administrator, tetapi juga murabbi dan muaddib pembimbing spiritual dan moral bagi seluruh warga sekolah.

Esi Ratna Sari menambahkan bahwa nilai akhlak memiliki peran penting dalam menentukan efektivitas kepemimpinan pendidikan Islam.(Sari et al., 2025) Pemimpin yang berpegang pada prinsip kejujuran, keadilan, dan amanah akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari bawahannya, serta menciptakan iklim organisasi yang kondusif dan harmonis.

Selain itu, Zulfan Fahmi mencontohkan praktik kepemimpinan Abu Syekh H. Hasanoel Bashry HG di Samalanga, Aceh, yang menampilkan integrasi antara akhlak dan manajemen.(Fahmi, 2024) Dengan prinsip istiqamah dan musyawarah, Abu Syekh membangun lembaga pendidikan yang berdisiplin, adil, dan penuh semangat ukhuwah. Teladan semacam ini menjadi contoh konkret bagaimana nilai akhlak menjadi faktor penentu keberhasilan lembaga pendidikan Islam.

Relevansi nilai-nilai akhlak bagi kepemimpinan madrasah juga terlihat dalam pembentukan budaya kerja religius. Kepala madrasah yang menanamkan nilai-nilai moral akan menciptakan organisasi yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga kokoh secara spiritual. Dengan demikian, akhlak bukan hanya fondasi moral pribadi pemimpin, tetapi juga sistem nilai yang menghidupkan seluruh elemen madrasah.

3. Dimensi Nilai Akhlak dalam Kepemimpinan Madrasah

Nilai-nilai akhlak yang menopang kepemimpinan madrasah dapat dibagi dalam tiga dimensi utama: spiritual, sosial, dan profesional.

a. Dimensi Spiritual

Dimensi ini berkaitan dengan hubungan pemimpin kepada Allah SWT. Seorang kepala madrasah yang berakhlak memiliki kesadaran bahwa kepemimpinan adalah amanah ilahi. Ngatmin Abbas mencontohkan figur Shalahuddin Al-Ayyubi sebagai teladan kepemimpinan spiritual yang memimpin dengan nilai keikhlasan, kesabaran, dan tawakal.(Abbas et al., 2023) Ia memimpin bukan karena ambisi

kekuasaan, melainkan karena panggilan iman dan tanggung jawab moral.

Dalam konteks madrasah, kepala madrasah yang memiliki kesadaran spiritual tinggi akan menempatkan pekerjaannya sebagai ibadah. Setiap kebijakan dan keputusan dijalankan dengan niat yang tulus demi kemaslahatan umat. Hal ini sejalan dengan gagasan Mamat Rahmadi bahwa spiritualitas merupakan pengendali utama perilaku kepemimpinan.

b. Dimensi Sosial

Akhlak sosial berkaitan dengan tanggung jawab pemimpin terhadap masyarakat madrasah: guru, siswa, dan orang tua. Pemimpin madrasah harus mampu berinteraksi dengan empati, kasih sayang, dan keadilan. (Sari et al., 2025) Esi Ratna Sari menekankan bahwa hubungan sosial yang dilandasi nilai akhlak akan menumbuhkan solidaritas, rasa saling percaya, dan kebersamaan. (Sari et al., 2025)

Kepemimpinan sosial juga tercermin dari kemampuan kepala madrasah dalam mempraktikkan *musyawarah* dalam setiap kebijakan. Prinsip *shūrā* yang berakar dari Al-Qur'an mengajarkan bahwa keputusan terbaik lahir dari partisipasi kolektif. (Iskandar & Syarkawi, 2024) Dengan demikian, kepala madrasah yang adil dan terbuka akan membangun organisasi yang demokratis dan berkeadilan.

c. Dimensi Profesional

Dimensi ini berhubungan dengan tanggung jawab pemimpin terhadap tugas dan profesinya. Iskandar dan Syarkawi menegaskan bahwa profesionalitas dalam kepemimpinan Islami tidak terlepas dari nilai moral dan integritas. (Iskandar & Syarkawi, 2024) Kepala madrasah yang profesional adalah yang konsisten antara ucapan dan tindakan, menepati janji, serta mengelola lembaga dengan efisien dan transparan.

Profesionalisme juga tercermin dalam kemauan untuk terus belajar dan berinovasi. Pemimpin yang berakhlak profesional akan menjadikan nilai Islam sebagai dasar etika kerja, bukan sekadar aturan administratif. Ia mampu menyeimbangkan antara efisiensi manajemen dengan nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab.

4. Strategi Internalisasi Nilai Akhlak dalam Kepemimpinan Madrasah

Nilai-nilai akhlak tidak akan bermakna apabila tidak diinternalisasi ke dalam sistem kepemimpinan madrasah secara nyata. Internalisasi ini merupakan proses menanamkan nilai-nilai moral agar menjadi kesadaran dan budaya dalam organisasi pendidikan.

Menurut Esi Ratna Sari, ada tiga strategi utama dalam internalisasi nilai akhlak di lembaga pendidikan Islam: keteladanan, pembiasaan, dan pembudayaan nilai-nilai Qur'ani(Sari et al., 2025).

1. Keteladanan Pemimpin (Uswah Hasanah).

Kepala madrasah adalah model utama bagi seluruh warga sekolah. Burhanuddin Yusuf menjelaskan bahwa keteladanan merupakan sarana pendidikan paling efektif, karena nilai akhlak tidak dapat diajarkan hanya dengan kata-kata, tetapi dengan perbuatan nyata(Yusuf, 2022). Kepala madrasah yang jujur, amanah, dan disiplin akan menumbuhkan budaya kejujuran dan tanggung jawab di lingkungan sekolah.

2. Pembiasaan Perilaku Islami.

Pembiasaan dilakukan melalui kegiatan harian seperti shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, serta perilaku sopan santun.(Setiawan, n.d.) Mamat Rahmadi menegaskan bahwa pembiasaan merupakan cara paling konkret dalam membentuk karakter religius. Kepala madrasah perlu memastikan bahwa kegiatan ini tidak bersifat formalitas, tetapi menjadi kebutuhan spiritual warga sekolah.

3. Pembudayaan Nilai Qur'ani dalam Organisasi.

Nilai-nilai seperti *amanah*, *adil*, *shūrā*, dan *ta'āwun* harus diintegrasikan ke dalam sistem kebijakan madrasah. Zulfan Fahmi menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam yang menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai budaya organisasi akan memiliki kohesi sosial yang tinggi dan stabilitas moral yang kuat.(Fahmi, 2024)

Melalui tiga strategi ini, kepemimpinan madrasah berbasis akhlak akan membentuk karakter kolektif yang harmonis dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

5. Penguatan Budaya Akhlak dalam Organisasi Pendidikan

Budaya organisasi madrasah adalah refleksi dari nilai-nilai yang diyakini dan diamalkan bersama. Budaya yang kuat akan memperkuat integritas dan identitas lembaga. Dalam konteks Islam, budaya organisasi yang baik berlandaskan maqāsid al-syarī'ah tujuan-tujuan syariat yang menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Pembentukan budaya akhlak dalam lembaga pendidikan Islam harus dilakukan melalui keteladanan dan pembiasaan yang konsisten (Abbas et al., 2023). Kepala madrasah harus menanamkan nilai-nilai moral bukan hanya melalui instruksi, tetapi melalui kebiasaan kolektif dan pembinaan spiritual.

Untuk memperkuat budaya akhlak di madrasah, langkah-langkah berikut perlu diterapkan:

- a. Formalisasi Nilai dalam Kebijakan Lembaga.
Setiap keputusan administratif harus mengandung prinsip moral. Misalnya, sistem penilaian guru tidak hanya berdasarkan produktivitas, tetapi juga keteladanan dan tanggung jawab.
- b. Ritualisasi Nilai melalui Kegiatan Keagamaan.
Program seperti *muhasabah*, doa bersama, dan kajian pekanan dapat menjadi sarana internalisasi nilai.
- c. Personalisasi Nilai oleh Pemimpin.
Kepala madrasah harus menjadi simbol moral lembaga. Iskandar dan Syarkawi menekankan bahwa pemimpin yang hidup sesuai nilai yang diajarkan akan menumbuhkan kredibilitas moral dan rasa hormat dari seluruh warga sekolah (Iskandar & Syarkawi, 2024).

Dengan demikian, budaya akhlak bukan sekadar kebijakan formal, tetapi menjadi ruh yang menjiwai seluruh aktivitas madrasah.

BAB 5

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN AKHLAK DI MADRASAH

Pendidikan akhlak menempati posisi sentral dalam sistem pendidikan Islam. Sejak masa Rasulullah Saw, pendidikan tidak pernah dipahami semata sebagai transfer ilmu, tetapi sebagai proses pembentukan kepribadian yang berlandaskan nilai-nilai tauhid. Rasulullah Sawdiutus untuk menyempurnakan akhlak manusia sebagaimana sabdanya: *“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.”* (HR. Malik). Hadis ini bukan hanya penegasan moral, tetapi juga menjadi landasan filosofis bahwa akhlak merupakan esensi dari seluruh dimensi pendidikan.

Dalam konteks keilmuan Islam, pendidikan akhlak berfungsi membentuk manusia ideal (insan kamil) yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kesadaran moral dan spiritual yang tinggi. Faisal Muhammad Nur menjelaskan bahwa pendidikan akhlak dalam Islam bersumber dari dua dimensi utama: tazkiyatun nafs (penyucian jiwa) dan *ta'dib* (pembentukan adab)(Nur, 2025). Kedua konsep ini menekankan keseimbangan antara pengendalian diri, penguasaan ilmu, dan kesadaran ketuhanan. Dengan demikian, pendidikan akhlak bukan sekadar pelajaran moral, melainkan sistem pembentukan karakter integral yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, diri, dan masyarakat.

Pemikiran ini sejalan dengan pandangan Al-Ghazali yang menegaskan bahwa pendidikan sejati bertujuan mengantarkan manusia menuju kebahagiaan dunia dan akhirat(N. Hidayat, 2020). Dalam kerangka

inilah, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki misi mulia untuk menanamkan nilai-nilai akhlak kepada peserta didik. Madrasah tidak sekadar mengajarkan ilmu pengetahuan agama, tetapi juga menjadi pusat pembinaan moral dan karakter bangsa.

Namun demikian, dalam praktiknya, pendidikan akhlak sering kali terpinggirkan oleh tekanan sistem pendidikan modern yang lebih menekankan aspek kognitif (Handayani, 2020). Kurikulum nasional yang padat materi akademik seringkali tidak memberikan ruang yang cukup bagi pembinaan akhlak secara mendalam. Akibatnya, muncul fenomena degradasi moral di kalangan peserta didik, seperti perilaku konsumtif, individualisme, dan menurunnya kepedulian sosial.

Situasi ini menunjukkan adanya urgensi untuk mengembalikan fungsi utama madrasah sebagai lembaga pembentuk akhlak. Pendidikan akhlak tidak boleh hanya menjadi muatan lokal atau pelajaran tambahan, tetapi harus diintegrasikan dalam seluruh aspek kehidupan madrasah mulai dari kurikulum, metode pembelajaran, hingga manajemen lembaga.

Madrasah, sejak awal kemunculannya, merupakan lembaga pendidikan yang berperan ganda: menyebarkan ilmu agama dan membentuk akhlak generasi Muslim. Keberadaan madrasah menjadi penting karena mampu menjembatani antara pendidikan agama dan pendidikan umum. Ibnu Rusydi menjelaskan bahwa madrasah pada dasarnya didirikan untuk menjawab tantangan zaman, yakni agar generasi muda tidak hanya memahami ilmu-ilmu duniawi tetapi juga memiliki pondasi moral dan spiritual yang kuat (Rusydi, 2021).

Dalam konteks pendidikan nasional, madrasah kini memikul tanggung jawab ganda: mempertahankan tradisi keislaman dan sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Di sinilah muncul tantangan besar: bagaimana madrasah mampu menjaga ruh akhlak tanpa kehilangan daya saing akademik. Lubna Handayani menegaskan bahwa implementasi pendidikan akhlak harus dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, bukan hanya formalistik. Artinya, nilai-nilai akhlak harus tertanam melalui pembiasaan, keteladanan, dan pengelolaan lembaga yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Habriyanti dan rekan-rekannya menunjukkan bahwa keberhasilan pembelajaran akidah akhlak di MTs Negeri 1 Tanjung Jabung Timur

terjadi karena adanya sinergi antara kurikulum, guru, dan lingkungan madrasah(Habriyanti et al., 2024). Implementasi pendidikan akhlak yang efektif selalu menuntut keterlibatan seluruh komponen lembaga pendidikan. Kepala madrasah, guru, dan tenaga kependidikan harus menjadi teladan moral yang konsisten, bukan hanya pengajar teori akhlak.

Madrasah memiliki potensi besar dalam membentuk karakter bangsa. Sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Azhari, sistem pendidikan Islam yang berakar pada nilai-nilai Qur’ani memiliki kekuatan integratif untuk menyatukan aspek intelektual, spiritual, dan sosial(Azhari, 2024). Nilai-nilai keislaman yang diajarkan di madrasah mampu membangun kesadaran etis peserta didik terhadap tanggung jawab diri dan sosial.

Namun di sisi lain, masih banyak madrasah yang menghadapi tantangan dalam menerapkan pendidikan akhlak secara konsisten. Di beberapa lembaga, pendidikan akhlak masih bersifat normatif dan teoritis, belum menjadi budaya yang hidup dalam keseharian siswa(Maulana et al., 2019). Banyak lembaga pendidikan Islam yang gagal menanamkan nilai-nilai akhlak karena terlalu fokus pada aspek administratif dan capaian akademik(Widodo, 2024).

Kondisi tersebut memperlihatkan perlunya pergeseran paradigma dari pendidikan berbasis pengetahuan menuju pendidikan berbasis nilai. Implementasi pendidikan akhlak harus menjadi bagian integral dari seluruh sistem pendidikan madrasah, bukan hanya tanggung jawab guru mata pelajaran agama.

Realitas sosial pendidikan saat ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengetahuan moral dan perilaku moral. Peserta didik mengetahui nilai-nilai akhlak, tetapi tidak selalu mengamalkannya. Kondisi ini menjadi bukti bahwa pembelajaran akhlak di madrasah masih cenderung kognitif dan belum menyentuh aspek afektif dan psikomotorik.

Penelitian Agus Sujarwo menemukan bahwa implementasi manajemen pendidikan berbasis karakter di madrasah sering terkendala oleh lemahnya komitmen pimpinan lembaga dan kurangnya koordinasi antar-komponen pendidikan(Sujarwo, 2024). Ia menegaskan bahwa nilai-nilai akhlak hanya akan efektif bila ditanamkan melalui sistem manajemen yang berorientasi pada keteladanan dan pembiasaan.

Sementara itu, pembelajaran akidah akhlak di madrasah membutuhkan integrasi antara pendekatan religius dan pedagogis. Guru tidak cukup hanya mengajarkan teori moral, tetapi juga harus mampu menjadi teladan dan motivator bagi siswa. Guru berperan sebagai muaddib, yakni pendidik yang membentuk adab dan etika peserta didik melalui pengajaran dan pembiasaan. Salah satu kendala utama implementasi pendidikan akhlak di madrasah adalah lemahnya inovasi dalam kepemimpinan (Syahrul, 2015). Banyak kepala madrasah yang masih terpaku pada pola manajemen konvensional dan belum menjadikan pendidikan akhlak sebagai prioritas strategis. Padahal, kepala madrasah memiliki peran sentral dalam menciptakan budaya organisasi yang berlandaskan nilai-nilai moral.

Selain faktor kepemimpinan, tantangan lainnya adalah pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi. Dunia digital membawa perubahan besar dalam perilaku remaja, termasuk siswa madrasah. Akses informasi yang luas dapat berdampak positif, tetapi juga berpotensi merusak moral apabila tidak disertai pengawasan dan pendidikan nilai. Dalam hal ini, pendidikan akhlak di madrasah harus mampu beradaptasi dengan zaman tanpa kehilangan prinsip-prinsip dasar Islam.

Wahyudi Widodo menekankan perlunya inovasi dalam pendidikan Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern (Widodo, 2024). Inovasi tersebut bukan berarti meninggalkan nilai-nilai tradisi, melainkan mengemasnya dalam pendekatan baru yang lebih kontekstual dan menarik bagi peserta didik. Dengan kata lain, madrasah perlu mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran yang tidak hanya mentransfer pengetahuan agama, tetapi juga menanamkan kesadaran moral secara reflektif.

Konteks empiris ini memperlihatkan bahwa implementasi pendidikan akhlak di madrasah bukan sekadar isu akademik, tetapi juga masalah strategis yang berkaitan dengan masa depan bangsa. Akhlak merupakan benteng moral yang melindungi generasi muda dari pengaruh negatif modernitas. Oleh sebab itu, upaya mengintegrasikan nilai-nilai akhlak dalam sistem pendidikan madrasah merupakan langkah penting dalam membangun peradaban Islam yang unggul dan beretika.

Implementasi pendidikan akhlak di madrasah didasarkan pada pandangan Islam bahwa pendidikan sejati adalah proses pembentukan

manusia seutuhnya (insān kāmil), yaitu pribadi yang cerdas secara intelektual, kuat secara spiritual, dan luhur secara moral (Nur, 2025). Rasulullah Saw merupakan teladan utama dalam pendidikan akhlak sebagaimana firman Allah Swt:

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.” (Q.S. Al-Ahzab: 21)

Ayat ini menegaskan bahwa seluruh dimensi pendidikan dalam Islam, termasuk manajemen madrasah, harus berakar pada keteladanan dan nilai-nilai moral Rasulullah.

Implementasi pendidikan akhlak yang berhasil hanya dapat dicapai jika didukung oleh manajemen pendidikan yang berbasis karakter (Sujarwo, 2024). Kurikulum madrasah seharusnya dirancang bukan sekadar untuk mentransfer pengetahuan, tetapi juga untuk menanamkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, pendidikan akhlak harus diintegrasikan ke dalam setiap aspek kehidupan madrasah, mulai dari perencanaan pembelajaran hingga budaya lembaga. Dasar pendidikan akhlak terletak pada tazkiyatun nafs (penyucian jiwa) dan ta’dīb (pembentukan adab), dua pilar yang mengarahkan manusia untuk hidup selaras dengan nilai-nilai ketuhanan. Melalui dua konsep ini, madrasah diharapkan menjadi wadah pembentukan karakter yang menyeimbangkan kecerdasan intelektual dengan kehalusan budi.

Kurikulum, metode pembelajaran, dan peran pendidik merupakan tiga komponen utama dalam implementasi pendidikan akhlak. Kurikulum yang efektif harus bersifat integratif, yaitu memadukan nilai-nilai moral dalam seluruh mata pelajaran, bukan hanya terbatas pada pelajaran Akidah Akhlak (Rusydi, 2021). Kurikulum pendidikan akhlak harus berorientasi pada internalisasi nilai, bukan sekadar penyampaian teori (Azhari, 2024).

Dalam pelaksanaannya, metode pembelajaran memainkan peran penting. Lubna Handayani mengidentifikasi bahwa metode keteladanan, pembiasaan, dan nasehat adalah strategi paling efektif dalam pembelajaran akhlak di madrasah. Guru menjadi faktor utama keberhasilan karena keteladanan lebih berpengaruh daripada instruksi verbal.

Selain itu, kepala madrasah memiliki peran strategis sebagai penggerak budaya akhlak lembaga. Agus Sujarwo menyebut gaya kepemimpinan yang ideal sebagai *leadership based on values*

kepemimpinan yang berlandaskan kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan(Sujarwo, 2024). Kepala madrasah yang berorientasi pada nilai akan menciptakan iklim kerja yang kondusif, menumbuhkan rasa hormat, dan menghidupkan budaya spiritual di lingkungan sekolah.

Dengan demikian, guru dan kepala madrasah merupakan dua figur kunci yang menentukan berhasil tidaknya internalisasi nilai-nilai akhlak dalam kehidupan madrasah.

Sejumlah penelitian mendukung pentingnya implementasi pendidikan akhlak di madrasah. Habriyanti dan rekan-rekannya menemukan bahwa keberhasilan pendidikan akidah akhlak sangat bergantung pada integrasi antara kurikulum, lingkungan, dan keteladanan guru. Selain itu inovasi manajemen pendidikan Islam yang berbasis nilai-nilai akhlak dapat meningkatkan mutu moral dan spiritual siswa(Widodo, 2024).

Penelitian Ibnu Rusydi juga menunjukkan bahwa pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam (SKI) yang menampilkan teladan para tokoh Islam efektif dalam menanamkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial(Rusydi, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan akhlak dapat diintegrasikan secara kreatif ke dalam berbagai bidang studi, bukan hanya pelajaran agama.

Dengan mengacu pada penelitian-penelitian tersebut, bab ini bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh bagaimana pendidikan akhlak diterapkan di madrasah melalui tiga fokus utama: (1) pengembangan kurikulum berbasis nilai, (2) penerapan metode dan strategi penanaman akhlak, dan (3) peran guru serta kepala madrasah dalam menciptakan budaya akhlak.

Pendidikan akhlak bukan sekadar komponen tambahan dalam kurikulum, tetapi menjadi jiwa dari seluruh sistem pendidikan Islam. Implementasinya di madrasah merupakan manifestasi nyata dari tujuan Islam untuk membentuk generasi yang berilmu, beriman, dan berakhlak mulia.

A. Kurikulum Pendidikan Akhlak

1. Hakikat kurikulum akhlak dalam pendidikan Islam

Kurikulum merupakan jantung dari sistem pendidikan. Dalam perspektif Islam, kurikulum tidak hanya dimaksudkan untuk menyampaikan pengetahuan secara kognitif, tetapi lebih jauh sebagai sarana membentuk kepribadian manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia (Emroni, 2023). Dengan kata lain, pendidikan Islam tidak hanya bertujuan mencetak individu yang cerdas, tetapi juga manusia yang sadar akan tanggung jawab moral dan spiritualnya di hadapan Allah Swt. Akhlak merupakan inti dari proses pendidikan yang menyentuh ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Pendidikan akhlak yang efektif bukanlah sekadar penyampaian teori tentang kebaikan, tetapi pembentukan karakter melalui pembiasaan, keteladanan, dan penghayatan nilai. Karena itu, kurikulum pendidikan akhlak harus dirancang agar tidak berhenti pada level pengetahuan (*knowing the good*), melainkan menumbuhkan cinta terhadap kebaikan (*loving the good*) dan komitmen untuk melakukannya (*doing the good*).

Dalam konteks madrasah, kurikulum akhlak berfungsi sebagai media integrasi antara ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Buku *Integrasi Nilai-Nilai Islami dan Penguatan Pendidikan Karakter* (Syahrul, 2023) menjelaskan bahwa madrasah harus berperan sebagai lembaga moral yang menanamkan adab dan akhlak sebagai landasan seluruh kegiatan pendidikan. Kurikulum yang baik bukan hanya menyajikan pengetahuan tentang akhlak, tetapi menjadikan akhlak sebagai jiwa yang menjwai seluruh proses pembelajaran dan budaya madrasah.

Hakikat kurikulum pendidikan akhlak dalam Islam adalah membentuk manusia yang beradab, yakni individu yang mampu menyeimbangkan antara potensi intelektual dan moral, serta menjadikan ilmu sebagai jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt dan mengabdikan kepada sesama.

2. Prinsip integrasi nilai-nilai Islami dalam kurikulum madrasah

Pendidikan Kurikulum akhlak di madrasah harus dibangun di atas prinsip-prinsip yang kuat secara teologis dan pedagogis. Syaefudin dan Nur (2020) dalam *Kepemimpinan Pendidikan* menjelaskan bahwa

rancangan kurikulum Islami berlandaskan tiga asas utama: tauhid, keseimbangan (*tawāzun*), dan keadilan (*‘adl*)(Jahari & Rusdiana, 2020).

Prinsip tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas pendidikan adalah bentuk ibadah kepada Allah Swt. Kurikulum akhlak harus menanamkan kesadaran spiritual bahwa belajar bukan sekadar kegiatan intelektual, melainkan upaya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dengan begitu, nilai ketuhanan tidak hanya muncul dalam mata pelajaran agama, tetapi diintegrasikan ke dalam seluruh bidang studi seperti kejujuran dalam ekonomi, keindahan dalam seni, dan keadilan dalam sosial.

Prinsip keseimbangan menekankan pentingnya pengembangan seluruh potensi manusia secara harmonis spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Pendidikan yang hanya mengasah kecerdasan kognitif tanpa memperhatikan pembentukan moral akan menghasilkan individu yang pintar tetapi kehilangan arah etis. Kurikulum akhlak harus mendorong keseimbangan antara pengetahuan dan pengamalan, antara teori dan pengalaman hidup nyata.

Prinsip keadilan mengandung makna bahwa setiap siswa berhak memperoleh kesempatan berkembang sesuai fitrahnya. Prinsip ini mengandung nilai inklusivitas setiap peserta didik harus diperlakukan adil tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau intelektual. Dalam praktiknya, kurikulum akhlak harus mendorong partisipasi aktif siswa dalam kegiatan pembelajaran dan penanaman nilai, baik di dalam maupun di luar kelas.

Buku Integrasi Nilai-Nilai Islami dan Penguatan Pendidikan Karakter menegaskan bahwa pendekatan tematik-integratif merupakan strategi efektif untuk menerapkan nilai-nilai Islam ke dalam kurikulum madrasah(Mufida et al., 2020). Setiap tema pembelajaran dapat dihubungkan dengan nilai Islam tertentu, misalnya topik sains dikaitkan dengan keagungan ciptaan Allah, atau pelajaran ekonomi dihubungkan dengan nilai kejujuran dan tanggung jawab sosial. Dengan pendekatan ini, seluruh mata pelajaran berperan dalam pembentukan karakter, bukan hanya pelajaran agama.

3. Kurikulum akhlak sebagai strategi pembentukan karakter

Kurikulum akhlak tidak hanya berfungsi sebagai pedoman pembelajaran, tetapi juga sebagai strategi pembentukan karakter yang sistemik. (Nur, 2025) Emroni menjelaskan bahwa akhlak tidak dapat dibentuk hanya melalui pengajaran verbal, melainkan melalui pengalaman nyata, pembiasaan, dan keteladanan yang berulang. Pendidikan akhlak yang terencana dengan baik akan membantu siswa menginternalisasi nilai, mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadikannya sebagai bagian dari identitas diri.

Dalam kurikulum madrasah, pembentukan karakter dapat diwujudkan melalui kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang berorientasi pada nilai. Contohnya, kegiatan rutin seperti doa bersama, tadarus Al-Qur'an sebelum belajar, serta kerja sama dalam proyek sosial keagamaan dapat menjadi wahana konkret pembinaan akhlak. Program-program seperti ini menanamkan kebiasaan baik sekaligus menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial di kalangan siswa.

Dalam pandangan Syaefudin dan Nur, keberhasilan kurikulum akhlak sangat bergantung pada komitmen moral seluruh warga madrasah (Jahari & Rusdiana, 2020). Kepala madrasah berperan sebagai moral leader yang menciptakan iklim sekolah bernilai Islami, sedangkan guru bertindak sebagai role model bagi para siswa. Tanpa teladan nyata dari pemimpin dan pendidik, nilai-nilai akhlak hanya akan berhenti pada tataran teori.

Kurikulum akhlak harus memuat nilai-nilai universal seperti amanah, kejujuran, disiplin, empati, dan tanggung jawab. Nilai-nilai tersebut tidak diajarkan melalui hafalan, melainkan melalui refleksi, dialog, dan kegiatan nyata yang menuntut siswa untuk berperilaku etis. Melalui pendekatan ini, pendidikan akhlak dapat melahirkan generasi yang tidak hanya berilmu tinggi, tetapi juga memiliki sensitivitas moral dan sosial yang kuat.

Salah satu ciri khas pendidikan madrasah adalah kemampuannya mengintegrasikan nilai-nilai Islami ke dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Integrasi nilai Islami harus meliputi tiga aspek utama: spiritual, moral, dan sosial.

- a. **Integrasi spiritual** berarti menanamkan kesadaran tauhid dalam setiap bidang ilmu. Ilmu pengetahuan harus dipahami sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah yang mengantarkan manusia pada keimanan, bukan sekadar alat eksploitasi duniawi.
- b. **Integrasi moral** berarti menjadikan nilai-nilai Islam sebagai pedoman etika dalam berpikir, bersikap, dan berinteraksi.
- c. **Integrasi sosial** berarti menghubungkan ajaran Islam dengan realitas masyarakat agar siswa mampu berkontribusi positif secara sosial.

Melalui ketiga dimensi ini, madrasah dapat melahirkan lulusan yang unggul dalam ilmu pengetahuan sekaligus kokoh dalam nilai-nilai moral.

Pendekatan integratif juga diperkuat dengan konsep *curriculum infusion*, yaitu penyisipan nilai-nilai Islam dalam setiap mata pelajaran tanpa harus menambah beban kurikulum. Misalnya, pelajaran matematika dapat dikaitkan dengan konsep keadilan dan keseimbangan, sementara pelajaran sejarah dapat mengangkat keteladanan Rasulullah dan para sahabat.

Selain itu, terdapat pula *hidden curriculum* atau kurikulum tersembunyi nilai-nilai yang diajarkan melalui budaya sekolah, gaya kepemimpinan, dan interaksi sosial di madrasah. Menurut Emroni, *hidden curriculum* merupakan faktor yang sangat berpengaruh karena siswa belajar banyak dari keteladanan nyata dibandingkan sekadar teori. Oleh karena itu, budaya madrasah yang religius dan beradab merupakan wujud paling efektif dari kurikulum akhlak yang hidup.

4. Tantangan dan inovasi kurikulum akhlak di era modern

Perubahan sosial dan perkembangan teknologi digital telah membawa tantangan baru bagi pendidikan Islam, khususnya dalam bidang pembinaan akhlak. Peserta didik madrasah kini hidup di tengah arus informasi yang serba cepat, di mana nilai-nilai moral sering kali tergerus oleh budaya instan dan materialisme. Dalam kondisi ini, kurikulum pendidikan akhlak harus berinovasi agar tetap relevan dan mampu menjawab tantangan zaman.

Emroni menegaskan bahwa inovasi dalam pendidikan akhlak bukan berarti mengganti nilai-nilai dasar Islam, melainkan menyesuaikan pendekatan dan metode pembelajaran agar lebih kontekstual dengan dunia

modern. Pembelajaran akhlak di era digital dapat memanfaatkan teknologi sebagai media penguatan nilai, bukan ancaman moral. Misalnya, penggunaan platform digital seperti video edukatif, simulasi etika sosial, atau aplikasi e-learning berbasis karakter dapat membantu guru madrasah menyampaikan nilai dengan cara yang menarik dan dekat dengan dunia siswa.

Selain inovasi media, aspek kurikulum juga perlu diperbarui agar mampu mengintegrasikan digital literacy dengan nilai akhlak. Syahrul menyarankan model akhlak digital, konsep pendidikan karakter yang mengajarkan tanggung jawab dan etika dalam penggunaan teknologi. Melalui kurikulum ini, siswa tidak hanya diajarkan cara menggunakan internet secara produktif, tetapi juga bagaimana menjaga kejujuran, menghormati privasi orang lain, dan menghindari perilaku negatif di ruang digital seperti cyberbullying atau penyebaran hoaks.

Syaefudin dan Nur (2020) menambahkan bahwa inovasi kurikulum akhlak perlu berorientasi pada lifelong learning, yakni menanamkan nilai moral yang mampu bertahan sepanjang kehidupan seseorang. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan empati harus ditanamkan dalam konteks sosial yang terus berubah. Dengan demikian, madrasah tidak hanya mencetak generasi yang taat secara ritual, tetapi juga tangguh secara moral menghadapi era digital.

Meski memiliki visi luhur, implementasi kurikulum akhlak di madrasah menghadapi berbagai kendala praktis. Tantangan tersebut tidak hanya berasal dari faktor internal lembaga pendidikan, tetapi juga dari pengaruh eksternal seperti globalisasi, media sosial, dan perubahan sosial budaya.

Tantangan secara internal, madrasah masih memiliki kurikulum yang bersifat normatif dan belum menekankan aspek aplikatif nilai-nilai akhlak. Banyaknya guru yang memahami pendidikan akhlak sebatas penyampaian teori moral tanpa strategi pembiasaan dan refleksi nilai. Selain itu, keterbatasan sarana, sumber belajar, dan kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran berbasis karakter turut menjadi hambatan signifikan. Secara eksternal yaitu adanya tantangan globalisasi informasi telah menciptakan *cultural shock* di kalangan remaja. Akses yang luas terhadap media sosial dan budaya populer sering kali menumbuhkan nilai-nilai baru yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti hedonisme,

individualisme, dan relativisme moral. Dalam situasi ini, kurikulum akhlak di madrasah harus memainkan peran ganda: melindungi peserta didik dari pengaruh negatif sekaligus membekali mereka dengan kemampuan kritis untuk memilah informasi secara etis.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Syahrul menyarankan penerapan *curriculum-based character reinforcement*, yaitu penguatan karakter yang terintegrasi dalam seluruh komponen kurikulum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Guru harus dilatih untuk tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga *moral facilitator* yang mampu mengaitkan setiap materi dengan nilai-nilai Islam.

Selain itu, dukungan keluarga dan masyarakat sangat menentukan efektivitas kurikulum akhlak. Pendidikan moral tidak akan berhasil jika hanya dilakukan di sekolah, sementara lingkungan keluarga tidak menanamkan nilai yang sama. Oleh karena itu, madrasah perlu menjalin kemitraan dengan orang tua melalui program pembinaan karakter keluarga, pelatihan parenting Islami, dan forum diskusi nilai.

Syaefudin dan Nur menegaskan bahwa kepemimpinan kepala madrasah menjadi kunci sukses implementasi kurikulum akhlak. Kepala madrasah yang visioner dan religius dapat menciptakan budaya organisasi yang mendukung nilai-nilai moral melalui keteladanan, komunikasi persuasif, dan sistem penghargaan berbasis etika. Lingkungan madrasah yang kondusif akan memperkuat internalisasi nilai pada diri siswa.

Keberhasilan kurikulum akhlak tidak cukup hanya pada tahap perencanaan, tetapi juga harus diwujudkan melalui strategi implementasi yang sistematis. Berdasarkan hasil riset dan kajian pustaka dari berbagai jurnal pendidikan Islam, terdapat tiga strategi utama untuk memperkuat kurikulum akhlak di madrasah:

a. Pengembangan Kurikulum Berbasis Nilai

Pentingnya menekankan pendekatan *value based curriculum*, di mana setiap mata pelajaran mengandung dimensi moral yang jelas dan terukur. Guru harus mampu mengidentifikasi nilai-nilai utama dari setiap topik pelajaran dan mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan demikian, siswa tidak hanya memahami isi pelajaran, tetapi juga mampu mengambil hikmah moral darinya.

b. Pendekatan Partisipatif dan Keteladanan.

Kurikulum akhlak akan efektif jika guru dan kepala madrasah menjadi teladan moral. Keteladanan merupakan metode pembelajaran yang paling kuat karena nilai-nilai akhlak ditularkan melalui perilaku nyata, bukan sekadar teori. Selain itu, keterlibatan siswa dalam kegiatan sosial dan keagamaan seperti bakti sosial, kerja sama lintas kelas, atau kegiatan *service learning* dapat menjadi sarana konkret internalisasi nilai.

c. Evaluasi Berbasis Akhlak (Moral Assessment)

Evaluasi dalam pendidikan akhlak harus lebih dari sekadar penilaian akademik. Syahrul mengusulkan adanya sistem penilaian moral yang menilai sikap, tanggung jawab, dan kejujuran siswa dalam keseharian. Penilaian semacam ini dapat berbentuk observasi perilaku, refleksi diri, portofolio nilai, atau laporan kepribadian dari guru. Dengan evaluasi berbasis akhlak, pendidikan di madrasah akan berorientasi pada pembentukan kepribadian, bukan sekadar pencapaian nilai ujian.

Kurikulum pendidikan akhlak bukan hanya bagian teknis dari sistem pendidikan Islam, tetapi juga memiliki dimensi filosofis yang mendalam. Dalam kerangka peradaban Islam, pendidikan akhlak berfungsi sebagai moral compass yang menuntun arah perkembangan ilmu dan masyarakat. Hilangnya dimensi moral dalam kurikulum modern menyebabkan lahirnya krisis kemanusiaan kemajuan ilmu pengetahuan tidak diimbangi dengan kebijaksanaan moral. Oleh karena itu, kurikulum akhlak di madrasah memiliki misi ganda yaitu membentuk individu beriman sekaligus membangun masyarakat beradab. Akhlak merupakan manifestasi keimanan. Pendidikan akhlak yang berhasil akan melahirkan pribadi yang memiliki integritas moral, disiplin spiritual, dan kepedulian sosial. Hal ini selaras dengan konsep akhlakul karimah yang menjadi tujuan utama pendidikan Islam. Kurikulum madrasah yang menanamkan nilai-nilai ini akan berkontribusi langsung pada pembangunan bangsa yang bermartabat dan berkeadilan.

Dalam konteks globalisasi, kurikulum akhlak juga berperan sebagai filter nilai. Madrasah diharapkan mampu menanamkan identitas Islam yang kuat tanpa menutup diri dari kemajuan ilmu pengetahuan. Sikap terbuka terhadap modernitas harus diimbangi dengan keteguhan prinsip

moral agar siswa mampu berinteraksi dengan dunia global tanpa kehilangan jati diri.

Dengan demikian, kurikulum akhlak di madrasah bukan hanya alat pendidikan, melainkan sarana peradaban. Ia membentuk manusia yang sadar diri, berorientasi spiritual, dan berkontribusi terhadap masyarakat. Implementasinya menuntut kerja kolektif antara guru, kepala madrasah, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

B. Metode dan Strategi Penanaman Akhlak di Madrasah

1. Makna Strategis Penanaman Akhlak di Madrasah

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk generasi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Dalam konteks modern yang penuh tantangan moral, penanaman akhlak di madrasah menjadi bukan hanya bagian dari kurikulum, tetapi juga jantung dari seluruh aktivitas pendidikan. Penanaman akhlak bukan sekadar mengajarkan siswa untuk mengenal nilai-nilai baik, melainkan membimbing mereka agar nilai tersebut tertanam dalam hati, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan nyata.

Penanaman akhlak adalah proses pembiasaan dan internalisasi nilai moral melalui pengalaman konkret, bukan sekadar hafalan atau ceramah. Dengan demikian, strategi pendidikan akhlak di madrasah harus mampu menyentuh dimensi afektif dan psikomotorik siswa, selain aspek kognitifnya. Dalam istilah pedagogis Islam, pendidikan akhlak harus menjadi proses tazkiyah (penyucian diri) dan ta'dīb (pembentukan adab).

Madrasah memiliki potensi unik dibandingkan sekolah umum, karena di dalamnya nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan ke seluruh aspek pembelajaran. Oleh karena itu, metode penanaman akhlak di madrasah harus bersifat integral menggabungkan pendekatan keagamaan, sosial, dan pedagogis secara harmonis.

2. Pendekatan Umum dalam Penanaman Akhlak

Dalam konteks pendidikan Islam, terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk menanamkan nilai akhlak kepada peserta didik. Beberapa pendekatan yang sering digunakan di madrasah antara lain pendekatan keteladanan, pembiasaan, nasehat, dan refleksi nilai.

a. Pendekatan Keteladanan (Uswah Hasanah)

Keteladanan merupakan metode paling fundamental dalam pendidikan akhlak disebut juga *living curriculum*, yaitu kurikulum yang hidup melalui perilaku pendidik. Guru dan kepala madrasah menjadi cermin nilai moral bagi peserta didik, karena perilaku mereka lebih membekas daripada nasihat verbal.

Keteladanan tidak hanya bersifat personal, tetapi juga kelembagaan. Lingkungan madrasah harus mencerminkan budaya kerja dan interaksi yang mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti kedisiplinan, kejujuran, tanggung jawab, dan saling menghormati. Dalam hal ini, kepala madrasah memegang peran sentral untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, tata tertib, dan kegiatan sekolah selaras dengan semangat akhlakul karimah.

b. Pendekatan Pembiasaan (Habituation Approach)

Akhlak tidak dapat dibentuk secara instan. Nilai moral baru tertanam kuat bila dibiasakan dalam perilaku sehari-hari. Melalui pembiasaan, siswa diajak untuk menjalankan perbuatan baik secara berulang sehingga menjadi karakter. Contohnya, program tadarus Al-Qur'an sebelum belajar, kegiatan salat berjamaah, dan kebiasaan mengucapkan salam serta menjaga kebersihan madrasah.

Pembiasaan yang efektif harus konsisten dan didukung oleh lingkungan yang kondusif. Guru berperan sebagai pengingat, sedangkan teman sebaya berfungsi sebagai penguat perilaku positif. Pembiasaan juga perlu dilengkapi dengan refleksi nilai, agar siswa memahami makna moral dari kebiasaan yang dilakukan.

c. Pendekatan Nasehat dan Dialog Nilai (Mau'izhah wa Hiwar Qiyami)

Metode nasehat merupakan tradisi pendidikan yang kuat dalam Islam. Syahrul (2023) menekankan bahwa nasihat yang efektif harus disampaikan dengan kelembutan hati, ketulusan, dan berdasarkan kasih sayang. Guru yang menasehati bukan sebagai otoritas, tetapi sebagai pendamping spiritual. Selain nasehat, metode dialog nilai juga

penting. Melalui diskusi dan studi kasus, siswa diajak untuk berpikir kritis dan menilai situasi moral berdasarkan prinsip Islam. Pendekatan ini menumbuhkan kesadaran etis yang reflektif, sehingga siswa mampu membuat keputusan moral secara mandiri.

d. Pendekatan Kontekstual dan Sosial

Madrasah dapat menghubungkan pendidikan akhlak dengan konteks kehidupan nyata. Melalui kegiatan proyek sosial seperti bakti masyarakat, kampanye kebersihan, atau program solidaritas, siswa mempraktikkan nilai empati dan tanggung jawab sosial. Pendekatan kontekstual ini memperluas pendidikan akhlak dari ruang kelas ke kehidupan masyarakat, sejalan dengan konsep *rahmatan lil 'alamin*.

3. Strategi Pembelajaran Akhlak di Madrasah

Strategi pembelajaran merupakan cara praktis untuk menerapkan pendekatan-pendekatan di atas dalam kegiatan belajar mengajar. Strategi penanaman akhlak yang efektif di madrasah biasanya mencakup empat tahap: internalisasi nilai, penerapan perilaku, pembinaan melalui evaluasi, dan keteladanan guru.

a. Internalisasi Nilai (Value Internalization)

Tahap ini merupakan fondasi dalam pendidikan akhlak. Internalisasi nilai dilakukan melalui proses memahami, menghayati, dan merasakan pentingnya suatu nilai. Guru harus menciptakan suasana belajar yang mendorong siswa untuk merenungkan makna moral dalam setiap materi. Misalnya, dalam pelajaran sejarah Islam, guru tidak hanya menyampaikan fakta sejarah, tetapi juga menggali nilai keteladanan dari para tokoh.

Proses internalisasi juga dapat dilakukan melalui cerita, drama, atau video inspiratif yang mengandung pesan moral. Pengalaman emosional yang kuat akan menumbuhkan empati dan kesadaran moral yang lebih dalam.

b. Penerapan Perilaku (Value Practice)

Setelah nilai dipahami, siswa perlu diberi kesempatan untuk mempraktikkannya. Guru dapat mengadakan kegiatan seperti student moral project, yaitu tugas proyek yang mendorong siswa menerapkan nilai tertentu dalam kehidupan nyata. Misalnya, program “Satu Hari Tanpa Dusta” atau “Gerakan Peduli Sesama.”

Kegiatan ini berfungsi sebagai jembatan antara teori dan praktik,

sehingga nilai akhlak tidak berhenti di ruang kelas. Guru berperan sebagai pembimbing yang memberikan umpan balik dan penguatan positif atas perilaku baik siswa.

c. **Pembinaan dan Evaluasi Moral (Moral Coaching and Evaluation)**

Pembinaan moral memerlukan proses berkelanjutan. Evaluasi tidak dilakukan dengan angka, tetapi melalui observasi dan refleksi. Guru dapat menilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati siswa berdasarkan perilaku sehari-hari di madrasah. Bentuk evaluasi moral bisa berupa jurnal harian siswa, penilaian antar teman, atau portofolio karakter. Hal ini membantu siswa menyadari perkembangan dirinya dan menginternalisasi nilai dengan kesadaran pribadi, bukan karena tekanan eksternal.

d. **Keteladanan Guru dan Kepala Madrasah**

Dalam sistem pendidikan Islam, guru bukan hanya *mu'allim* (pengajar ilmu), tetapi juga *muaddib* (pendidik adab). Syaefudin dan Nur menekankan bahwa perilaku guru dan kepala madrasah menjadi contoh langsung bagi siswa dalam meneladani nilai-nilai Islam. Kepala madrasah yang disiplin, jujur, dan peduli pada siswa menciptakan atmosfer moral yang kuat di lingkungan sekolah.

Keteladanan ini juga harus melembaga dalam bentuk kebijakan pendidikan, seperti tata tertib berbasis nilai dan sistem penghargaan moral. Dengan demikian, madrasah menjadi komunitas belajar yang menumbuhkan nilai-nilai kebaikan secara kolektif.

4. Metode Inovatif dalam Pendidikan Akhlak Modern

Perkembangan zaman menuntut inovasi dalam metode penanaman akhlak. Emroni dan Syahrul sepakat bahwa guru madrasah perlu kreatif dalam menggunakan pendekatan modern tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman.

Beberapa metode inovatif yang relevan di era digital antara lain:

a. **Metode *Storytelling* Interaktif.**

Cerita merupakan sarana yang efektif untuk menanamkan nilai moral. Dengan dukungan teknologi digital, guru dapat menggunakan film pendek atau animasi islami sebagai media pengajaran. Cerita yang menyentuh hati mampu menanamkan nilai lebih dalam daripada ceramah.

b. Metode *Service Learning*.

Metode ini menggabungkan pembelajaran dan pelayanan sosial. Siswa dilibatkan dalam kegiatan nyata yang memberi manfaat bagi masyarakat, seperti pengumpulan donasi, pengajaran anak yatim, atau program lingkungan. Dari pengalaman tersebut, mereka belajar nilai empati, tanggung jawab, dan solidaritas.

c. Metode Reflektif dan Jurnal Nilai.

Guru dapat mengajak siswa menulis jurnal pribadi tentang pengalaman moral mereka setiap minggu. Kegiatan ini melatih kejujuran batin dan introspeksi diri. Hasil refleksi kemudian dapat didiskusikan untuk memperkuat kesadaran moral bersama.

d. Metode Kolaboratif dan *Peer Teaching*.

Dalam metode ini, siswa belajar dalam kelompok untuk menyelesaikan masalah moral tertentu. Diskusi kelompok menumbuhkan kemampuan berpikir etis dan saling menghargai pendapat. Guru bertindak sebagai fasilitator yang membimbing arah diskusi agar tetap dalam bingkai nilai Islam.

5. Integrasi Metode Akhlak dalam Budaya Madrasah

Penanaman akhlak di madrasah tidak akan berhasil jika hanya terbatas pada ruang kelas atau kegiatan formal. Akhlak harus diintegrasikan dalam seluruh aspek kehidupan madrasah, termasuk budaya organisasi, interaksi sosial, dan kebijakan lembaga. Dengan demikian, madrasah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai lingkungan moral yang hidup di mana nilai-nilai Islam menjadi bagian dari keseharian seluruh warga sekolah.

Penanaman akhlak yang efektif membutuhkan ekosistem pendidikan yang berlandaskan nilai. Kurikulum, kegiatan, dan kebijakan madrasah harus berorientasi pada pembentukan karakter. Misalnya, budaya saling menyapa, menghormati guru, dan menjaga kebersihan bukan sekadar aturan kedisiplinan, tetapi merupakan bentuk konkret pendidikan akhlak yang terinternalisasi. Budaya madrasah berbasis nilai dapat dibangun melalui tiga langkah strategis: internalisasi nilai, institusionalisasi praktik moral, dan inkulturasi kebiasaan positif. Pertama, internalisasi dilakukan dengan menanamkan kesadaran nilai kepada seluruh warga madrasah. Kedua, institusionalisasi berarti menerapkan nilai

tersebut dalam peraturan dan kegiatan sekolah. Ketiga, inkulturasi adalah proses menjadikan nilai itu sebagai budaya bersama yang dijalankan tanpa paksaan.

Dalam praktiknya, integrasi nilai dapat dilakukan melalui program harian seperti shalat dhuha berjamaah, pembiasaan dzikir pagi, gerakan literasi Qur'an, serta program sosial seperti Madrasah Peduli Lingkungan. Kegiatan-kegiatan tersebut menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian sosial melalui pengalaman langsung.

Lingkungan madrasah yang kondusif juga berperan penting. Kepala madrasah harus menciptakan suasana yang menumbuhkan rasa aman, kebersamaan, dan saling menghormati. Ketika siswa merasa dihargai, mereka lebih mudah menerima nilai-nilai moral yang diajarkan. Sebaliknya, lingkungan yang keras dan otoriter justru menumbuhkan sikap penolakan terhadap pendidikan nilai.

6. Peran Guru dan Kepala Madrasah dalam Manajemen Nilai

Guru dan kepala madrasah memiliki posisi strategis sebagai “agen moral” dalam sistem pendidikan Islam. Mereka bukan sekadar pelaksana kurikulum, melainkan pembentuk budaya nilai. Dalam Kepemimpinan Pendidikan ditegaskan bahwa efektivitas penanaman akhlak sangat bergantung pada sejauh mana pemimpin lembaga dan guru mampu menampilkan keteladanan dalam keseharian.

a. Guru sebagai Teladan dan Fasilitator Nilai

Guru di madrasah idealnya menjadi sosok yang menampilkan nilai akhlak dalam ucapan, tindakan, dan keputusan. Guru sebagai “cermin moral” perilakunya akan menjadi standar etika bagi siswa. Ketika guru bersikap disiplin, sabar, dan adil, nilai-nilai itu secara tidak langsung ditiru oleh siswa.

Selain keteladanan, guru juga berfungsi sebagai fasilitator nilai. Ia membantu siswa memahami makna moral dari setiap tindakan. Dalam proses pembelajaran, guru dapat menggunakan pendekatan reflektif, mengajak siswa menilai tindakan mereka, serta berdialog tentang dilema etis. Melalui pendekatan ini, siswa belajar berpikir kritis sekaligus berperilaku etis.

Guru juga berperan sebagai penguat karakter melalui *positive reinforcement*. Sikap siswa yang baik perlu dihargai, bukan hanya secara simbolik tetapi dengan umpan balik moral, misalnya dengan pujian yang menekankan nilai: “Kamu sudah menunjukkan amanah,” atau “Tindakanmu mencerminkan kasih sayang.”

b. Kepala Madrasah sebagai Pemimpin Moral dan Budaya

Kepala madrasah merupakan figur sentral dalam menciptakan iklim moral lembaga. Konsep *value-based leadership* kepemimpinan yang menekankan visi moral, keteladanan, dan pembinaan nilai di seluruh lini organisasi (Jahari & Rusdiana, 2020).

Kepala madrasah tidak hanya bertugas mengatur administrasi, tetapi juga menumbuhkan budaya organisasi yang berlandaskan akhlak. Ia harus mampu mengintegrasikan nilai Islam dalam setiap kebijakan, seperti sistem evaluasi, tata tertib, hingga penghargaan guru dan siswa.

Selain itu, kepala madrasah berperan sebagai inspirator spiritual. Ia menjadi penggerak semangat religius di lingkungan sekolah, menjaga kemurnian niat seluruh warga madrasah agar bekerja karena Allah Swt, bukan sekadar formalitas. Kepemimpinan seperti ini akan menciptakan komunitas pendidikan yang hidup dengan nilai, bukan sekadar beroperasi secara administratif.

7. peran lingkungan sosial dan keluarga dalam Penanaman Akhlak

Pendidikan akhlak tidak akan berhasil tanpa dukungan lingkungan sosial dan keluarga. Madrasah hanyalah satu komponen dari sistem pendidikan moral yang lebih luas. Keluarga adalah lingkungan pendidikan pertama dan utama bagi anak, sementara masyarakat menjadi ruang penguatan nilai. Keberhasilan pendidikan akhlak di madrasah sangat dipengaruhi oleh kesinambungan nilai antara sekolah dan rumah. Jika siswa mendapat nilai moral yang kuat di madrasah tetapi tidak diperkuat di rumah, maka hasilnya tidak akan optimal. Oleh karena itu, madrasah perlu membangun komunikasi dan kerja sama yang intensif dengan orang tua melalui program parenting Islami, pertemuan wali santri, dan forum silaturahmi nilai.

Lingkungan sosial yang positif juga menjadi pendukung utama. Emroni mencontohkan kegiatan kemasyarakatan seperti gotong royong,

zakat, sedekah, dan kerja bakti sebagai sarana internalisasi nilai sosial dan spiritual. Dengan melibatkan siswa dalam kegiatan sosial, madrasah menanamkan akhlak kolektif yang memperkuat kepedulian dan rasa tanggung jawab.

Madrasah juga dapat bekerja sama dengan masyarakat lokal, lembaga keagamaan, dan organisasi sosial dalam membentuk jaringan pendidikan karakter. Sinergi ini menciptakan sistem yang saling menopang, sehingga pendidikan akhlak tidak berhenti di tembok sekolah, tetapi menjadi gerakan moral yang berkelanjutan.

8. Evaluasi dan Penguatan Berkelanjutan

Evaluasi pendidikan akhlak bukan hanya menilai hasil akhir, menyebut pentingnya *continuous character assessment* penilaian karakter yang dilakukan secara berkala dan menyeluruh. Evaluasi ini menilai dimensi sikap, kebiasaan, tanggung jawab, dan kedisiplinan melalui observasi langsung maupun catatan reflektif guru.

Tiga model evaluasi karakter di madrasah:

1. **Evaluasi formatif**, untuk memantau perkembangan perilaku selama proses pembelajaran.
2. **Evaluasi sumatif**, untuk menilai konsistensi perilaku baik dalam jangka panjang.
3. **Evaluasi reflektif**, untuk mengajak siswa merenungkan perubahan moral dalam dirinya.

Selain evaluasi, penguatan nilai harus dilakukan secara berkelanjutan. Guru dan kepala madrasah perlu mengadakan kegiatan *character reinforcement*, seperti penghargaan akhlak bulanan, lomba keteladanan siswa, atau *student character journal*. Kegiatan ini berfungsi untuk menjaga motivasi moral siswa dan memperkuat budaya akhlak madrasah.

C. Peran Guru dan Kepala Madrasah dalam Pendidikan Akhlak

1. Dimensi Kepemimpinan Moral dalam Pendidikan Islam

Dalam pandangan Islam, pendidikan tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan akal, tetapi juga untuk membentuk kepribadian yang berakhlak mulia. Madrasah, sebagai lembaga pendidikan bercirikan Islam, memiliki tanggung jawab yang tidak hanya administratif, tetapi juga moral. Oleh karena itu, peran guru dan kepala madrasah menjadi sangat strategis sebagai ujung tombak dalam menghidupkan nilai-nilai akhlak dalam setiap aspek kegiatan pendidikan.

Guru dan kepala madrasah bukan sekadar pengelola proses belajar-mengajar, melainkan pemimpin moral (*moral leaders*) yang harus menunjukkan integritas, keteladanan, dan keikhlasan dalam mendidik. Pendidikan akhlak tidak akan memiliki makna jika pendidik sendiri gagal menjadi contoh dalam perilaku dan spiritualitas. Dalam konteks ini, guru dan kepala madrasah bertindak sebagai penggerak nilai bukan hanya pengajar, melainkan pembimbing moral yang menuntun siswa menuju insan beradab (insan kamil).

Pendidikan Islam sejati terwujud ketika lembaga pendidikan menjadi pusat pembudayaan nilai. Maka dari itu, guru dan kepala madrasah tidak boleh hanya mengajar akhlak sebagai teori, tetapi menjadikannya napas dari seluruh kegiatan madrasah. Tanpa keteladanan moral di antara para pendidik, seluruh program kurikulum akhlak akan kehilangan ruhnya.

2. Peran Guru sebagai Pendidik Akhlak

Peran guru dalam pendidikan akhlak menempati posisi paling fundamental. Guru bukan hanya penyampai ilmu (*mu'allim*), tetapi juga pembina spiritual (*murabbi*) dan pengarah adab (*muaddib*). Dalam sejarah pendidikan Islam, keberhasilan pembentukan karakter generasi Muslim tidak pernah lepas dari keteladanan guru yang mengajarkan dengan hati, bukan sekadar dengan metode.

a. Guru sebagai Teladan Moral (*Uswah Hasanah*)

Keteladanan adalah metode pendidikan yang paling efektif dalam menanamkan akhlak. Emroni (2023) menegaskan bahwa “perilaku

guru merupakan kurikulum hidup” siswa belajar lebih banyak dari sikap dan tutur kata guru dibandingkan dari buku teks. Guru yang jujur, sabar, dan disiplin secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai tersebut dalam diri peserta didik.

Di madrasah, guru menjadi contoh dalam hal spiritualitas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan interaksi sosial. Ketika guru menegur dengan lemah lembut, memberi contoh salat tepat waktu, atau memperlakukan siswa dengan adil, maka nilai-nilai Islam menjadi konkret dan dapat dirasakan. Sebaliknya, guru yang bersikap keras, tidak konsisten, atau berkata kasar akan meruntuhkan kredibilitas moral pendidikan akhlak.

b. Guru sebagai Fasilitator Nilai (*Moral Facilitator*)

Selain menjadi teladan, guru juga berperan sebagai fasilitator nilai. Ia membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai akhlak melalui pembelajaran reflektif. Guru tidak sekadar menyampaikan materi moral, tetapi membimbing siswa merenungkan makna di balik tindakan baik. Metode seperti diskusi etis, studi kasus, dan pembelajaran kontekstual dapat digunakan untuk menumbuhkan kesadaran moral yang kritis.

Syahrul mencontohkan model *dialog nilai* yang diterapkan di beberapa madrasah modern, di mana siswa diajak membahas dilema moral berdasarkan prinsip Islam. (Mufida et al., 2020) Misalnya, bagaimana bersikap jujur dalam ujian, atau bagaimana menanggapi teman yang berbuat salah. Kegiatan ini membuat siswa memahami bahwa akhlak bukan sekadar aturan, tetapi proses berpikir dan memilih yang baik secara sadar.

c. Guru sebagai Pembimbing Spiritual (*Murabbi Ruhani*)

Dalam pendidikan akhlak, guru juga berfungsi sebagai pembimbing ruhani yang menuntun peserta didik untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Guru yang berperan sebagai *murabbi ruhani* tidak hanya mengajarkan ibadah, tetapi menumbuhkan kesadaran spiritual dalam hati siswa. Melalui pembiasaan dzikir, doa bersama, dan refleksi nilai, siswa belajar mengaitkan setiap tindakan dengan tanggung jawab moral kepada Allah.

Emroni menegaskan bahwa pembinaan spiritual harus menjadi inti dari seluruh kegiatan pembelajaran akhlak, karena akhlak sejati tumbuh dari hati yang bersih dan kesadaran ilahiah. Dengan bimbingan

spiritual, siswa tidak hanya tahu mana yang benar dan salah, tetapi juga mencintai kebenaran dan menjauhi keburukan karena dorongan iman.

d. Guru sebagai Pengembang Lingkungan Moral

Guru berperan penting dalam menciptakan *iklim moral* di kelas dan di lingkungan madrasah. Ia mengatur interaksi yang penuh hormat, menanamkan etika dalam komunikasi, dan memastikan bahwa setiap kegiatan pembelajaran mengandung dimensi nilai. Dengan demikian, ruang kelas menjadi miniatur masyarakat Islam, tempat siswa belajar etika sosial seperti menghargai pendapat, menolong sesama, dan berperilaku sopan.

Guru yang berhasil membangun lingkungan moral akan menghasilkan siswa yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berempati. Inilah bentuk pendidikan akhlak yang sesungguhnya membentuk kebiasaan baik melalui contoh nyata dan suasana yang mendukung.

3. Peran Kepala Madrasah dalam Pembinaan Akhlak

Kepala madrasah merupakan figur kunci dalam menentukan arah moral lembaga. Ia bukan hanya manajer administratif, tetapi pemimpin spiritual yang bertanggung jawab atas kultur nilai di seluruh satuan pendidikan.

a. Kepala Madrasah sebagai Pemimpin Moral (*Moral Leader*)

Syaefudin dan Nur (2020) menjelaskan bahwa kepemimpinan madrasah yang berhasil adalah yang berlandaskan nilai. Kepala madrasah harus menjadi *moral leader* yang mampu menginspirasi guru dan siswa melalui keteladanan, bukan instruksi. Ia harus menunjukkan integritas, konsistensi, dan kesederhanaan dalam bertindak, sehingga setiap kebijakan lembaga memiliki dasar etis.

Kepala madrasah berperan membangun sistem nilai yang terintegrasi ke dalam kebijakan, mulai dari visi misi sekolah, kurikulum, hingga sistem penghargaan. Misalnya, penghargaan kepada siswa bukan hanya berdasarkan prestasi akademik, tetapi juga keteladanan moral.

b. Kepala Madrasah sebagai Penggerak Budaya Nilai

Budaya madrasah yang kuat akan memperkuat pendidikan akhlak. Kepala madrasah bertugas menciptakan *school value culture*, yaitu budaya organisasi yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kasih sayang.

Pembentukan budaya nilai dapat dilakukan melalui kegiatan

keagamaan rutin, pembinaan karakter guru, dan pembiasaan kolektif seperti salat berjamaah dan program sosial. Kepala madrasah juga harus melibatkan seluruh elemen madrasah — guru, siswa, dan staf agar nilai-nilai moral menjadi bagian dari kebersamaan, bukan sekadar aturan dari atas.

c. Kepala Madrasah sebagai Pembina dan Motivator Guru

Kepemimpinan moral juga diwujudkan dalam pembinaan terhadap guru. Kepala madrasah harus menjadi motivator spiritual yang menginspirasi guru untuk mendidik dengan hati. Melalui pelatihan nilai, mentoring, dan dialog etis, kepala madrasah dapat memperkuat integritas moral para pendidik.

Model *value mentoring*, yaitu pembinaan berkala bagi guru untuk mengembangkan kesadaran spiritual dan etika profesional. Dengan pembinaan ini, guru tidak hanya kompeten secara akademik, tetapi juga stabil secara emosional dan religius.

d. Kepala Madrasah sebagai Visioner dan Inovator Nilai

Kepala madrasah yang visioner mampu menyesuaikan pendidikan akhlak dengan tantangan zaman tanpa menghilangkan prinsip Islam. Di era digital, ia perlu mendorong pemanfaatan teknologi sebagai sarana pembinaan nilai seperti platform pembelajaran karakter, jurnal refleksi daring, atau kampanye nilai melalui media sosial madrasah. Inovasi semacam ini tidak hanya membuat pendidikan akhlak lebih relevan, tetapi juga menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diaktualisasikan secara kreatif di tengah modernitas.

4. Sinergi Guru dan Kepala Madrasah dalam Sistem Pendidikan Akhlak

Pendidikan akhlak yang berhasil membutuhkan kolaborasi erat antara guru dan kepala madrasah. Guru menanamkan nilai melalui pembelajaran langsung, sementara kepala madrasah mengokohkan nilai melalui kebijakan dan budaya organisasi. Kedua peran ini saling melengkapi dan memperkuat. Pentingnya membangun *moral partnership*, yaitu kerja sama moral antara pemimpin dan pendidik. Komunikasi yang terbuka dan berbasis nilai akan menciptakan keharmonisan dan semangat kolektif dalam mengembangkan akhlak siswa.

Selain itu, sinergi juga dibangun melalui forum reflektif seperti halaqah akhlak bagi guru dan kepala madrasah. Forum ini berfungsi untuk mengevaluasi program moral, berbagi pengalaman, dan memperbarui komitmen spiritual. Dengan sinergi yang kuat, madrasah akan menjadi lembaga pembinaan karakter yang berkelanjutan.

5. Tantangan dan Strategi Penguatan Peran Pendidik

Dalam implementasinya, guru dan kepala madrasah menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal.

a. Tantangan Internal

- Beban administrasi yang berat sering kali mengurangi ruang guru untuk fokus pada pembinaan moral.
- Kurangnya pelatihan khusus tentang pendidikan akhlak dan etika profesional.
- Keterbatasan waktu dan fasilitas untuk kegiatan pembinaan spiritual.

b. Tantangan Eksternal

- Pengaruh budaya populer dan media sosial yang sering kali bertentangan dengan nilai Islam.
- Krisis keteladanan publik di lingkungan masyarakat dan media.
- Arus globalisasi yang menumbuhkan individualisme dan materialisme.

c. Strategi Penguatan

Untuk menjawab tantangan tersebut, beberapa strategi yang disarankan oleh Emroni dan Syahrul antara lain:

- **Pelatihan nilai (value training)** bagi guru dan kepala madrasah secara rutin.
- **Pembentukan komunitas belajar akhlak** antarpendidik (*teacher learning community*).
- **Kegiatan pembinaan ruhani** seperti *retreat spiritual*, *halaqah tarbawiyah*, dan pembacaan kitab akhlak.
- **Integrasi evaluasi moral** dalam sistem penilaian siswa dan guru.

Dengan strategi ini, guru dan kepala madrasah dapat mempertahankan stamina moral di tengah perubahan zaman.

Guru dan kepala madrasah merupakan dua pilar utama dalam pendidikan akhlak di madrasah. Guru menanamkan nilai melalui keteladanan dan pembelajaran, sedangkan kepala madrasah meneguhkan nilai melalui kebijakan dan budaya.

Keduanya harus memiliki visi yang sama: menjadikan madrasah bukan sekadar tempat belajar, tetapi komunitas moral yang hidup. Ketika guru mengajar dengan hati dan kepala madrasah memimpin.

BAB 6

TANTANGAN DAN PROSPEK PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KEPEMIMPINAN ISLAMI

Perkembangan zaman yang ditandai oleh globalisasi(Widianti, 2022), revolusi teknologi, serta arus informasi yang sangat cepat telah membawa perubahan signifikan terhadap pola hidup, budaya, dan struktur sosial masyarakat muslim. Di satu sisi, globalisasi membuka akses terhadap pengetahuan luas dan memperluas jaringan interaksi lintas budaya; di sisi lain, gelombang nilai dan budaya asing yang masuk tanpa seleksi dapat membawa dampak negatif terhadap stabilitas moral dan identitas keislaman umat. Fenomena krisis moral termasuk lemahnya kejujuran, penurunan etika sosial, hilangnya rasa tanggung jawab, serta meningkatnya sikap konsumtif dan individualistis semakin nyata terjadi di kalangan generasi muda di banyak masyarakat muslim. Situasi ini menuntut upaya sistematis untuk mempertahankan dan menguatkan akhlak sebagai fondasi karakter dan kepemimpinan Islami(Khobir, 2009).

Dalam pendidikan Islam, khususnya pendidikan akhlak mendapat tekanan ganda: harus mampu menjaga tradisi nilai Islami dan sekaligus relevan dengan dinamika zaman. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, serta pendidikan agama di sekolah umum,

menghadapi tantangan dalam menyusun kurikulum dan metode yang mampu menjawab kebutuhan zaman tanpa mengorbankan substansi moral dan spiritual. Banyak penelitian menunjukkan bahwa tanpa reformasi dan adaptasi, sistem pendidikan agama cenderung kalah bersaing dengan arus sekularisasi, dan nilai-nilai akhlak mudah tergerus oleh efek globalisasi.

Namun demikian, di tengah tantangan tersebut terdapat peluang besar. Pendidikan akhlak yang dikelola dengan baik memiliki potensi untuk membentuk generasi pemimpin Islami yang tidak hanya cakap dalam pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga memiliki integritas moral, kepekaan sosial, dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan, amanah, dan maslahat umat. Dengan pendekatan holistik menggabungkan pendidikan agama, akhlak, intelektual, dan sosial. Sistem pendidikan Islam dapat menjadi benteng moral umat di era modern.

Tantangan moral di era globalisasi sering kali berkaitan pula dengan krisis identitas dan kecenderungan individualisme. Globalisasi membawa kemudahan akses informasi dan gaya hidup yang heterogen; tanpa bimbingan nilai, individu khususnya kaum muda rentan kehilangan arah dan terjebak dalam kultur yang kontradiktif dengan prinsip Islam. Oleh karena itu, pendidikan akhlak di institusi Islam harus hadir tidak sekadar sebagai materi tambahan, melainkan sebagai landasan karakter dan identitas Muslim yang utuh.

Pada saat yang sama, keberadaan madrasah dan lembaga pendidikan Islam lainnya menawarkan harapan. Madrasah, ketika dikelola dengan baik, dapat menjadi ruang pembentukan akhlak, spiritualitas, dan kepemimpinan Islami. Dengan memasukkan kurikulum yang memadukan pendidikan agama, moral, sosial, dan pengetahuan umum, madrasah berpeluang mencetak lulusan yang mampu bersaing secara global, namun tetap kokoh secara moral dan religius. Beberapa penelitian kontemporer menekankan strategi integrasi nilai-nilai Islami dengan ilmu pengetahuan modern sebagai bagian dari revitalisasi pendidikan Islam.

Visi pendidikan akhlak di era modern ini tidak hanya tertuju pada pembentukan individu yang taat agama, tetapi juga pada pembentukan pemimpin masa depan pemimpin yang memiliki karakter mulia, beretika, dan mampu mengemban amanah. Kepemimpinan Islami sejati, berdasarkan tradisi para sahabat Nabi dan nilai-nilai Qur'ani menuntut integritas, keadilan, tanggung jawab, dan keteladanan. Pendidikan akhlak

yang kuat dapat menjadi pondasi utama untuk melahirkan pemimpin demikian, yang tidak hanya menguasai pengetahuan, tetapi hidup dan bertindak sesuai nilai keislaman.

Namun, transformasi pendidikan akhlak bukan tanpa rintangan. Tantangan mulai dari kurangnya kualitas tenaga pendidik, kurikulum yang terlalu kognitif dan kurang memadai dalam aspek karakter, keterbatasan fasilitas, hingga persepsi masyarakat terhadap relevansi madrasah di era modern semua itu perlu dihadapi dengan perencanaan strategis. Tanpa pembenahan struktural dan komitmen kolektif, upaya pendidikan akhlak dapat kehilangan efektivitasnya. Karena itu, diperlukan strategi yang sistematis dan komprehensif untuk menguatkan pendidikan akhlak di lembaga pendidikan Islam. Strategi ini harus mencakup pembaruan kurikulum, pelatihan guru, integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan, penerapan metode pengajaran kontekstual, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, madrasah dan lembaga Islam lainnya dapat berfungsi sebagai pusat pembentukan karakter, moral, dan kepemimpinan tidak hanya untuk rumah tangga atau komunitas lokal, tetapi juga dalam skala nasional dan global.

Urgensi bagi umat Islam untuk memperkuat pendidikan akhlak sebagai fondasi pembentukan generasi dan pemimpin masa depan. Di tengah tekanan arus globalisasi dan modernitas, pendidikan akhlak bukan sekadar pilihan, melainkan kebutuhan strategis untuk menjaga identitas, moralitas, dan kekokohan komunitas. Dalam bab-bab selanjutnya, tema ini akan diurai melalui tiga sub-bab: (A) Krisis Moral dan Tantangan Kepemimpinan di Era Globalisasi; (B) Prospek Pendidikan Akhlak di Madrasah; dan (C) Strategi Penguatan Pendidikan Akhlak untuk Mencetak Pemimpin Islami dengan analisis mendalam dan rekomendasi berbasis literatur.

A. Krisis Moral dan Tantangan Kepemimpinan di Era Globalisasi

Gelombang globalisasi telah membawa transformasi besar dalam kehidupan umat manusia, tidak hanya pada aspek ekonomi dan teknologi, tetapi juga dalam pola pikir dan sistem nilai. Perubahan yang berlangsung begitu cepat ini menyebabkan terjadinya gesekan antara nilai-nilai lokal

dengan budaya global yang masuk melalui berbagai saluran, terutama media digital. Akibatnya, masyarakat terutama generasi muda menghadapi tantangan besar dalam menjaga integritas moral di tengah derasnya arus modernitas. Krisis etika, menurunnya rasa tanggung jawab sosial, serta melemahnya komitmen terhadap nilai-nilai spiritual adalah sebagian dari gejala yang muncul seiring terbukanya akses informasi tanpa batas (Maesak et al., 2025).

Dalam iklim sosial yang terus berubah ini, kepemimpinan yang berakar pada prinsip Islami menghadapi tantangan serius. Pemimpin tidak lagi cukup hanya memahami administrasi atau pengambilan keputusan teknis, tetapi juga harus memiliki kapasitas untuk menjaga arah moral masyarakat. Ketika akhlak publik mengalami kemunduran, para pemimpin berkewajiban menjadi teladan dan pengarah bagi lingkungan sosialnya. Kepemimpinan yang gagal menanamkan nilai kebaikan akan berakibat pada terciptanya sistem yang lemah dalam prinsip, meskipun kuat dalam struktur.

Pendidikan menjadi pilar penting dalam menghadapi disrupsi nilai akibat globalisasi. Namun dalam praktiknya, lembaga pendidikan Islam kerap terkendala dalam merespons kebutuhan zaman. Kurikulum yang terlalu menekankan aspek kognitif sering kali kurang berhasil membentuk karakter peserta didik secara menyeluruh. Di sisi lain, pengaruh budaya populer yang menitikberatkan pada kebebasan dan kesenangan instan telah merusak orientasi moral banyak kalangan. Dalam konteks ini, pendidikan akhlak harus dirancang sebagai proses pembentukan pribadi yang utuh yang tidak hanya memahami nilai, tetapi juga menjadikannya pedoman dalam kehidupan.

Selain itu, penetrasi budaya asing ke dalam kehidupan sehari-hari telah menciptakan standar nilai baru yang kerap bertentangan dengan etika Islam. Norma-norma yang dulunya dijunjung tinggi kini dianggap konservatif atau tidak relevan. Hal ini membuat sebagian kalangan muda mengalami disorientasi identitas dan kebingungan moral. Dalam suasana seperti ini, dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya berwibawa secara struktural, tetapi juga mampu menunjukkan keutuhan pribadi dan konsistensi dalam mempraktikkan nilai-nilai keislaman (Putra, 2025).

Akibat dari lemahnya pondasi moral ini terasa dalam berbagai aspek kehidupan publik. Fenomena seperti penyalahgunaan kekuasaan,

lemahnya kejujuran dalam birokrasi, serta hilangnya kepekaan terhadap masalah sosial mencerminkan gagalnya banyak tokoh publik dalam menjunjung amanah yang melekat pada tanggung jawab kepemimpinan. Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin tidak hanya bertugas mengatur, tetapi juga membimbing umat menuju kebaikan dan keadilan.

Menghadapi kondisi tersebut, pendidikan moral tidak boleh dipandang sebagai pelengkap, melainkan sebagai inti dari pembangunan sumber daya manusia. Setiap institusi pendidikan, khususnya yang berbasis Islam, perlu mereformasi pendekatannya agar mampu mencetak generasi yang tangguh secara etika dan adaptif terhadap perubahan zaman. Pelibatan keluarga dan lingkungan masyarakat juga menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pendidikan karakter yang komprehensif (Indriawati et al., 2025).

Selain lembaga pendidikan, peran tokoh agama, komunitas dakwah, dan organisasi sosial berbasis nilai Islam juga sangat dibutuhkan untuk menanamkan kesadaran akan pentingnya hidup yang bermartabat. Pemberdayaan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari harus dilakukan secara konsisten, baik melalui keteladanan maupun edukasi yang bersifat praktis dan kontekstual. Dengan demikian, resistensi terhadap pengaruh negatif globalisasi dapat dibangun dari bawah, bukan semata melalui kebijakan formal.

Kepemimpinan Islami yang dirindukan dalam era ini adalah kepemimpinan yang berpijak pada nilai dan berorientasi pada keberkahan, bukan semata-mata keberhasilan material. Untuk mencapainya, diperlukan sistem pembinaan karakter sejak usia dini, yang menjadikan akhlak sebagai bagian tak terpisahkan dari seluruh proses pendidikan dan kepemimpinan. Tanpa itu, bangsa dan umat akan mudah kehilangan arah meskipun tampak kuat dalam hal fisik dan teknologi.

Tantangan moral dalam era globalisasi adalah nyata dan kompleks. Solusinya tidak dapat dijawab dengan pendekatan parsial, tetapi menuntut kolaborasi antara pendidikan, kepemimpinan, keluarga, dan komunitas. Pendidikan akhlak menjadi harapan utama dalam membentuk pemimpin masa depan yang mampu berdiri teguh di atas nilai, bukan sekadar mengikuti arus.

B. Prospek Pendidikan Akhlak di Madrasah

Madrasah sebagai institusi pendidikan Islam memiliki potensi besar menjadi pusat pembentukan karakter dan akhlak bagi generasi muda muslim. Di tengah tantangan moral dan budaya global seperti yang telah dibahas sebelumnya, madrasah menawarkan ruang yang ideal untuk menanamkan nilai-nilai spiritual dan etika secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan. Perpaduan antara pembelajaran agama, praktik ibadah, dan pembiasaan moral dalam lingkungan madrasah bisa menghasilkan individu bukan sekadar cerdas kognitif, tetapi juga matang secara moral dan spiritual, menjadikannya harapan masa depan dalam kepemimpinan Islami.

Studi terkini menunjukkan bahwa saat madrasah berhasil menerapkan pendidikan akhlak secara terintegrasi melalui kurikulum, pembiasaan sehari-hari, dan keteladanan guru, akan berdampak terhadap karakter siswa secara signifikan. Misalnya, penelitian terhadap lembaga madrasah menunjukkan bahwa internalisasi nilai-nilai Islam seperti amanah, kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab dapat membentuk perilaku positif: rasa hormat terhadap guru dan orang tua, kesadaran sosial, serta pemahaman moral dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas seperti pengajian, shalat berjamaah, dzikir, muhadarah, dan belajar integratif (agama dalam kehidupan) menjadi metode efektif untuk membendung pengaruh negatif luar maupun kecenderungan moral yang rapuh.

Peluang pendidikan akhlak di madrasah makin terbuka seiring upaya adaptasi dengan perkembangan zaman. Banyak madrasah kini bertransformasi tidak hanya mengajarkan ilmu agama klasik, tetapi juga mengintegrasikan kurikulum umum dan nilai-nilai karakter, sehingga lulusannya siap menghadapi tantangan dunia modern tanpa kehilangan identitas dan moralitas. Transformasi ini memberi harapan bahwa madrasah bisa menjadi jembatan antara tradisi pendidikan Islam dan tuntutan kontemporer menghasilkan generasi bermoral, berilmu, dan relevan dengan dinamika global.

Madrasah juga berpotensi memainkan peran sosial yang signifikan, tidak hanya mendidik individu, tetapi membentuk komunitas berkarakter, yang kemudian menjadi sumber pemimpin Islami yang berintegritas dan

bertanggung jawab. Sebagai lembaga pendidikan yang menggabungkan aspek religius, akademik, dan karakter, madrasah dapat mendidik siswa yang tidak hanya unggul dalam prestasi intelektual, tetapi juga memiliki komitmen terhadap keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umat kualitas yang sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan masa kini.

Penelitian empiris menggarisbawahi urgensi peran guru, kepala madrasah, serta lingkungan sekolah sebagai teladan moral. Kepemimpinan dalam madrasah terutama oleh pendidik dan staf sangat mempengaruhi internalisasi nilai akhlak siswa. Apabila guru berperilaku sebagai teladan dan menerapkan nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari, maka pendidikan karakter bukan hanya teori di kelas, tetapi menjadi bagian dari budaya sekolah yang menjiwai (Ridho & Siahaan, 2025). Sebaliknya, keberhasilannya tidak otomatis. Tantangan seperti keterbatasan kompetensi guru dalam pendidikan karakter, kekurangan bahan ajar kontekstual, serta ketidakselarasan antara kurikulum agama dan kurikulum umum bisa menjadi batu sandungan terutama di madrasah yang belum bertransformasi atau kekurangan sumber daya. Oleh sebab itu, dibutuhkan komitmen kuat dari seluruh pemangku kepentingan guru, manajemen madrasah, orang tua, dan masyarakat untuk menjadikan pendidikan akhlak sebagai bagian integral dan berkelanjutan dari proses pendidikan.

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan modernitas, madrasah perlu mengadaptasi metode pembelajaran agar relevan dengan perkembangan zaman: misalnya dengan mengombinasikan pendidikan agama, karakter, dan pengetahuan umum; memanfaatkan teknologi dan media modern; serta mengajarkan keterampilan hidup dan nilai sosial agar lulusan siap menghadapi dunia nyata. Pendekatan ini memungkinkan madrasah tetap menjaga jati diri Islam, sembari mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan kontemporer.

Dengan demikian, prospek pendidikan akhlak di madrasah dapat dikatakan sangat potensial asalkan dilaksanakan dengan niat dan komitmen yang sungguh-sungguh, metode yang tepat, serta sinergi antara pendidikan formal, keluarga, dan masyarakat. Madrasah berpeluang menjadi fondasi bagi kebangkitan moral dan spiritual umat, serta ladang regenerasi pemimpin Islami yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas dan peduli terhadap maslahat umat.

C. Strategi Penguatan Pendidikan Akhlak untuk Mencetak Pemimpin Islami

Upaya mencetak pemimpin Islami yang berakhlak mulia memerlukan strategi pendidikan akhlak yang sistematis, komprehensif, dan relevan dengan tantangan zaman. Berdasarkan tradisi intelektual Islam klasik, terutama pemikiran Ibnu Miskawaih dan Al-Ghazali, dapat dirumuskan beberapa strategi utama yang bila diterapkan dengan konsisten memiliki potensi besar membentuk karakter kepemimpinan Islami sejati.

1. Landasan Filosofis Mengenai Pemurnian Jiwa dan Pembentukan Karakter Seimbang

Menurut Ibnu Miskawaih pendidikan akhlak harus diawali dengan proses pemurnian jiwa (*tazkiyah an-nafs*) agar potensi moral individu bisa tumbuh secara alami. Dalam kerangka ini, manusia bukan sekadar kumpulan pengetahuan atau kemampuan, melainkan makhluk rohani-jasmani yang jiwa dan kesadarannya mempengaruhi perilaku. Tujuan pendidikan adalah membentuk “karakter mulia” (*akhlakul karimah*) yang menjadi landasan perilaku sehari-hari (Ramli & Zamzami, 2022).

Ibnu Miskawaih menegaskan bahwa akhlak yang baik bukanlah bawaan, melainkan hasil dari latihan berulang, disiplin diri, dan pembentukan karakter sejak dini. Ia menyatakan bahwa manusia dilahirkan seperti sehelai kertas putih, dan akhlak baik harus dibentuk melalui lingkungan, pendidikan, dan pengalaman yang konstruktif (Handal Pratama Putra, 2019).

"Tidak ada orang yang dilahirkan dengan akhlak yang mulia; akhlak yang baik harus dipelajari dan dilatih seperti seni."

Ini menjadi dasar bagi pendekatan pendidikan yang proaktif dalam membentuk anak-anak menjadi pribadi yang berakhlak mulia.

Al-Ghazali melengkapi gagasan Miskawaih melalui karyanya *Ihya' 'Ulum al-Din*, di mana ia menguraikan makna moral dari memelihara jati diri dan menciptakan masyarakat yang beretika. Pendekatan Al-Ghazali terhadap pendidikan moral melibatkan *tazkiyat al-nafs*, atau penyucian jiwa, yang menurutnya merupakan hal mendasar bagi perjalanan spiritual setiap Muslim (Arif et al., 2022). Menurut Al-Ghazali akhlak yang baik

bukan sekadar pengetahuan tentang baik-buruk, melainkan yang tertanam dalam jiwa, sehingga tindakan baik menjadi spontan dan konsisten tanpa paksaan. Dengan demikian, strategi pendidikan akhlak harus menekankan internalisasi nilai melalui latihan batin bukan hanya sekadar pembelajaran teoritis agar akhlak menjadi karakter, bukan sekadar pengetahuan.

2. Integrasi Kurikulum Dengan Menggabungkan Ilmu Dunia dan Akhlak

Ibnu Miskawaih dan Al-Ghazali adalah dua tokoh penting dalam filsafat Islam, terutama dalam kontribusi mereka terhadap pendidikan moral dan konsep pemurnian karakter. Kedua filsuf ini menekankan pengembangan jiwa dan pengembangan kebajikan yang diperlukan untuk membangun karakter yang seimbang. Karya-karya mereka memberikan landasan untuk memahami perilaku etis melalui perspektif spiritualitas dan moralitas, yang merupakan inti dari pemikiran Islam.

Salah satu kelemahan pendidikan saat ini adalah pemisahan antara pendidikan “akademik/teknis” dan “karakter”. Berdasarkan wawasan dari tradisi klasik, pendidikan Islami idealnya memadukan ilmu dunia dan pendidikan akhlak menjadikan akhlak sebagai landasan etis seluruh aktivitas intelektual dan profesional. Menurut analisis kontemporer terhadap pemikiran Ibnu Miskawaih, integrasi semacam ini relevan untuk menghasilkan generasi seimbang antara pengetahuan, moralitas, dan spiritualitas.

Implementasi integrasi tersebut dapat dilakukan melalui perancangan kurikulum madrasah atau lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama dan moral, tetapi juga ilmu dunia (sains, sosial, humaniora) sambil selalu menanamkan nilai akhlak dalam setiap mata pelajaran. Dengan demikian, siswa tumbuh tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki kompas moral, yang sangat penting bagi calon pemimpin.

Menurut Ibn Miskawaih kerangka kerja penyempurnaan etika, adalah karakter manusia dibangun di atas empat kebajikan utama yaitu kebijaksanaan, keberanian, moderasi, dan keadilan, yang ia anggap penting untuk mencapai kesempurnaan. Pendidikan moral seharusnya tidak hanya berfokus pada instruksi akademis tetapi harus mengintegrasikan pembiasaan, sebuah proses yang mengarah pada internalisasi

kebajikan(Hermawan & Sudin, 2025). Ia juga berpendapat bahwa jiwa berfungsi sebagai entitas non-material yang mampu tumbuh dan meningkat menuju kesempurnaan. Filosofi ini menggarisbawahi perlunya individu untuk terlibat dalam praktik yang mendorong pemurnian jiwa, yang pada gilirannya mengungkapkan dimensi etika yang lebih dalam yang penting untuk pengembangan karakter yang seimbang.

3. Metode Pendidikan Melalui Keteladanan, Habituation, Dialog dan Tazkiyah

Dalam praktik pendidikan akhlak, metode menjadi krusial. Kedua pemikir Ibnu Miskawaih dan Al-Ghazali menekankan pentingnya metode yang mendalam dan berkelanjutan. Ibnu Miskawaih memandang bahwa pembiasaan (habituation), keteladanan guru, serta dialog filosofis merupakan cara efektif membentuk akhlak mulia.

Al-Ghazali menekankan metode spiritual melalui “*tazkiyah an-nafs*” berupa penyucian jiwa melalui ibadah, muhasabah, mujahadah, dan pelatihan batin agar akhlak baik menjadi terefleksi dalam tingkah laku sehari-hari. Proses ini memungkinkan pembentukan karakter yang stabil, kokoh terhadap godaan dunia, serta konsisten dalam nilai karakter yang sangat dibutuhkan oleh pemimpin Islami.

Metode pendidikan yang efektif memerlukan pendekatan yang holistik dalam pembentukan karakter siswa. Dalam konteks ini, empat metode yang dapat diutilisasi adalah keteladanan, habituasi, dialog, dan tazkiyah. Masing-masing dari metode ini memiliki signifikansi tersendiri dalam membentuk sosok siswa yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga kaya akan nilai-nilai moral dan spiritual.

a. Keteladanan

Keteladanan mengacu pada pengaruh positif yang diberikan oleh guru dan orang dewasa lainnya melalui perilaku, tuturan, dan nilai-nilai yang mereka tunjukkan. Dalam pendidikan agama Islam, pentingnya keteladanan diungkapkan dalam banyak konteks, termasuk dalam konteks pendidikan karakter (Arfani & Iskarim, 2023)(Muid & Nasrulloh, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa siswa cenderung meniru sifat baik dari figure yang mereka anggap sebagai panutan, yang memperkuat nilai-nilai positif di dalam diri mereka (Fataar & Feldman, 2016). Oleh karena itu, pendidik diharapkan tidak hanya

mengajarkan teori, tetapi juga menunjukkan praktik nyata dari nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Mustakim et al., 2024).

Keteladanan diperlukan dalam setiap lingkungan pendidikan, yakni lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Di lingkungan keluarga, keteladanan orang tua sangat diperlukan dalam pendidikan akhlak, di sekolah keteladanan guru mempengaruhi sikap siswa, begitupun di lingkungan masyarakat keteladanan mempengaruhi perilaku baik dan buruk seseorang.

b. *Habituation*

Habitulasi, atau pembiasaan, merupakan suatu metode yang menekankan pengulangan dalam menerapkan nilai-nilai karakter. Ini dianggap sangat efektif dalam membentuk kebiasaan baik di kalangan siswa. Melalui proses habituasi, siswa secara bertahap diharapkan mampu menjadikan nilai-nilai moral sebagai bagian dari perilaku sehari-hari mereka (Hidayati & Mulyaningtyas, 2024; Lisnawati, 2016). Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sekolah yang mendukung habituasi positif dapat membawa dampak besar, baik terhadap perilaku akademik maupun sosial siswa (Sirojudin et al., 2022). Dengan menyediakan pengalaman yang terstruktur dan konsisten, sekolah dapat menciptakan budaya yang mendukung perkembangan karakter yang baik di kalangan siswa.

c. *Dialog*

Dialog sebagai metode pendidikan melibatkan komunikasi terbuka antara guru dan siswa, di mana kedua belah pihak saling berbagi pendapat dan mendiskusikan ide. Metode ini sangat penting dalam pengembangan pemikiran kritis dan reflektif siswa (Matusov & Miyazaki, 2014; Iqbal et al., 2023). Dalam setting pendidikan, dialog mendukung siswa untuk merumuskan pemahaman mereka sendiri mengenai nilai-nilai, sehingga meningkatkan keterlibatan mereka dalam proses belajar (Hidayat et al., 2023). Pembelajaran melalui dialog juga memungkinkan siswa untuk mengekspresikan diri secara bebas dan menyepakati norma serta nilai bersama yang selaras dengan konteks komunitas mereka (Muid & Nasrulloh, 2024).

d. *Tazkiyah*

Tazkiyah, atau penyucian jiwa, merupakan metode yang berfokus pada aspek spiritual dari pendidikan. Di dalam konteks pendidikan Islam, *tazkiyah* tidak hanya berkaitan dengan penyucian lahiriah, tetapi juga

mengacu pada peningkatan moral dan etika siswa agar dapat mencapai tingkat kesalehan yang lebih tinggi (Araújo et al., 2019). Melalui *tazkiyah*, siswa diarahkan untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai spiritual, yang berkontribusi dalam membangun karakter yang kuat di dalam diri mereka (Antika et al., 2022). Aktivitas *tazkiyah* dapat diterapkan melalui berbagai pendekatan, termasuk meditasi, refleksi, dan keterlibatan dalam kegiatan sosial yang positif (Arfani & Iskarim, 2023).

Dengan memadukan keempat metode ini, pendidikan dapat menjadi lebih efektif dalam membentuk karakter yang seimbang, menggabungkan aspek kognitif, moral, dan spiritual. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pendidik untuk mengintegrasikan keteladanan, habituasi, dialog, dan *tazkiyah* dalam kurikulum dan proses pembelajaran sehari-hari.

4. Peran Lingkungan Pendidikan (Madrasah, Guru, dan Komunitas)

Pendidikan akhlak tidak bisa berjalan efektif jika hanya bersandar pada kurikulum atau metode, lingkungan pendidikan dan komunitas pendukung sangat menentukan. Madrasah sebagai institusi mempunyai peluang strategis menciptakan kultur sekolah yang membiasakan akhlak Islami melalui norma, aturan, teladan guru, dan interaksi sosial. Dalam lingkungan demikian, nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, keadilan, kesederhanaan bukan hanya diajarkan, tapi juga dipraktikkan. Keterlibatan keluarga dan masyarakat juga penting: guru dan pemimpin madrasah harus berkoordinasi dengan orang tua, komunitas, masjid, dan lembaga sosial agar pendidikan karakter tidak berhenti di lingkungan sekolah, tetapi meresap ke kehidupan nyata. Hal ini sesuai dengan pandangan pendidikan Islami klasik bahwa pembentukan karakter adalah tugas kolektif umat, bukan hanya institusi formal.

Peran lingkungan pendidikan, yang mencakup madrasah, guru, dan komunitas, sangat penting dalam pembentukan karakter siswa. Taktik dan strategi pendidikan dari berbagai pihak ini dapat saling melengkapi dan memberi dampak yang kuat pada pengembangan nilai-nilai positif dalam diri siswa.

a. Peran Madrasah

Madrasah sebagai institusi pendidikan memainkan peran sentral dalam penanaman nilai-nilai karakter. Sebagai lembaga yang berfokus pada pendidikan agama, madrasah tidak hanya memberikan pendidikan akademik tetapi juga menekankan pendidikan karakter yang berbasis nilai-nilai Islam. Penelitian menunjukkan bahwa madrasah yang menerapkan sistem pendidikan terintegrasi yang menggabungkan ajaran Islam dengan keterampilan hidup sehari-hari mampu mencetak siswa yang berakhlak mulia (Apriyani et al., 2025; Faza et al., 2025). Kegiatan-kegiatan seperti doa bersama, pelajaran akhlak, dan ritual kebersamaan lainnya berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai moral dan kedisiplinan yang diperlukan dalam kehidupan sosial (Maryana, 2024).

b. Peran Guru

Guru memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk karakter siswa. Berbagai penelitian menegaskan bahwa kepribadian guru, seperti keteladanan dan kesabaran, dapat memberikan dampak positif besar terhadap siswa (Nababan, 2025; Fauzan et al., 2024). Melalui metode pengajaran yang menerapkan strategi seperti habituasi dan contoh langsung, guru dapat menanamkan nilai-nilai religius dan moral dalam diri siswa. Sebagai contoh, metode interaksi aktif siswa dalam pembelajaran agama Islam dapat membuat siswa merasa terlibat lebih dalam, yang memperbesar peluang internalisasi nilai-nilai tersebut (Nada & Puspitaningrum, 2024; Fauzan et al., 2024). Dengan metode yang tepat dan dukungan dari sekolah, guru memiliki kekuatan untuk membentuk sikap dan perilaku yang positif pada siswa (Mulyana, 2025; Fauzan et al., 2024).

c. Peran Komunitas

Lingkungan komunitas memberikan latar belakang sosial yang memengaruhi pertumbuhan karakter siswa. Interaksi siswa dengan keluarga, teman, dan masyarakat sekitar sangat penting dalam menguatkan nilai-nilai yang ditanamkan di madrasah dan sekolah. Penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua dalam pendidikan karakter anak sangat berpengaruh terhadap kesuksesan pendidikan tersebut (Pratama et al., 2025; Sjamsir et al., 2024). Misalnya, kegiatan di luar sekolah yang melibatkan masyarakat dapat memperkuat nilai-nilai yang diajarkan di sekolah dan madrasah

Makrup et al., 2025).

Sementara itu, komunitas juga berfungsi sebagai wadah untuk sosialisasi nilai-nilai moral. Dengan mengadakan acara-acara komunitas yang melibatkan pendidikan karakter, baik dari pemerintah maupun organisasi non-pemerintah, sinergi dalam menerapkan pendidikan karakter dapat terwujud (Nurhayati & Aziz, 2025). Ada juga perlunya dukungan dari masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pendidikan moral, termasuk pengawasan terhadap pengaruh negatif seperti media sosial, yang dapat melemahkan internalisasi nilai-nilai positif (Nababan, 2025; Makrup et al., 2025).

Secara keseluruhan, peran lingkungan pendidikan, termasuk madrasah, guru, dan komunitas sangatlah penting dalam pembentukan karakter siswa. Ketiga elemen ini harus berkolaborasi secara efektif untuk menciptakan suasana pendidikan yang mendukung perkembangan moral dan spiritual yang seimbang. Dukungan, sinergi, dan komitmen dari semua pihak sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan karakter yang holistik.

5. Orientasi pada Kepemimpinan dan Pelayanan Dalam Membentuk Pemimpin yang Amanah dan Berintegritas

Kepemimpinan dan pelayanan adalah dua konsep yang saling berhubungan, terutama dalam konteks bagaimana membentuk pemimpin yang amanah dan berintegritas. Di dalam banyak bidang, termasuk pendidikan, organisasi sosial, dan pemerintahan, nilai-nilai ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pemimpin tidak hanya memiliki kompetensi teknis tetapi juga kesadaran moral yang tinggi.

a. Konsep Kepemimpinan dan Amanah

Lingkungan yang sehat dan produktif. Amanah dalam kepemimpinan mencakup tanggung jawab untuk memimpin dengan integritas dan kejujuran. Penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang menerapkan etika dan prinsip amanah akan lebih disegani dan dihormati (Hafidz et al., 2025)(Lathiefah et al., 2022;). Integritas menjadi salah satu faktor kunci dalam mendapatkan kepercayaan dari pengikut, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja organisasi

secara keseluruhan (Arif & Alamsyah, 2023; Armadani & Nasution, 2023).

b. Pelayanan sebagai Inti Kepemimpinan

Model kepemimpinan pelayanan menekankan pentingnya kesediaan untuk melayani orang lain sebagai inti dari kepemimpinan yang efektif. Konsep ini, yang diperkenalkan oleh Greenleaf, menyoroti bahwa pemimpin sejati adalah mereka yang menempatkan kebutuhan orang lain di atas kepentingan pribadi (Ramdani et al., 2023; Agni & Jannah, 2022; Sutisna & Noor, 2022). Dalam konteks ini, pemimpin dituntut untuk tidak hanya menjadi pengambil keputusan yang bijak, tetapi juga untuk menciptakan atmosfer yang mendukung kolaborasi dan partisipasi (Mayuhardi, 2023). Hal ini sesuai dengan temuan bahwa kepemimpinan yang melayani dapat meningkatkan keterlibatan karyawan dan rasa memiliki terhadap organisasi.

c. Nilai-Nilai Etika dalam Kepemimpinan

Kepemimpinan yang etis berperan besar dalam membangun budaya organisasi yang sehat. Dengan memahami dan menerapkan nilai-nilai etika dalam pengambilan keputusan, pemimpin mampu meminimalkan konflik dan memperkuat moral organisasi (Febriana, 2019). Sebuah studi menunjukkan bahwa ketika pemimpin menunjukkan perilaku etis, anggota tim lebih cenderung meniru tindakan tersebut, yang berdampak pada peningkatan keseluruhan kinerja kelompok (Trihudiyatmanto, 2021).

d. Pengembangan Kepemimpinan yang Berintegritas

Proses pengembangan pemimpin yang amanah dan berintegritas memerlukan upaya berkelanjutan dalam bentuk pelatihan, mentoring, dan pembinaan karakter (Lathiefah et al., 2022; Makasengku et al., 2022). Menggunakan nilai-nilai agama dan etika sebagai landasan, kepemimpinan yang mengutamakan integritas dapat membina generasi pemimpin yang bukan hanya kompeten secara profesional tetapi juga bertanggung jawab secara moral. Pendidikan karakter harus menjadi bagian integral dari pelatihan kepemimpinan di semua level, baik formal maupun informal (Panggabean & Harahap, 2024).

Orientasi kepemimpinan dan pelayanan dalam mencetak pemimpin yang amanah dan berintegritas merupakan suatu keharusan dalam berbagai konteks. Melalui penerapan nilai-nilai etika dan pelayanan, pemimpin bukan hanya akan mendapatkan kepercayaan dari pengikut,

tetapi juga mampu menciptakan budaya organisasi yang positif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah membangun dan menerapkan pendekatan-pendekatan ini dalam setiap aspek kepemimpinan agar tujuan pembangunan karakter dan integritas dapat tercapai.

BAB 7

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pendidikan akhlak merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam sejarah Islam, para sahabat Nabi seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib menjadi teladan ideal bagi kepemimpinan yang dibangun atas dasar moralitas tinggi, keadilan, tanggung jawab, serta kepekaan sosial. Prinsip-prinsip tersebut tetap relevan dan sangat dibutuhkan dalam menghadapi krisis kepemimpinan modern yang kerap diwarnai oleh pragmatisme dan dekadensi moral.

Globalisasi dan perkembangan zaman membawa tantangan besar terhadap sistem nilai dan integritas moral masyarakat. Krisis moral yang melanda berbagai sektor kehidupan telah memperlemah kualitas kepemimpinan dan kepercayaan publik. Oleh sebab itu, madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan pendidikan akhlak ke dalam seluruh aspek pembelajaran untuk membentuk pemimpin masa depan yang unggul secara spiritual dan intelektual.

Melalui penguatan pendidikan akhlak yang didasarkan pada prinsip-prinsip klasik Islam sebagaimana dikembangkan oleh pemikir seperti Ibnu Miskawaih dan Al-Ghazali serta dukungan kurikulum terpadu dan lingkungan pendidikan yang kondusif, diharapkan dapat lahir generasi

pemimpin yang tidak hanya cakap secara teknis, tetapi juga kokoh dalam nilai, adil dalam tindakan, dan amanah dalam tanggung jawab.

B. Rekomendasi Teoretis dan Praktis

1. Rekomendasi Teoretis

- a. Perlu adanya kajian lanjutan yang lebih mendalam terhadap konsep pendidikan akhlak dalam karya-karya klasik Islam untuk memperkuat fondasi teoritis pengembangan kepemimpinan Islami kontemporer.
- b. Pendekatan multidisipliner perlu dikembangkan dengan menggabungkan perspektif filsafat pendidikan, psikologi moral, dan studi kepemimpinan agar konsep pendidikan akhlak lebih relevan dengan dinamika masyarakat modern.
- c. Diperlukan formulasi teori kepemimpinan Islami yang berbasis pada pengembangan karakter, bukan hanya pada aspek manajerial, agar tercipta model kepemimpinan yang utuh dan kontekstual.

2. Rekomendasi Praktis

- a. Madrasah dan lembaga pendidikan Islam hendaknya memperkuat integrasi antara kurikulum akademik dan pembinaan akhlak, baik melalui pengajaran langsung maupun melalui pembiasaan dan keteladanan.
- b. Guru dan tenaga pendidik perlu dibekali dengan pelatihan khusus dalam pendidikan karakter dan kepemimpinan Islami, agar mereka mampu menjadi role model dan agen perubahan moral.
- c. Pemerintah dan stakeholder pendidikan Islam harus memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan sistem pendidikan karakter, termasuk dukungan regulasi, anggaran, dan fasilitas yang mendukung terwujudnya pendidikan akhlak yang efektif dan berkelanjutan.

Dāftār Püstākā

- Abbas, N., Subando, J., & Tamami, M. Z. (2023). *Pendidikan Keteladanan Shalahuddin Al-Ayyubi Konteks Pendidikan Islam Era Society 5. 0.* 2(2), 117–128.
- Abdul Karim Zaidân. (1998). *Ushûl ad-Da'wah: Mu'assasah ar-Risalah.*
- Abu Hamid Al-Ghazali. (1998). *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn.* Dar Al-Kutub al-'Ilmiyyah di Beirut.
- Ad-Dumaiji, A. (2016). *Al-Imamah al Uzhma Inda'ahlissunnah Wal Jama'ah.* Ummul Qura.
- Akbar, A., Misbah, A., & Arisandi, Y. (2022). *Sistem Ekonomi dan Fiskal pada Masa Khulafaur Rasyidin.* 1(1), 29–42.
<https://doi.org/10.38073/dies.v1i1.598>
- Akbar, N. (2018). *Kepemimpinan Islam Kepemimpinan Yang Membimbing.* Antasari Press.
- Akhmad Rifansyah; Ahmad Muhajir; Achmad Khafi; Mahfud Ifendi. (2025). Masa Pertumbuhan dan Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 3(1).
- Al-Ghazali. (n.d.). *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn, Jilid III.* Dar Al-Fikr.
- Al-Ghazali. (1960). *Al-Munziq min al-Dhala.* Maktabah al-Sya'ibah.
- Al-Ghazali. (1962). *Ihya' Ulum al-Din.* Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Al-Ghazali. (1983). *Ihya' Ulum al-Dien.* Fauzan.
- Al-Ghazali. (2000). *Ihya Ulumuddin.* Daar Al-Taqwa.
- Al-Lathif. (2020). *Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali Kisah Hidup dan Pemikiran Sang Pembaru Islam.* Araska Publisher.
- Al-madjidi. (1997). *Konsep Pendidikan Para Filosof Muslim (Al-Amin (ed.)).*
- Aldzakhiroh, N., Nopriansyah, B., Ramadhani, G. F., Mubaraq, Z., & Kholid, N. (2024). *Political dynamics of the era of ali bin abi thalib (contribution of the political system in islamic civilization).* 7, 152–

- Ali Farid Dahruj. (2008). *Al-Akhlak Dirosah Tarikhiyah Fikriyah wa Islamiyah*. Bairut.
- Arif, M., Kasturi, M., & Abd, N. (2022). The Relevance Of Islamic Educational Characteristics In The 21st Century (A Study on Al-Suhrawardi ' s Thoughts in Adabul Muridin Book). *Journal of Islamic Education and Institutions STAI Syichona Moh. Choli Bangkalan*, 13(1), 175–196.
- As-Salus, A. (1997). *Imamah dan Khalifah: Dalam Tinjauan Syar'i*. Gema Insani Press.
- Asih Setiyowati;Cikal Jiwani Putri; Feni Miftakhul Jannah;Muhammad Rizaludin As'ad. (2021). *Kepemimpinan Islam Periode Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib) Asih. 1*, 262–274.
- Astuti, R. R. S. M. (2024). *The Philosophy of Greek Rationalism - Islamic Spirituality and Classical Islamic Education Theory: Al-Farabi and Ibnu Sina*. 3(5), 1517–1525.
- Atabik, A., & Muhdhlor, A. Z. (2003). *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Multi Karya Grafika.
- Awaliyah, T. (2018). *Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Sa ' id Hawwa*. 6(1).
- Azhari, M. (2024). *Integrasi Pendidikan Karakter Berbasis Nilai-nilai Keislaman di Madrasah : Implementasi dan Evaluasi*. 2(4), 691–700.
- Azizah, N. (2017). Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih Konsep Dan Urgensinya Dalam Pengembangan Karakter Di Indonesia. *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas Dan Intelektualitas*, 5(2). <https://doi.org/10.31942/pgrs.v5i2.2609>
- Bafadhol, I. (2017). *Pendidikan Akhlak Dalam Perspektif Islam Pendidikan Akhlak ... Pendidikan Akhlak 0*(12).
- Elias Shoufani. (1973). *Al-Riddah and the Muslim Conquest of Arabia*. University of Toronto Press.
<https://www.jstor.org/stable/10.3138/j.ctvfrxn74>
- Emroni. (2023a). *Pendidikan Akhlak: Landasan Etika Untuk Kehidupan yang Bermakna*. Antasari Press.
- Emroni. (2023b). *Pendidikan akhlak Landasan Etika untuk Kehidupan Bermakna* (Muhdi (ed.)). Antasari Press Jalan Jenderal Ahmad Yani

- Km. 4,5 Banjarmasin Kalimantan Selatan 70235 05113252829
<http://uin-antasari.ac.id>.
- Fahmi, Z. (2024). *Model Kepemimpinan Abu Syekh H. Hasanoel Bashry HG dalam Pengembangan Pendidikan*. 7(2), 40–55.
- Fajar, D., & Umami, I. (2025). *Pengembangan Karakter Kepemimpinan Di Pendidikan Dasar Melalui Peran Organisasi Siswa: Integrasi Nilai- Nilai Kemuhammadiyah*. 3, 415–433.
- Fatimah, N., Budiyo, C., Ihsanda, N., Hariyanto, T., & Hasanah, A. (2025). *Urgensi Pendidikan Karakter dalam Membentuk Akhlak Mulia : Kajian Literatur Pendidikan Islam*. 04(2), 452–464.
- Fatmawati. (2020). *Implementasi Kompetensi Kepemimpinan Guru PAI dalam Mengaktualisasikan Akhlak Mulia Peserta Didik*. 9(1), 1–2.
- Fitriasih, D., & Rohmadi, S. H. (2024). *Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Pendidikan Islam : Menyiapkan Pemimpin Masa Depan*. 6(1), 199–207.
- Habibah, A. N. (2019). Konsep Negara Ideal Dalam Pemikiran Al-Farabi Telaah Kitab Ara Ahl Madinah Al Fadilah. *Jurnal Spiritualis*, 5(2), 146. <https://doi.org/https://doi.org/10.53429/spiritualis.v5i2.65>.
- Habriyanti, Fadhil, M., & Munir, I. (2024). *Implementasi Pembelajaran Akidah Akhlak Dalam Pengembangan Kepribadian Siswa di MTs Negeri 1 Tanjung Jabung Timur*. 2, 101–113.
- Handal Pratama Putra. (2019). Ibnu Miskawaih: Philosophical Thoughts On Moral Education And Its Relevance To Contemporary Islamic Education. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Handayani, L. (2020). *Implementasi Mata Pelajaran Akidah Akhlak dalam Pembentukan Karakter Siswa Madrasah Ibtidaiyah Miftakhul Falah Kedu Lubna handayani*. 4(1), 138–154.
- Hasanah. (2021). *Konsep Pendidikan Keluarga" Al-Madrasah Al-Ula": Kajian Pemikiran Al-Ghazali*. Yayasan Pendidikan Tinggi Nusantara (YAPTINU).
- Hermawan, W., & Sudin, M. (2025). Moral Education Approaches: Ibn Miskawayh And Imam Al-Ghazali. *Jurnal Hadratul Madaniah*, 12(1), 80–90.
- Herningrum, I., & Alfian, M. (2019). Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(01).
- Hidayat, A. A., Muttaqin, I., Islam, U., Maulana, N., Ibrahim, M., & Timur, J. (2024). *Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam (Pengertian,*

- Karakteristik Kepemimpinan Rasulullah, Karakteristik Kepemimpinan Islam dan Keberhasilannya*).
- Hidayat, N. (2020). onsep Pendidikan Akhlak Menurut Al-Ghazali dalam Ihya' Ulumuddin. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (JPAI)*, 02(5), 155–166.
- Ibn MIskawaih. (1966). *Tahdzib al-Akhlaq*. Dar al-Ma'arif.
- Imam Anas Hadi. (2021). *Studi Komparasi Pemikiran Imam Al-Ghozali Dan K. H. Hasyim Asy ' Ari Tentang Pendidikan Karakter*. 5(2), 213–233.
- Indriawati, M., Rahman, R. N., Parhatuss hafwah, R., Fikri, F., Fahmi, A., & Tangerang, U. I. S. (2025). Revitalisasi Pendidikan Islam Untuk Mencetak Pemimpin Masa Depan. *Tashdiq*, 12(1).
- Iqbal, M., & Nasution, A. H. (2010). *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*. Kencana.
- Iskandar, & Syarkawi. (2024). *Model Kepemimpinan Islami Orang Tua Dalam keluarga : Menuju Pengembangan Pendidikan Karakter*. 3(333), 10–21.
- Iva Inayatul Ilahiyah; Muhammad Nur Salim. (2019). Karakteristik Kepemimpinan Khulafa Ar- Rasyidin (Abu Bakar As-shiddiq, Umar Bin Khattab, Utsman Bin Affan, Ali Bin Abi Thalib). *El-Islam*, 1(1).
- Jahari, J., & Rusdiana, H. (2020). *Kepemimpinan Pendidikan islam* (E. HERMAWAN (ed.)). yayasan darul hikam Jl. Ir. H. Juanda No. 285, Bandung.
- Jamil, M. Y. (2016). Gagasan Al-Farabi Tentang Negara Ideal (Al-Madinat Al-Fadhilat). *Al-Qisthas: Jurnal Hukum Dan Politik*, 7(2), 172.
- Kadenun. (2021). *Proses Peralihan Kekuasaan Dan Kebijaksanaan Dalam Pemerintahan Khulafaurrasyidin*. 1(2), 1–27.
- Karimah, U., Irfan, A., & Putri, O. A. (2025). *Inovasi Dalam Mengkoneksikan Pembentukan Perspektif Manajemen Pendidikan Islam*. 07(01), 15–29.
- Khobir, A. (2009). Pendidikan Agama Islam Di Era Globalisasi. *Forum Tarbiyah*, 7(1), 1–11.
- Kholiq, I. A., & Sulaim, U. (2024). Penanaman Nilai-Nilai Akhlak Mahmudah (Akhlak Terpuji) di SMA Negeri 2 Jakarta. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 253–260.
- M Quraish Shihab. (2000). *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*. Lentera Hati.

- Madkour, I. (1996). *Filsafat Islam: Teori dan Penerapannya*. Raja Grafindo Persada.
- Maesak, C., Kurahman, O. T., Rusmana, D., Islam, U., Sunan, N., & Djati, G. (2025). *Peran Pendidikan Islam Dalam Mengatasi Krisis Moral Generasi Z Di Era Globalisasi Digital*.
- Mahsyam, S. (2021). *Konsep Pendidikan Akhlak dalam Kisah Nabi Ibrahim*.
- Mahyuddin. (2001). *Kuliah Akhlaq Tasawuf*. Kalam Mulia.
- Manzil, K. L., & Muttaqin, M. I. (2024). *Kepemimpinan Dalam Pendidikan Islam (Pengertian, Karakteristik Kepemimpinan Rasulullah, Karakteristik Kepemimpinan Pendidikan Islam, dan Keberhasilannya)*. 1(7), 734–743.
- Maulana, A., Jahari, J., & Dian. (2019). *Implementasi Manajemen Mutu Pendidikan di Madrasah Swasta*. 1(2), 89–96.
- Miskawaih, I. (1985). *Tahdzib Al-Akhlaq*. Darul al-Kutub al-Ilmiah.
- Miswar, M. (2021). Konsep Pendidikan Akhlak Menurut Ibnu Miskawaih. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 14(1), 13–21.
<https://doi.org/10.51672/alfikru.v14i1.32>
- Moussa, A. (2025). *Justice And Rational Deliberation In Al-Farabi's Philosophy*. 0–8. [https://doi.org/10.31435/ijitss.1\(45\).2025.3378](https://doi.org/10.31435/ijitss.1(45).2025.3378)
- Mubarok, A. (2001). *Panduan Akhlak Mulia Membangun Manusia dan Bangsa Berkarakter*. Bina Rena Pariwara.
- Mufida, D., Sutono, A., Purnamasari, L., & Sulianto, J. (2020). *Integrasi Nilai-Nilai Islami Dan Penguatan Pendidikan Karakter* (A. Umuludin (ed.); Tim Kreati). UPT Penerbitan Universitas PGRI Semarang Press Jl. Sidodadi Timur No 24, Dr. Cipto Semarang 50125 Jawa Tengah. Telepon: 085640369110 ii.
- Muhammad al-Ghozali. (2005). *Ihya Ulumuddin* (Bairut (ed.)).
- Muttaqin, Jamalul, & Syamsiyani. (2022). Al-Farabi: Politik Sebagai Jalan Kebahagiaan. *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 14(2), 129–144.
- Nasr, S. H., & Leaman, O. (1996). *History of Islamic Philosophy* (1st ed.). Routledge.
- Nidawati. (2005). *Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*. 1–22.
- Noor, S., & Hidayah, M. (2022). *Ibnu Miskawaih ' s Islamic Economic Thinking (Reviewing The Concept of Exchange and The Role of Money According to Ibnu Miskawaih)*. 3190, 157–176.

- Normuslim, muslim, Hayati, R. (2025). Integrasi Nilai-Nilai Humanis Dalam Kepemimpinan Pendidikan Islam Multikultural. *Sosial Dan Sains*, 5(5), 1457–1465.
- Nur, F. M. (2025). *Pendidikan Akhlak Berbasis Tasawuf: Relevansi dan Implementasi dalam Konteks Pendidikan Modern*. 4, 199–212.
- Pendidikan, G., & Hamid, A. (2012). *Nukilan Pemikiran Islam Klasik: Gagasan Pendidikan Abu Hamid Al-Ghazali*. IAIN Press.
- Purwanto, M., & Kholid, I. (2022). *Prophetic Leadership and Its Contribution to Building Religious Character*. 06(02), 434–448.
- Putra, Y. A. H. (2025). Tantangan dan Strategi Pendidikan Agama Islam dalam Membangun Integritas Moral Pemuda Muslim di Era Globalisasi. *Pendidikan Islam*, 11(1).
- Rahma Aulia Hasanah; Rodiatul Husna;Gafa Anjasya;Fikri Azka Tanjung;Masleni Nasution. (2023). *Perekonomian Pada Masa Al-Khulafa' Al-Rasyidin*. *JUREKSI*.
<https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i1.700>
- Rahmadi, M. (n.d.). *Pengelolaan pendidikan karakter berbasis islam*.
- Ramli, M., & Zamzami, D. N. (2022). *Konsep Pendidikan Akhlak Ibnu Miskawaih (Studi Kitab Tahdzib Al-Akhlak)*. 5(2), 208–220.
<https://doi.org/https://doi.org/10.32923/kjmp.v5i2.2669>
- Razia Shabana;Makhdoom Muhammad Roshan Siddiqui;Saira Taiba. (2023). *Prevailing Legacy of the Khulāfa-e-Rāshidīn: Their enduring Influence on Present Age Islamic Governance*. 105–118.
- Ridho, M. Y., & Siahaan, A. (2025). *The Role of Madrasah Principal Leadership in Developing Students ' Social Character at MTsN 4 Mandailing Natal*. 4(3), 1239–1250.
- Rifyal Novalia;Titin Kusayang;Wulansari Vitaloka. (2023). Personality Moderation in the Perspective of Islamic Psychology: A Study of the Works and Teachings of Ibn Miskawaih. *Ishlah*, 5(2).
<https://doi.org/https://doi.org/10.32939/ishlah.v5i2.250>
- Rochim, A. N., & Muttaqien, M. I. (2025). *Keadilan, Amanah, dan Musyawarah: Integrasi Nilai Kepemimpinan Islam dalam Manajemen Pendidikan Modern*. 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.56910/jym.v11i2.513>
- Rusydi, I. (2021). *Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam Di Madrasah*. 7(1), 75–83.

- Said, M., & Jamarudin, A. (2023). *Sharia economic law policy umar ibn al-khattab*. 4(1), 39–62.
- Sari, E. R., Ma, I., Triana, M., & Hidayat, R. (2025). *Praktek Kepemimpinan Pendidikan Islam di Lembaga Pendidikan Pesantren*. 6(3), 567–580.
- Setiawan, L. P. (n.d.). *Efektivitas Metode Pembelajaran Al-Qur 'an dalam Meningkatkan Pemahaman Keberagamaan Siswa (Studi Deskriptif: SMA IT As-Syifa Boarding School Wanareja)*. 7(2), 186–195.
- Shofiyah, N. A., Komarudin, T. S., & Ulum, M. (2023). *Integrasi Nilai-Nilai Islami dalam Praktik Kepemimpinan Pendidikan : Membangun Lingkungan Pembelajaran yang Berdaya Saing*. 9(2), 66–77.
- Sholihah, A. M. (2020). *Pendidikan Islam sebagai Fondasi Pendidikan Karakter*. 12(1), 49–58.
- Siregar, A. Y., & Amril, M. (2025). Ali ibn Abi Talib : The Caliphate Conflicts of Ali ibn Abi Talib and Their Relevance to Modern Islamic Politics. *TOFEDU: The Future of Education Journal*, 4(5), 1324–1333.
- Suhartawan, B. (2021). Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Al- Qur ' An. *Tafakkur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 2(1), 1–23.
- Sujarwo, A. (2024). *Implementasi Manajemen Pendidikan Islam Berbasis Karakter : Strategi Pembangunan Karakter Siswa di Madrasah*. 5, 2059–2070.
- Sukardi, I. (2017). Negara Dan Kepemimpinan Dalam Pemikiran Al-Farabi. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 14(2), 284–285.
- Supriyanto. (2022). *Filsafat Akhlak Ibnu Miskawaih*. Rizquna.
- Suryadarma, Y., & Haq, A. H. (2015). Pendidikan Akhlak Menurut Imam Al-Ghazali. *At-Ta'dib*, 10(2), 362–381.
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/tadib/article/view/460>
- Suseno, F. M. (1987). *Etika Dasar, Pusat Filosof*.
- Syafi'i, M. (2017). Etika Dalam Pandangan Al-Farabi. *Ilmu Ushuluddin*, 16(2), 139–160.
- Syafiqurrohman, M. (2020). *Implementasi Pendidikan Akhlak Integratif-Inklusif*. 12(1), 37–48.
- Syahrul. (2015). *Kepemimpinan Dan Inovasi Lembaga Pendidikan (Pengalaman Pondok Gontor Vii Putra Sulawesi Tenggara)*. 8(1), 82–100.

- Wartono, & Ginanjar, M. (2018). *Karakteristik Kepemimpinan Pendidikan Islam Berbasis Masjid*. 1(1), 1–21.
- Widianti, F. D., & Program. (2022). Dampak Globalisasi Di Negara Indonesia. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 2(1), 73–95.
- Widodo, W. (2024). *Inovasi Manajemen Pendidikan Islam Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Dan Karakter Santri Di Pondok Pesantren Al-Mustofa Jember*. 5, 174–201. <https://doi.org/https://doi.org/10.58578/yasin.v5i1.4712>
- Wiguna, A., Heriyanto, A., Setiani, F., Anggraini, G., Prayitno, H. J., Abdul, G., & Zakaria, N. (2020). Character Strength And Virtues In The Perspective Of Islamic Education Psychology. *Psikopedagogia Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, 9(1), 14–25. <https://doi.org/10.12928/psikopedagogia.v9i1.17909>
- Wiyono, M., Pascasarjana, S., Islam, U., & Syarif, N. (2016). *Pemikiran filsafat al-farabi*. 18(April), 67–80.
- Yusuf, burhanuddin. (2022). *Mengungkit Batang Terpendam: Khazanah Pemikiran Buya Hamka Dalam Pendidikan*. 01(01), 41–50.
- Zenaida, Y. C., Ardiansyah, D., & Widodo, W. (2023). Membentuk Generasi Pemimpin Masa Depan : Eksplorasi Pendidikan dan Pengasuhan Anak Perspektif Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 8(2), 257–274. [https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8\(2\).14282](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2023.vol8(2).14282)

Tentang Penulis



Prof. Dr. Drs. H. Maragustam Siregar, B.A., M.A. lahir di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, pada 1 Oktober 1959. Pendidikan Tsanawiyah dan Aliyah diselesaikan di Pondok Pesantren Musthofawiyah Purbabaru, Mandailing Natal, Sumatera Utara, pada tahun 1979. Gelar sarjana (S1) diperoleh dari Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1986), Jurusan Bahasa Arab. Selanjutnya meraih gelar S2 dan S3 (Doktor) pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

dengan konsentrasi Pendidikan Islam. Beliau dikukuhkan sebagai **Guru Besar dalam bidang Filsafat Pendidikan Islam** di UIN Sunan Kalijaga sejak tahun 2008. Adapun beberapa jabatan yang pernah dan sedang diemban antara lain:

- **2000–2004:** Pembantu Dekan Bidang Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga.
- **2005–2011:** Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga.
- **2011–2015:** Ketua Program Studi Pendidikan Islam Pascasarjana (S2) UIN Sunan Kalijaga.
- **2016–2020:** Sekretaris Kopertais Wilayah III D.I. Yogyakarta.
- **2017–2020:** Ketua Program Doktor Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga.
- **2017–2020:** Ketua Program Doktor Pendidikan Agama Islam UNU Surakarta.

Selain sebagai dosen tetap Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, beliau juga mengajar pada berbagai program pascasarjana, antara lain:

- Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga (S2 dan S3).
- Pascasarjana UIN Raden Intan Lampung (S2 dan S3) tahun 2015–2020.
- Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Surakarta (S2 dan S3) hingga sekarang.
- Pascasarjana (S3) UNWAHAS Semarang tahun 2015–2019.
- Pascasarjana (S2) UII Yogyakarta tahun 2014–2023.
- Pascasarjana Program Doktor (S3) IAIN Purwokerto Jawa Tengah tahun 2016–2018.

Saat ini beliau menjabat sebagai **Sekretaris Senat UIN Sunan Kalijaga** untuk periode 2020–2024 dan 2024–2028.

Sejumlah karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain:

- *Pemilihan Umum Mahasiswa Tahun 2009 UIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Bidang Kemahasiswaan UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- *Panduan Beasiswa dan Dharmasiswa*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- *Pemikiran Pendidikan Syekh Nawawi al-Bantani*, Yogyakarta: CV Datamedia, 2007.
- *Mencetak Pembelajar Menjadi Insan Paripurna (Falsafah Pendidikan Islam)*, Yogyakarta: Nuha Litera, 2010.
- *Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter*, Yogyakarta: FITK UIN Sunan Kalijaga, 2018.
- *Pembentukan Karakter Anak Bangsa (Perspektif Filsafat Pendidikan Islam)*, Yogyakarta: FITK UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- *Syekh Nawawi Al-Bantani (Mahaguru Sejati): Filsafat dan Pemikirannya Tentang Pendidikan Islam*, Yogyakarta: FITK UIN Sunan Kalijaga, 2020.
- *Syekh Nawawi al-Bantani Maha Guru Sejati dan Ilmuan (Geneologi, Filsafat Pendidikan, Perempuan, dan Relasi Suami Istri)*, Yogyakarta: Deepublish, 2023.
- *Pedoman Pengembangan Mahasiswa Menjadi Pembelajar yang Sukses (Strategi Kunci Pengembangan Jati Diri dan Sukses Studi)*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.

Selain itu, beliau juga aktif menulis di berbagai media nasional dan internasional. Profil publikasi dapat diakses melalui Google Scholar: (<https://scholar.google.co.id/citations?user=ndef6zQAAAAJ&hl=en>)

Di samping aktivitas akademik, beliau juga aktif menjadi pembicara dalam berbagai seminar serta sebagai trainer dalam berbagai pelatihan. *Wallahu A'lam Bis Shawab*

Yogyakarta, 2025



Dr. Siti Khodijah, S.Pdi, M.Si, C.PS, C.ME, CCP, C.LI, C.ME., C.LI., C.CP., C.MP., C.PS., C.MC., C.LS., CPT.PS., C.GMC., CLTQT, CHNLPT., CSTT., CMFT., CAIT. Lahir di Bekasi 11 November 1986. **Pendidikan** S1 UNISMA Bekasi, S2 Universitas Nasional, S3 UIN Sunankalijaga Yogyakarta. **Penghargaan** sebagai dosen terbaik kategori dosen produktif pada semester ganjil TA

2023/2024, dosen terbaik kategori dosen kreatif semester genap TA 2023/2024 di Fakultas Agama Islam UNISMA Bekasi, dosen terbaik di STIKes Mitra RIA Husada Jakarta tahun 2024 dan tahun 2025, mahasiswa terbaik dua UIN Sunankalijaga tahun 2025, dan penghargaan akademik dengan gelar doktor dari Pondok Pesantren At-Taqwa Putri Pusat tahun 2025. **Buku yang sudah diterbitkan:** 1) Memahami Pentingnya Pendidikan Karakter - Solusi Memahami Diri Sendiri; Melintasi Ruang Pendidikan-Mengajar dengan Hati; 2) Guru sebagai Teladan Pendidikan Karakter; 3) Cara Tepat Memahami Perkembangan Peserta Didik; 4) Urgensi Pendidikan Karakter Dalam Memahami Perkembangan Peserta Didik; 5) Peran Pendidikan Karakter dalam Penulisan Ilmiah Kesehatan Masyarakat; 6) Memahami Psikologi Untuk Menginspirasi Generasi Muda Psikologi Keluarga; 7) Transformasi Pendidikan Melalui Psikologi dan Inovasi; 8) Buku Bunga Rampai Future Jakarta: Penggunaan AI Dalam Membentuk Karakter Siswa: Menciptakan Generasi Emas Jakarta Menuju Smart City; 9) Buku Ajar Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi Umum; Buku Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. **Aktivitas saat ini** sebagai dosen di STIKes Mitra RIA Husada

Jakarta dan Universitas Islam 45 Bekasi, manajer Program Sosial Hope 4 our Children, konsultan pendidikan, fasilitator pendidikan karakter, Certified Public Speaking (C.PS), Certified Motivator Education (C.ME), Certified Learning Inovator (C.LI), Certified Counselor Professional (C.CP), Certified Motivator Pendidikan(C.MP), Certified Master of Ceremony (C.MC), Certified Leadership Skills (C.LS), Certified Profesional Trainer Public Speaking (CPT.PS), Certified Growth Mindset Coach (C.GMC), Certified Mindfulness for Teaching (CMFT), Certified Learning and Teaching Based Quantum (CLTQT), Certified Hypnosis and NLP for Teaching (CHNLPT), Certified Story Telling for Teaching and AI for Teaching (CSTT), Certified Artificial Intelugence For Teacher (CAIT).
Motto hidup: Jika Kamu Tidak Unggul Di Masa Lalu, Maka Jadilah Hebat Di Masa Depan

Bekasi, 2025



Marakhilda Namora Hana Siregar, M.A. lahir di Klaten pada 14 Desember 1991. **Pendidikan:** Sejak masa pendidikan dasar hingga menengah, ia telah menunjukkan minat yang kuat pada kajian sosial, kemanusiaan, dan budaya. Pendidikan menengah pertama dan atas ditempuh di SMP Negeri 4 Depok dan SMA Negeri 1 Depok, Sleman, Yogyakarta, dua institusi yang turut membentuk fondasi akademiknya terutama dalam kemampuan literasi,

komunikasi, dan kepekaan terhadap dinamika sosial. Pada tahun 2018, ia menyelesaikan pendidikan sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta. Selama studi sarjana, minatnya dalam kajian komunikasi, media, dan isu-isu kebudayaan semakin berkembang, dibuktikan dengan keterlibatan aktif dalam kegiatan riset, penulisan ilmiah, serta organisasi kemahasiswaan. Melanjutkan pendidikannya pada jenjang magister, ia meraih gelar Master of Arts (M.A.) dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada pada tahun 2022. Di jenjang ini, ia memfokuskan diri pada konsentrasi Kajian Budaya Media (Media Cultural Studies), sebuah bidang yang menelaah relasi antara media,

representasi budaya, dan struktur sosial. Penelitian-penelitiannya pada periode ini banyak berkaitan dengan konstruksi identitas, dinamika wacana, serta implikasi sosial dari praktik-praktik komunikasi kontemporer. **Saat ini, Marakhilda** Namora Hana Siregar mengabdikan diri sebagai dosen tetap pada Program Studi Sarjana Terapan Administrasi Perkantoran, Fakultas Vokasi, Universitas Negeri Yogyakarta. Dalam kapasitasnya sebagai pendidik dan akademisi, ia mampu berbagai mata kuliah yang terkait dengan komunikasi organisasi, manajemen perkantoran, literasi media, serta pengembangan kompetensi profesional di lingkungan vokasi. Aktivitas akademiknya meliputi pengajaran, penelitian, publikasi ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. Ia juga aktif terlibat dalam berbagai forum ilmiah, seminar, dan kegiatan pengembangan keilmuan lainnya.

Sejalan dengan komitmennya untuk terus memperdalam khazanah keilmuan, ia saat ini tengah menempuh pendidikan doktoral (S3) pada Program Studi Bahasa, Budaya, dan Sastra Daerah, Universitas Negeri Yogyakarta. Fokus studinya mencakup kajian budaya lokal, identitas masyarakat, serta dinamika kebahasaan dan kesastraan dalam konteks perubahan sosial. Upaya akademik ini mencerminkan dedikasinya untuk mengintegrasikan perspektif komunikasi dan kebudayaan dalam memahami fenomena sosial kontemporer, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik pendidikan di Indonesia.

Yogyakarta, 2025